LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BALAI POM DI SURAKARTA

Jl. Siwalan No. 59d, Kerten Kecamatan Laweyan, Kota, Surakarta
Telp/ Fax (0271) 7788090
email : bpom_surakarta@pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Surakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan *(sustainable and continuing improvement)* dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 28 September 2026

Kepala Balai POM di Surakarta,

Taufiqurrohman, S.Si.,MA.B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis pada tahun 2025. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Surakarta periode 2025–2029.

Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Surakarta tahun 2025 sebesar 93,34% dengan kategori Baik ( ) . Capaian kinerja ini merupakan hasil dari upaya pencapaian 8 sasaran kegiatan yang dijabarkan ke dalam 28 indikator kinerja sasaran kegiatan.

1. Capaian indikator pada sasaran kegiatan pertama 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 104,75% dengan kategori Sangat Baik
2. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua ‘Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi’ sebesar 105,03% dengan kategori Sangat Baik.
3. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga ‘Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Surakarta’ sebesar 100,13% dengan kategori Sangat Baik.
4. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat ‘Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu’ sebesar 100% dengan kategori Baik.
5. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima ‘Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta’ sebesar 120% dengan kategori Tidak dapat Disimpulkan.
6. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam ‘Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta’ sebesar 108,89% dengan kategori Sangat Baik.
7. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh “Layanan Publik Balai POM di Surakarta yang prima “ sebesar 113,81% dengan kategori Tdak dapat Disimpulkan.
8. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar 99,89% dengan kategori Baik.

Realisasi capaian 28 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut

:

1. 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) terdiri dari :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,27%.

b. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO dengan capaian sebesar 102,58%.

c. Indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,27%.

d. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,53%.

e. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 107,04%.

f. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,56%.

g. Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,28%.

h. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,96%.

i. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elekronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 102,00%.

j. Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 105,27%.

k. Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 102,29%.

l. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 105,03%.

m. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100,53%.

n. Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian sebesar 108,89%.

o. Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 103,20%.

2. 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 100%) terdiri dari :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian sebesar 100%.

b. Indikator Persentase Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian sebesar 100%.

c. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100%

d. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100,00%

e. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 100%

f. Indikator Persentase Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian sebesar 100%

g. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100%

h. Indikator Nilai AKIP Balai POM Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 99,59%

i. Indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 96,79%

3. 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian X >110%) terdiri dari :

a. Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,48%

b. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 120,00%.

c. Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 113,81%.

4. 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di exclude kan dari realisasi pencapaian yaitu Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, karena Balai POM di Surakarta tidak menguji sampel KLB pada tahun 2025.

Pada Tahun 2025, capaian indikator kinerja Balai POM di Surakarta berkisar antara 96,79% hingga 120%. Indikator dengan capaian terendah adalah Indeks Manajemen Risiko. Pencapaian ini sudah dalam kategori baik. Selanjutnya diharapkan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM dan pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko dapat terjaga.

Indikator dengan capaian tertinggi Adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini terjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

karena Perencanaan kegiatan penindakan yang lebih matang, Penguatan koordinasi dengan ICJS (Integrated Criminal Justice System) baik dengan korwas maupun jaksa penuntut umum (JPU), Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik SDM, anggaran maupun sarana prasarana dan Kerjasama baik yang telah terjalin dengan korwas maupun JPU. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang melampaui target mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam pengendalian faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara pada periode berikutnya.

Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta pada triwulan IV melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan IV, sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan dinilai efisien dan 3 (tiga) sasaran kegiatan dinilai belum efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,01 sampai 3,50. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kendala atau hambatan yang dihadapi atas terjadinya ketidakefisienan pada Balai POM di Surakarta yaitu adanya kebijakan blokir dalam rangka efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan dukungan pembiayaan pada sasaran kegiatan yang terjadi inefisiensi.

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.516.391.000,00** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dengan realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2025 adalah **Rp5.874.829.224,00** (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) atau 68.98%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjusment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.882.081.000,00** (lima miliar delapan ratus delapan puluh duat juta delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adjusment adalah 99.88 %.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja, BBPOM di Surakarta perlu menerapkan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis risiko. Perbaikan tidak hanya dilakukan setelah ditemukan permasalahan, tetapi juga diarahkan pada upaya antisipatif untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, keterlambatan, duplikasi proses, maupun risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi.

Perlunya evaluasi kinerja secara berkala dan berbasis data, dengan membandingkan capaian indikator kinerja terhadap target mampu meningkatkan pencapaian kinerja.

Sebagai langkah antisipatif, BBPOM di Surakarta juga mengembangkan pola pengelolaan kinerja dari pendekatan yang semula lebih banyak bersifat reaktif dan berbasis penyelesaian masalah menjadi preventif, prediktif, dan berbasis risiko. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan data historis dan tren pengawasan, penetapan serta evaluasi berkala terhadap perubahan lingkungan strategis. Balai POM di Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja.

Surakarta, 28 September 2026

Kepala Balai POM di Surakarta,

Taufiqurrohman, S.Si.,M.A.B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

1 INISIATIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasPermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.
Sesuai dengan nota dinas Inspektur utama Nomor B-PI.06.06.7.08.25.297 Tanggal 14 Agustus 2025, tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Surakarta sebesar 78,43 % . Capaian ini telah melampaui target hasil evaluasi PMPZI sebesar 76 %. Hal yang telah dilaksanakan dan perlu peningkatan secara berkelanjutan antara lain :

a. Balai POM di Surakarta telah menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, namun demikian perlu penajaman pada kriteria pemilihan ketua tim pada setiap area perubahan.
b. Monitoring terhadap renja yang telah dilaksanakan perlu perbaikan seperti melengkai timeline, justifikasi terhadap rencana kerja yang belum terlaksana.
c. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM dan telah terlibat secara aktif dalam penyusunan penetapan dan pemantauan kinerja serta pencapaian kinerja secara berkala termasuk kualitas pelayanan public
d. Telah dilakukan internalisasi Budaya PIKKIR dan Reformasi Birokrasi secara berkala melalui progam kerja AOC yang berdampak pada hasil survei berakhlak pada kategori cukup yaitu 60,6% dan berada dibawah rata-rata BPOM yaitu 64,7%.
e. Balai POM di Surakarta telah menyusun standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang telah dipublikasikan di subsite, media sosial dan ruang pelayanan.
f. Hasil Survei BPOM Surakarta untuk Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,91 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,94 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Dari nilai ini terus diupayakan peningkatan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dimana salah satu pelayanan terhadap pedampingan UMKM dalam mendapatkan izin edar melalui layanan media sosial Whatsapp khusus sertifikasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

g. Melakukan evaluasi atas seluruh SOP Mikro yang berlaku dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dalam bentuk penyederhanaan alur, timeline atau jabatan
h. Dokumen perencanaan dan monitoring kompetensi petugas pelayanan publik belum dipetakan berdasarkan jenis layanan yang diberikan Unit Kerja, untuk memastikan petugas pemberi layanan telah memenuhi kompetensi yang diperlukan
i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi teknologi dan informasi, disertai dengan analisis terhadap kendala atau hambatan dalam proses implementasinya.
j.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Dari catatan tersebut, menjadi perhatian pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai POM di Surakarta untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

2 Inovasi dalam Manajemen Kinerja
a. JARIK (Jumpa Asyik bincang Reformasi BiroKrasi)
Program JARIK yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk upgrade materi / sharing session / diskusi terkait Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali baik secara daring maupun luring. Dengan program JARIK diharapkan pemahaman RB pegawai Balai POM di Surakarta dapat meningkat dan tercapainya internalisasi budaya birokrasi BERAKHLAK.
b. TUMPENGAN (Tukar Motivasi dan PenyemaNGat antar AsN)
Tumpengan merupakan kegiatan tukar kado yang disisipi dengan kata-kata apresiasi dan motivasi antar ASN dimana nama pengirim akan dirahasiakan dan diacak tiap pemberian. Program ini akan dijalankan dua bulan sekali dengan tukar kado seharga minimal Rp.10.000 di tiap bulannya pada saat rapat progresif. Pada kado wajib diberi tulisan penyemangat agar meningkatkan nilai harmonis pada aspek BerAKHLAK pegawai BPOM di Surakarta.
c. MASKUMAMBANG (MASuKan yang membangun dan berkemBANG)
Untuk menunjang kebutuhan dalam menyalurkan aspirasi berupa motivasi, keinginan, ide, cita-cita, saran, dan kritik dari pegawai BPOM di Surakarta maka dibuatlah inovasi MASKUMAMBANG (Masukan Untuk Membangun dan Berkembang) sebagai platform penyaluran aspirasi yang dapat digunakan secara fisik maupun elektronik. Pengukuran keberhasilan program melalui jumlah masukan/saran yang ditindaklanjuti oleh organisasi/pimpinan setiap bulan. Melalui inovasi MASKUMAMBANG ini diharapkan mampu meningkatkan core value BerAKHLAK khususnya nilai kolaboratif bagi pegawai BPOM di Surakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

d. SOP MATAHARI (SOP Mudah diAkses, TersediA dan HArus teRkinI)
Program ini bertujuan untuk memastikan semua SOP telah direview, menggunakan versi terbaru, dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaksana tugas.
Tujuan:
-Kemudahan akses terhadap SOP
-Memastikan SOP yang diakses adalah SOP yang update dan terkini
-Meningkatkan implementasi SOP
Keberhasilan kegiatan diukur dari menurunnya temuan hasil audit internal terkait implementasi SOP Mikro. Dengan tercapainya tujuan kegiatan, diharapkan dapat meningkatkan nilai berAKHLAK Balai POM di Surakarta pada aspek Akuntabilitas.

e. MINA PADI (diseMINAsi PelAtihan dan DIskusi)
Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan informasi pegawai yang melakukan pelatihan dan usulan materi yang akan didiseminasikan. Pelaksanaan MINA PADI dilakukan secara langsung atau media lainnya dengan peserta menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Pelaksanaan MINA PADI dilaksanakan setelah apel nasional hari Senin minggu ke-4 setiap bulan. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulan.

f. Si PETRUK (Si PEgawai TeRlalU sering fleKsi)
Untuk mengatasi seringnya pegawai datang terlambat, lupa absen maupun pulang cepat program "Si Petruk" ini dibentuk di Balai POM di Surakarta. Dengan adanya program monitoring keterlambatan jam/ pulang sebelum waktunya, dapat mengurangi perilaku pegawai terlambat masuk kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan kebiasaan terlambat pegawai Balai POM di Surakarta serta menjadi sanksi bagi pegawai yang melanggar.

g. KRESNA (berKinerja, Rajin, berEtika, Smart, iNovatif dan proAktif)
KRESNA merupakan program pemilihan EoM (employee of Three Month) yang dilakukan oleh pimpinan dengan mempertimbangkan capaian kinerja, disiplin pegawai dan inovasi yang diberikan untuk mendukung kinerja organisasi. Pegawai yang terpilih menjadi pegawai KRESNA untuk periode 3 bulan (Januari – Maret, April – Juni, Juli – September dan Oktober – Desember). Pegawai yang terpilih, dapat terpilih kembali paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak pertama kali terpilih. Monitoring kegiatan dilakukan setiap 3 bulan sekali.

h. SILATURAHMI (SIap LApor rencana aksi Tindak lanjUt yang akuRAt dan Handal MelayanI)
Dalam rangka percepatan pelaporan yang akurat, perlu dilakukan pengingatan/reminding kepada semua personil Balai POM di Surakarta, yaitu mengingatkan secara manual setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk pengisian RAPK dan pengumpulan laporan evaluasi rapat bulanan dengan mengunggah laporan rapat progresif pada link yang dibagikan. Kemudian juga dilakukan pengingat utuk pengisian capaian kinerja triwulan pada tanggal 1 bulan April, Juli, Oktober dan Januari. Dengan pengingat ini diharapkan personil Pokja terkait bisa segera melakukan pengisian Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Monitoringnya. Pengukuran keberhasilan kegiatan melalui ketertiban pengisian RAPK maksimal setiap tanggal 5 dan pengumpulan bahan rapat progresif maksimal 1 hari sebelum rapat progresif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

i. Last Of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe)

Kendala dalam pelaporan SIPT yaitu keterlambatan dalam pelaporan karena beban kerja yang tinggi dan tidak adanya pengawasan dan evaluasi atas waktu pelaporan. Oleh karena itu, dengan adanya program Last Of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe) diharapkan pegawai UPT dapat melaporkan SIPT secara tertib sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Program Last Of US dilakukan setiap minggu ke empat dengan melakuan verifikasi hasil pengawasan sarana distribusi dan prooduksi di SIPTdengan membandingkan rekap pengawasan fungsi pemeriksaan mencatat timeline pelaporannnya ke pusat.

j. MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan)

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan Manajemen Risiko yaitu keterlambatan dalam pelaporan ke unit pusat. Diharapkan dengan adanya program MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan) pelaporan Manajemen Risiko dapat dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

k. SATU DAHSYAT (pelaku uSAha TUmbuh dan PenDAmpingan izin edar produk memenuHi SYAraT)

Inovasi SATU DAHSYAT dimunculkan untuk mengemas kegiatan – kegiatan BPOM di Surakarta yang dilakukan secara rutin maupun yang lainnya dalam rangka mendorong pelaku usaha obat dan makanan dapat tumbuh dan berproses sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku, sehingga obat dan makanan yang diproduksi adalah produk yang aman dan bermutu. Inovasi SATU DAHSYAT tidak hanya mewakili satu kegiatan, namun kegiatan rutin yang dilakukan semua fungsi sebagai bentuk pendampingan pelaku usaha obat dan makanan.

l. SIMERAK

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu melakukan usaha jemput bola yang memudahkan akses dan mendekatkan layanan ke lokus sarana pelaku usaha atau kediaman masyakarat. Salah satunya dengan menghadirkan petugas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Layanan SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak). SIMERAK adalah bentuk aplikasi tata pelaksanaan pemerintahan Balai POM di Surakarta yang selain mendekatkan, juga mempermudah pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan dalam satu tempat yang sama.

m. SREGEP

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dituntut untuk lebih mudah diakses, cepat, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat, dan kredibilitas instansi di mata masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Balai POM di Surakarta membuat inovasi, yaitu layanan Whatsapp yang responsif, gesit dan cepat (SREGEP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

3 PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL BAIK LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA



Penghargaan Arjuna Award (Apresiasi Kinerja Untuk Mitra KPPN Surakarta) sebagai Juara 2 Satker Dengan Implementasi KKP Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori UP Kecil



Penghargaan sebagai Unit Dengan Kinerja Sangat Baik Dalam Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

HIGHLIGHT 7

DAFTAR ISI 12

BAB I PENDAHULUAN 14

1.1. LATAR BELAKANG 14

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 15

1.3. STRUKTUR ORGANISASI 16

1.4. ISU STRATEGIS 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA 20

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 1

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 3

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 7

2.5. METODE PENGUKURAN 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 13

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 146

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 148

3.4 REALISASI ANGGARAN 148

BAB IV PENUTUP 153

4.1. KESIMPULAN 153

4.2. SARAN 157

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I.....159

LAMPIRAN II.....170

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia di pasar.

Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakarta masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perUndang - Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

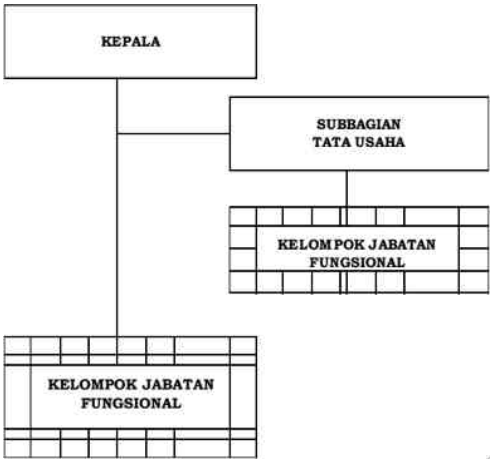
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja sesuai dengan amanah Inpres Nomor 3 Tahun 2017, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Surakarta harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan birokrasi pada BPOM tidak hanya dilaksanakan di Unit Organisasi pada BPOM pusat tetapi juga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Balai POM di Surakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu - isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal:

a. **Penguatan Regulasi Pengawasan**

   Adanya kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan fungsi serta kewenangan, selaras dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

b. **Optimalisasi Sistem Pengawasan**

   Diperlukan perbaikan pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, mencakup pemantauan pra-pasar, pasca-pasar, serta peningkatan tindakan terhadap pelanggaran, demi memastikan efektivitas pengawasan.

c. **Peningkatan Kompetensi SDM**

   Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keahlian pegawai Balai POM di Surakarta, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosiokultural, guna mengimbangi kompleksitas tantangan global, perkembangan teknologi, serta peningkatan standar internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Penguatan Struktur Kelembagaan

Kelembagaan Balai POM di Surakarta perlu diperkuat agar lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan mendukung pencapaian visi lembaga secara optimal.

e. Pengembangan Infrastruktur dan Laboratorium

Penyediaan kantor yang representatif, dilengkapi dengan sarana pelayanan publik yang optimal serta fasilitas laboratorium yang memadai, merupakan prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perluasan dan modernisasi fasilitas laboratorium juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi kualitas produk Obat dan Makanan..

Isu Eksternal:

a. Peningkatan Ekspektasi Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang aman dan berkualitas.

b. Pengawasan Perdagangan Digital

Maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui platform daring menimbulkan tantangan baru, sehingga pengawasan berbasis digital perlu diperkuat.

c. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Perubahan pola konsumsi, globalisasi, serta pertumbuhan sektor ekonomi memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih inovatif dan responsif.

d. Kepatuhan Pelaku Usaha

Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan aman perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

e. Pengawasan dalam Program MBG

Keikutsertaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instansi pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta memiliki peran strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks ini, Balai POM di Surakarta bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu, dan kandungan gizi bahan pangan serta produk makanan yang disediakan dalam program tersebut. Dukungan yang diberikan antara lain meliputi pengujian laboratorium dan edukasi kepada SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Makan Bergizi Gratis). Melalui keikutsertaan ini, Balai POM di Surakarta berkontribusi dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi yang aman untuk dikonsumsi oleh sasaran program, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Tantangan dalam menghadapi Isu strategis baik internal maupun eksternal antara lain adanya efisiensi anggaran Pemerintah seiring dengan kebijakan nasional mengenai penghematan dan efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintahan, Balai POM di Surakarta juga melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi anggaran dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

- Penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan hasil analisis risiko dan urgensi kebutuhan pengawasan, dan
- Optimalisasi sumber daya manusia dan sarana yang ada melalui penguatan kolaborasi lintas bidang dan lintas sektor.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Balai POM di Surakarta tetap berjalan efektif dan produktif, meskipun dalam keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Balai POM di Surakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas",** namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Obat dan Makanan.

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
   Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Obat dan Makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. **Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. **Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

   Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Obat serta Makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. **Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri Obat dan Makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. **Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Obat dan Makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. **Layanan Publik BPOM yang Prima**

   Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

7. **Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif**

   Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Rencana strategis Balai POM di Surakarta telah disusun berdasarkan analisis SWOT, guna memastikan bahwa kegiatan BPOM di Surakarta dapat merespons secara efektif kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, BPOM di Surakarta telah menetapkan sembilan sasaran strategis. Dalam pengukuran kinerja, sasaran-sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam 25 indikator kinerja utama, yang setiap indikatornya telah didukung oleh manual indikator yang lengkap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum dilakukan penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ ESO ke BPOM	-
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,2
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UOT	
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Faramasi dan pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	71,15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,73
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. PK berisikan indikator kinerja dengan ukuran tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2025- 2029 dan DIPA Balai POM di Surakarta Tahun anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 8.516.391.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Surakarta.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 %
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.33 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8 %
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektonik yang diawasi sesuai standar	80%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 %
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 Nilai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 %
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2025. Target pada RKT Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima Amanah (Kepala Balai POM di Surakarta). Dengan pemberi Amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menyusun laporan capaian kinerja, serta menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Surakarta senantiasa dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada triwulan berikutnya. Adapun dasar pemantauan triwulanan pada tahun 2025 merujuk pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	82.5	82.5	82.5	85,168,860
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				26	40,150,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	85	85	25,815,300
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	3,687,900
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	3,687,900
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	21,655,700
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	84	90.33	90.33	35,600,100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91	91	59,333,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	97,890,000
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91	91	58,734,000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4	84.4	8.88	88.8	21,655,700
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar			80	80	1,738,140
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				100	19,578,000
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium		11	12	14	1,052,599,000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapian Kabupaten/Kota Pangan Aman				20	3,687,900
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4	30	67	67	27,544,000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	86.94	86.94	86.94	119,135,000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan	15	75	95	5	171,565,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pembudayaan keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman	15	77	98	1	173,725,000
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	10	77	100	1	100,420,000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	40	94.38	14.81	29,919,000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	38	65	75	207,698,000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	50,455,000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				4.2	92,674,000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				76	1,801,827,400
		Nilai AKIP UPT BPOM				76	963,054,800
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	2,753,064,400
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.8	494,327,400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

$$\% \, \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \text{ x } 100\%$$

Capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	< 60%	●

Gambar 2. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja dari hasil perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah renstra dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode renstra) sebesar ≥ 100%.	▲

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode renstra) sebesar 70% - < 100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode renstra) sebesar <70% (x < 70)	

Gambar 3. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Jangka Menengah Renstra

Penanggung Jawab Tim Pengelola SAKIP Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt.	Kepala Balai POM di Surakarta	Pengarah
2.	Widya Krisnawati, S.M	Kasubbag Tata Usaha Balai POM di Surakarta	Koordinator

I. TIM PERENCANA KINERJA, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Ketua : Dyah Anggoro Asih, S.Farm., Apt.
Sekretaris : Irsan Saepul Zaman, A.Md
Anggota 1 : Rina Rahayu Diningsih, SF., Apt.
Anggota 2 : Yetti Setyaningrum, S.H
Anggota 3 : Doris Wahyu Megawati, S.Farm

II. TIM PELAPORAN KINERJA, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Ketua : Fajar Tri Kuncoro, A.Md
Sekretaris : Meindarta Teguh Sri Satya, A.Md.
Anggota 1 : Hilman Harsoni, A.Md
Anggota 2 : Chandra Wino Adhanunggar, SI.Kom

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Ketua : Asri Amalia Winarni, STP
Sekretaris 1 : Tri Harjani, S.Farm, Apt.
Sekretaris 2 : Erindra Pramesthi, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Penanggungjawab
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tri Harjani, S.Farm, Apt
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	Kukuh Bagus Nugroho, S.Farm, Apt
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Asri Amalia Winarni, STP
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Achid Wijayanto, S.Si
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dyah Ermawati, STP
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Yetti Setyaningrum, SH
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Retno Yusrini, STP
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Asri Amalia Winarni, STP
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Yuliana Purnaningsih, S.Farm, Apt
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desintha Ika Savitri, STP
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Husnul Khotimah, S.Si
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Purwadi, S.Farm
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Dyah Anggoro Asih, S.Farm, Apt
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Singgih Dwi Cahyo, S.Farm, Apt
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Annisa Nurul Anindita, S.Si.
16	Jumlah desa pangan aman	Singgih Dwi Cahyo, S.Farm, Apt
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Agatha Novita Ika Hayuningtyas, S.Farm, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Dyah Ermawati, STP
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Rina Rahayu Diningsih, S.Farm, Apt
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Suliyanto, SH, MH
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Murni Ernawati, S.Farm, Apt
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Widya Krisnawati, SM
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Widya Krisnawati, SM
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Widya Krisnawati, SM
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Diani Farmawati, S.Farm, Apt

IV. TIM REVIEW SAKIP

Ketua : Etik Romdiyah, S.Farm, Apt
Anggota 1 : Widya Krisnawati,SM
Anggota 2 : Yetti Setyaningrum, SH
Anggota 3 : Rina Rahayu Diningsih, S.Farm, Apt
Anggota 4 : Indah Nurdiana, S.Farm, Apt
Anggota 5 : Regina Devi Permatasari, STP
Anggota 6 : Dinar Yoggy Pindarto, S.T.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, perbandingan realisasi dan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024), perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029, perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara, analisis penyebab keberhasilan dan/atau peningkatan pencapaian kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Dasar pengukuran kinerja adalah Surat edaran dari Sekretaris Utama BPOM NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi pada Tahun tahun 2025 sebesar 93,34% dengan kriteria “Baik” dengan notifikasi  . Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi Tahun 2025.

Pada tahun 2025 dari 8 sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target 4 sasaran kegiatan dengan kategori “sangat baik”, 2 sasaran kegiatan dengan kategori “baik” dan 2 sasaran kegiatan dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kategori
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,75%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	105,03%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,13%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	Baik
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	120,00%	Tidak dapat disimpulkan
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108,89%	Sangat Baik
7.	Layanan Publik UPT yang prima	113,81%	Tidak dapat disimpulkan
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,89%	Baik

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 sasaran kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan pencapaian pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.50	85.20	103.27
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26	26,67	102,58
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	85	92.88	109,27

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
		yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103.53
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	96.69	107.04
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98.79	108.56
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	98.12	103.28
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99.15	108.96
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.80	98.11	110.48
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elekronik yang diawasi sesuai standar	80	81,60	102.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,27	105,27
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	14.32	102.29
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00	70,37	105.03
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	87.40	100.53
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	100.00
		Jumlah desa pangan aman	1	1	100.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81	14.81	100.00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	90.00	120,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108.89
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	4,78	113,81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	78,43	103,20
		Nilai AKIP UPT BPOM	76	75,69	99,59
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,80	2,71	96,79

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan kategori “Sangat Baik”, 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan kategori “Baik”, 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 (satu) Indikator tidak bisa dilakukan penilaian yaitu Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, karena Balai POM di Surakarta tidak menguji sampel KLB pada tahun 2025.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 1
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 15 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 8. Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	85,2%	103,27%	Sangat Baik

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
Mencakup penentuan kesimpulan:
1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta sebanyak 164 sampel dengan rincian 77 sampel obat, 2 sampel rokok, 31 sampel obat bahan alam, 1 sampel obat kuasi, 6 sampel suplemen kesehatan dan 47 sampel kosmetik. Capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah berhasil mencapai target yaitu 103,27 % dengan kategori **"Sangat Baik".**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 9 Perbandingan Realisasi serta Capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2024	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	82,50%	85,2%	103,27% 	Sangat Baik

Tahun 2024 belum terdapat pengukuran Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan target renstra tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% Capaian	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75%	85,2%	97,09% 	AKAN TERCAPAI

Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 **belum mencapai** target renstra 2029 dengan kategori **AKAN TERCAPAI**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mencapai dengan target renstra 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,67	85,20	99,58	86,36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel , Perbandingan Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Surakarta paling rendah dengan nilai 85,20% sedangkan realisasi tertinggi adalah dari Balai POM di Sofifi sebesar 99,58% sedangkan realisasi Balai POM di Mamuju sebesar 97,67% dan Balai POM di Payakumbuh realisasi sebesar 86,36%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Jumlah total sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Surakarta adalah 164 sampel. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

1) Koordinasi dengan unit pengampu terkait target dan perubahan target jika ada (berkaitan dengan adanya kebijakan pemblokiran dan relaksasi anggaran)
2) Melakukan koordinasi dengan Bidang Pengujian Balai Surakarta dan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling dan pengujian, parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir
3) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, pengujian dan pelaporan sampel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling tidak sesuai renlak Proses sampling dan pengujian tidak dilaporkan secara real time	-Selalu update renlak terkait jadwal sampling dan pengujian - Berkoordinasi dengan bidang lain dan balai penguji terkait hasil pengujian	-Selalu update renlak terkait jadwal sampling dan pengujian - Berkoordinasi dengan bidang lain dan balai penguji terkait hasil pengujian	2025	Y	O-05 O-16	Sampling tidak sesuai renlak Hasil uji yang dilaporkan oleh balai penguji lain tidak real time

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1) Koordinasi dengan unit pengampu mengenai penetapan target.
2) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling dan pengujian dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
3) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan bagian pengujian terkait parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, pengujian, pelaporan sampel.

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 12. Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26,00	26,67	102,58 	Sangat Baik

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Baru di Tahun 2025. IKU ini dilakukan dengan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. KIE farmakovigilans dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan *awareness* tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Cara perhitungan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%
Keterangan:
A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO yang dicapai oleh BPOM di Surakarta adalah 26,67% yang diperoleh dari sebanyak 12 sarana yang melaporkan KTD/ESO dari 45 sarana yang diberikan KIE Farmakovigilans.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sedangkan untuk persentase capaian untuk IKU ini adalah 102,58 dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 13. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	26,00	26,67	102,58

Persentase Failitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2025. Sehingga Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 14. Perbandingan Realisasi capaiankinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	30,00	26,67	91,97 	Akan tercapai

Persen Capaian Persentase Failitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO tahun 2025 jika dibandingkan dengan target renstra 2029 ialah 91,97 dengan kategori “akan tercapai”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah melaporkan KTD/ESOTahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	28,89%	26,67%	26,67%	28,89%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dan Payakumbuh dengan realisasi sebesar 28,89%. Kemudian Balai POM di Surakarta dan Sofifi dengan realisasi sebesar 26,67%..

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target Persentase Failitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO tahun 2025. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian, antara lain :

1) Melakukan *Follow Up* terkait pelaoran KTD/ESO ke sarana pelayanan kesehatan baik secara luring maupun daring.
2) Menjelaskan kembali jenis-jenis efek samping dan kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dilaporkan kepada sarana pelayanan Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Kendala dalam 1 tahun terakhir adalah terkait kepatuhan sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan pelaporan KTD/ESo yang diakibatkan : 1. Ketidakpahaman cara pelaporan KTD/ESO 2. Tidak mengetahui ESO apa saja (jenis) yang sering muncul yang dapat dilaporkan misal seperti ESO obat TB, HIV maupun alergi obat juga dapat dilaporkan	1. Kembali menyampaikan terkait tata cara pelaporan KTD/ESO saat KIE Farmakovigilans tahun 2026. 2. Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO secara langsung di sarana	1. KIE Farmakovigilans dilakukan pada bulan Mei Tahun 2026 dengan materi Farmakovigilans dan Tata Cara Pelaporannya 2. Monev pelaporan KTD ESO dilakukan bersamaan pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan sepanjang Tahun 2026.	2026	Y	O-02	Sarana yang telah diberikan KIE tidak melaporkan KTD/ESO

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Koordinasi dan pendampingan kepada sarana pelayanan Kesehatan dalam pelaporan KTD/ESO menjadi kunci yang menunjang keberhasilan pencapaian target tahun 2025. Balai POM di Surakarta selalu melakukan *follow up* kepada sarana pelayanan Kesehatan untuk membantu mengatasi kendala dalam pelaporan KTD/ESO, sehingga sarana pelayanan Kesehatan mudah untuk melakukan pelaporan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Direktorat Keamanan Mutu dan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM terkait dengan kendala sistem pelaporan KTD/ESO yaitu *website* e-meso.pom.go.id.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 16. Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	92,88%	109,27%	Sangat Baik

Yang dimaksud dengan Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

a. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
b. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
c. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
d. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
e. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel
Cara Perhitungan :
(A1 + A2) /2
A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya
Cara Perhitungan :
((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \text{ x } 100\%$$

Risk-based Sampling Pangan Olahan (PO) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PO. Hasil pengujian menjadi penentu kesimpulan akhir. Hasil dari evaluasi label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir.

Pada tahun 2025 dilakukan sampling pangan sebanyak 52 sampel. Realisasi yang didapatkan didukung oleh komponen Kesesuaian Target Sampel, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel, Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian dan Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya sehingga realisasi sebesar 92,88% dan capaian yang didapatkan sebesar 109,27% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 17. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	85%	92,88%	109,27%

Persentase Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 18. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00%	92,88%	104,36%	Tercapai/ Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dibandingkan dengan target renstra tahun 2029 sebesar 104,36% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,76%	92,88%	99,18%	91,39%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 99,18% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 98,76% , Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 92,88%. dan yang terendah adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 91,39%.

e. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja** Balai POM di Surakarta telah mencapai target Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja antara lain :

a. Melakukan perencanaan sampel pangan yang baik.
b. Inspektur mempunyai pengetahuan yang baik terkait pedoman sampling pangan sehingga terdapat kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling, kesesuaian hasil uji yang dilaporkan melalui SIPT, kesesuaian waktu pelaporan sampel sesuai dengan ketentuan dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
c. Koordinasi dengan Balai Penguji
d. Monitoring kegiatan sampling pangan olahan
e. Melakukan tindaklanjut terhadap sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum semua sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditindaklanjuti	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	2025	T	-	-

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam kegiatan ini sangat menunjang pelaksanaan pencapaian kinerja. Perencanaan dilakukan sesuai dengan prioritas sampling. Target yang diakan dicapai tetap dilakuakn monitor tiap bulan sehingga pelaksanaan kegiatan sampling dapat berjalan dengan lancar.
2. Selalu dilakukan koordinasi dengan Balai Besar POM Semarang. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja ini, kegiatan pengujian masih dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang. Sehingga perlu adanya koordinasi yang baik dalam pengawalan kegiatan pengujian sampel pangan ini.
3. Adanya dukungan anggaran sangat berkontribusi dalam pelaksanaan pencapaian indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pelaksanaan sampling, pembelian sampel dan pengiriman tetap bisa dilakukan karena adanya dukungan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 20. Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	-	-	-

Perhitungan Nilai Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A1, A2, \ldots., An) + (35\% \times B1, B2, \ldots., Bn) + (35\% \times C1, C2, \ldots., Cn)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Hasil capaian kinerja Tahun 2025 dengan hasil (-) dengan realisasi persentase sebesar (-) atau di – exclude dari nilai relisasi pencapaian. Secara keseluruhan, pada tahun 2025 tercapai hasil dengan kategori **(-)**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 21. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Sampel Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	100	-	-

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 22. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	-	-	-

Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	n/a	100	n/a

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pemenuhan Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025 di Balai POM di Surakarta memiliki realisasi sama dengan realisasi di BPOM di Payakumbuh yaitu *not applicable* (n/a), sedangkan Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Sofifi memiliki nilai realisasi 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta memiliki nilai pencapaian realisasi *not applicable pada* indikator kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar pada tahun 2025. Analisis penyebab pencapaian *not applicabe* di Balai POM di Surakarta, antara lain, antara lain :

1) Adanya kebijakan dari Tim Penanganan KLB Keracunan Pangan di tingkat Kabupaten/Kota yang masih memprioritaskan pengujian sampel pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) setempat yang sudah eksis, sehingga sampel tidak masuk ke laboratorium Balai POM di Surakarta;
2) Belum optimalnya keterlibatan penuh Balai POM di Surakarta dalam struktur formal Tim Penanganan KLB di beberapa wilayah Kabupaten/Kota, yang berdampak pada alur distribusi sampel pengujian yang belum diarahkan ke Balai POM di Surakarta;
3) Balai POM di Surakarta saat ini sedang melakukan penguatan kapasitas laboratorium secara intensif sejak tahun 2024. Hal ini meliputi pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personel, serta verifikasi metode analisis untuk memastikan kesiapan penuh dalam melayani pengujian KLB sesuai standar;
4) Balai POM di Surakarta sedang melakukan upaya pembangunan koordinasi yang lebih efektif dan strategis dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memposisikan Balai POM di Surakarta sebagai laboratorium rujukan atau pendamping dalam setiap kejadian KLB Keracunan Pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Informasi insiden atau kejadian dugaan keracunan makanan yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atauTim TGC Kabupaten / Kota ke BPOM di Surakarta masih terlambat	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait	1. Intens koordinasi dengan pihak DKK masing masing kabupaten dan kota 2. BPOM di Surakarta sudah mengusulkan keikutsertaannya di dalam Tim Gerak Cepat KLB-KB (Tim TGC KLB-KP) di Kabupaten Karanganyar pada saat dilakukan audiensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada Senin 22 September 2025. Saat ini masih dalam proses pengajuan BPOM Surakarta di dalam Surat Keputusan Tim TGC KLB-KP di Kabupaten Karanganyar	2025	Y	O-11	BPOM di Surakarta terlambat mendapat informasi KLB Pangan dari Tim KLB Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar sangat dipengaruhi oleh efektivitas program pengawasan dan respons cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB). Keberhasilan capaian didukung oleh pelaksanaan kegiatan surveilans keamanan pangan, koordinasi lintas sektor dalam investigasi KLB, serta kesiapan laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai metode dan standar yang berlaku. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, serta petugas puskesmas terkait tata cara pengambilan dan pengiriman sampel turut meningkatkan kualitas dan kelengkapan sampel yang diterima, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal. Secara keseluruhan, sinergi antara program surveilans, penguatan laboratorium, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh sampel KLB dapat diuji sesuai standar secara konsisten dan tepat waktu.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 24. Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53	Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F , dimana:

A= Kesesuaian target sampel PIRT

B = Kesesuaian Parameter Uji

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

E = Ketepatan waktu pelaporan

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Persentase sampel PIRT ini merupakan IKU baru dari UPT Balai POM di Surakarta. Memiliki komponen penilaian yang variatif yang akan mempengaruhi % capaian. Jumlah sampel PIRT Balai POM di Surakarta sebanyak 5 sampel dengan pembagian kategori pangan berdasarkan prioritas sampling adalah kategori pangan Tepung dan Hasil Olahannya sebanyak 2 (dua) sampel, Gula, Kembang Gula dan Cokelat sebanyak 1 (satu) sampel dan Minuman Serbuk dan Botanikal sebanyak 2 (dua) sampel.

Pada triwulan IV masih memilki % Capaian sama dengan triwulan III yaitu 105,53 % yaitu dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 25. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	85	88	103,53

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) baru, sehingga target dan realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 26. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	88,00	97,78	Akan Tercapai

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2026 dengan kriteria "Akan Tercapai".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90%	88%	100%	86,67%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 100% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 90%, kemudian Balai POM di Surakarta sebesar 88%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 86,67%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,53 % dengan kategori sangat baik, hal ini berdasarkan analisis bahwa petugas sampling telah melakukan perencanaaan atas sampel yang akan dilakukan sampling, dengan jumlah sampel yang sesuai dengan prioritas sampling 2025. Petugas memilih produk yang sesuai dengan kategori pangan dan memilih produk PIRT yang berisiko seperti mengandung pewarna, dan BTP lainnya. Pemilihan parameter sesuai dengan parameter prioritas sampling PIRT yang di tampilkan pada catatan SIPT. Pengambilan kesimpulan juga disesuaikan dari hasil kesimpulan laboratorium penguji. Meskipun untuk ketepatan waktu pelaporan dan pengambilan sampel ada ketidaksesuaian karena melebihi waktu tanggal 15 bulan berikutnya dan pengambilan sampel dilakukan pada triwulan sebelumnya, namun secara keseluruhan bahwa capaian kinerja sudah melampaui target triwulan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan sampling secara baik
2. Melakukan sampling pada triwulan I dan II sesuai kategori pangan yang telah direncanakan
3. Melakukan monitoring penentuan parameter, pengambilan kesimpulan, pelaporan dan pembuatan surat tindak lanjut jika hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat
4. Melakukan tindaklanjut atas hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tindaklanjut hasil uji TMS	Komunikasi tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan ke UPT BBPOM di Semarang terkait produk PIRT yang TMS	Monitoring terkait tindaklanjut dari hasil sampel PIRT yang TMS sudah ditindaklanjuti oleh BBPOM Semarang dan sudah ditindaklanjuti juga oleh Dinas Kesehatan Kab. Boyolali dengan melakukan pembinaan ke pelaku usaha IRTP	2025	T	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu pelaksanaan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga yang dilakukan secara terencana dan berbasis risiko. Kegiatan sampling PIRT dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pengawasan, sehingga produk yang memiliki potensi risiko dapat diidentifikasi secara tepat sasaran. Selain itu, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan instansi terkait sebagai pembina pelaku usaha PIRT, turut mempercepat proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Tindak lanjut dilakukan melalui pembinaan, edukasi keamanan pangan, rekomendasi perbaikan, serta tindakan administratif terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 28. Realisasi Persentase Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100	100	100	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder diperoleh dengan rumus:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Capaian dan Realisasi atas Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu **100%** atau dengan kategori **"Baik"** dengan rincian yaitu sebanyak 256 tindak lanjut yang dilaksanakan oleh stakeholder atas 256 keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan BPOM di Surakarta**.**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 29. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	92,90	96,90	104,31
2025	100	100	100

Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Stakeholder untuk Tahun 2024 sebesar 92,90% sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder wilayah Balai POM di Surakarta untuk Tahun 2024 sebesar 104,31% lebih besar dari capaian Tahun 2025 yaitu 100% dikarenakan secara target tahun 2025 sudah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024.

Pada tahun 2025, persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder wilayah Balai POM di Surakarta mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan konsistensi tindak lanjut stakeholder terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan. Dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 104,31% dari target 92,90%, capaian tahun 2025 secara persentase lebih rendah, namun target kinerja tahun 2025 telah meningkat menjadi 100%. Dengan meningkatnya target tersebut, capaian 100% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa target kinerja yang lebih tinggi dapat dipenuhi secara optimal.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 30. Perbandingan Realisasi capaiankinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100,00	100,00	100	Tercapai/Melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “Tercapai/Melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	99,17	100	96,09	88,18

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 100% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 99,17%, Balai POM di Sofifi dengan realisasi 96,09 dan yang terendah adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 88,18%.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja atau peningkatan kinerja

Penyebab keberhasilan di Tahun 2025 adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Balai POM di Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam rangka mengatasi rendahnya komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Balai Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Makanan di Surakarta menerbitkan surat pengingat kepada pelaku usaha yang telah mendekati batas waktu tindak lanjut agar segera menyampaikan CAPA. Selain itu, dilakukan Desk CAPA terhadap pelaku usaha yang CAPA-nya belum closed, yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kosmetik dan OBA di Hotel Alana Surakarta pada tanggal 26 s.d. 27 November 2025.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Feedback CAPA dari sarana distribusi dan saryanfar tidak disampaikan tepat waktu	- permintaan update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat	- update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke	- minggu ke II dan ke IV tiap bulan - minggu I Juni 2025 - minggu ke III September 2025 - tw IV Tahun 2025	Y	STR-06	Feedback CAPA dari sarana distribusi dan saryanfar tidak disampaikan tepat waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera atas kendala terdapat sarana yang belum menindaklanjuti CAPA mendekati timeline - Monitoring secara berkala feedback tindak lanjut dari pelaku usaha melalui Last of Us - Pengembangan menu last of us antara lain terkait dashboard pengawasan dan penambahan notifikasi warna untuk timeline	sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera - Monitoring secara berkala feedback tindak lanjut dari pelaku usaha melalui Last of Us - Telah dilaksanakan Desk CAPA Sarana Produksi OBA dan Kosmetik tanggal 26-27 November 2025 di Hotel Alana, Karanganyar - Pengembangan menu last of us antara lain terkait dashboard pengawasan dan penambahan notifikasi warna untuk timeline				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 100% didukung oleh komitmen dan kedisiplinan petugas dalam memastikan data tindak lanjut hasil pengawasan terisi secara lengkap dan tepat waktu pada aplikasi Last of Us.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 32. Realisasi Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang Memenuhi Syarat Tahun 2025

NAMA IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	90,33	96,69	107,04	Sangat Baik

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
   = (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi
= = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:

- regulasi perundang-undangan,
- petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi,
- pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam pada TW IV sebanyak sembilan sarana. Terhadap sarana produksi Kosmetika sebanyak delapan sarana telah terlaksana. Hasil pemeriksaan Kosmetik telah di laporkan melakui SIPT sesuai timeline yaitu 25 hari sejak tanggal pemeriksaan sebanyak 7 sarana, sedangkan satu sarana dilaporkan memlaui SIPT melebihi timeline. Hasil pemeriksaan Obat Bahan Alam terdapat satu sarana yang dilaporkan melalui SIPT melebihi timeline sehingga realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh hasil 95,49%

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 33. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	90,33	96,69	107,04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	94,33	96,69	102,50 	Tercapai/ melampaui

Realisasi dari indikator kinerta Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 yakni 96,69% dengan target Renstra 94,33% diperoleh capaian 102,50% yang artinya sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “Tercapai/Melampaui”. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	IKU DI EXCLUDE KAN (Tidak terdapat Sarana Produksi Sediaan Farmasi Tahun 2025)	96,69	100	95,83

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 100% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 96,69% kemudian Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 95,83. Balai POM di Mamuju tidak terdapat Sarana Produksi Sediaan Farmasi Tahun 2025 sehingga IKU di Exclude kan.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dapat sesuai dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	2025	T		-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, hal ini ditunjang oleh monitoring dan evaluasi pengawasan sarana produksi yang dilaksanakan secara terencana dan sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan.

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 35. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	98,79%	108,56%	Sangat Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- Ketepatan waktu tindak lanjut
- Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

   Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:

i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);

ii. Pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan

iii. Pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan pada 55 sarana produksi pangan dan didapatkan realisasi sebesar 98,79% sehingga didapatkan capaian sebesar 108,56% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 36. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	91	98,79%	108,56%

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Nama IKSK	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	98,79%	103,99% ▲	Tercapai /Melampaui

Capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan hasil sebesar 103,99% dengan kategori Tercapai / Melampaui. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,77	98,79	87,72	97,78

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 98,79% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 98,77% , Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 97,78% dan yang terendah adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 87,72%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta dapat mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja antara lain :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi yang baik.
2. Peningkatan pemahaman pengawas/inspektur terhadap pedoman / peraturan yang berlaku.
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi sesuai ketentuan, dengan melakukan pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tepat waktu, Penentuan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan penentuan grading hasil pemeriksaaan secara tepat.
4. Melakukan monitoring kegiatan pengawasan produksi pangan olahan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	2025	Y	O-13	Keterlambatan pelaporan melalui SIPT

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Adanya perencanaan yang matang dalam kegiatan ini sangat menunjang pelaksanaan pencapaian kinerja. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi point yang bisa menunjang ketercapaian indicator kinerja ini.
3. Kompetensi petugas dalam memahami dan peraturan yang ada sehingga pengambilan Kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat dan tindak lanjut yang dilakukan sesuai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Adanya dukungan anggaran juga berkontribusi dalam pelaksanaan pencapaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 39. Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti Tahun 2025

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95%	98,12%	103,28 %	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{A+B+C+D}{4}$$

Keterangan:

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

= Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa (A) / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa (B) X 100 %

Persentase Kesesuaian pelaporan SIPT sesuai timeline dihitung :

= Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu timeline (C)/ Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT (A)

Persentase kesesuaian Tindak Lanjut dihitung :

= Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT (D)

/ Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT ((A) X 100%

A. = {(A/B)*100+{(C/A+(D/A)}/2/2

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan= Rata-rata (a+b+c+d)

a. *Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA*

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. *Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA*

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. *Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA*

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. *Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA*

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah sarana yang diperiksa) x 100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C = Persentase Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan= Rata-rata (a+b+c+d)

a. *Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. *Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. *akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi sarana Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana Suplemen Kesehatan

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah sarana yang diperiksa) x 100 %

D = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a + b + c + d)/ 4

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

a. Persentase Pelaksanaan Inspeksi

pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ Jumlah target sesuai renlak) x 100 %

8. *Persentase Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat* Ketepatan waktu tindak lanjut = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

9. *Persentase Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi*

Kesesuaian tindak lanjut = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / Jumlah sarana yang selesai diperiksa X 100%

10. *Persentase Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana*

Ketepatan waktu tindak lanjut = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100 %

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer
4. Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sarana atau fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan . Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Untuk perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diawali dengan penetapan target sarana yang diperiksa berdasarkan kajian resiko dan ketentuan tindak lanjut serta pelaporan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, antara lain :

1. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
4. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Suplemen Kesehatan
5. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat,Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif menyebutkan kriteria penetapan tindak lanjut berupa pembinaan teknis maupun sanksi administrative (peringatan, peringatan keras hingga Penghentian Sementara Kegiatan). Untuk sarana distribusi obat pelaporan melalui SIPT termasuk penyampaian tindak lanjut maksimal pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian hingga Triwulan 4 tercapai 100 % sesuai target sejumlah 88 sarana. Pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 20 sarana meliputi 1 Pedagang Besar Farmasi (PBF), 1 Instalasi Farmasi Kota/ Kabupaten (IFK), 4 Puskesmas, 3 Rumah Sakit, 3 Klinik, 7 Apotek dan 1 Toko Obat Berijin (TOB).

Pada perhitungan kesesuaian tindak lanjut sarana distribusi obat dan saryanfar dari 88 sarana yang dilaporkan sesuai timeline adalah 76 sarana dan 12 sarana melewati batas waktu pelaporan SIPT yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya. Hal ini disebabkan antara lain pada awal tahun penetapan batas waktu pelaporan belum ditetapkan. Untuk monitoring dan evaluasi menggunakan inovasi Last of us.

Untuk kesesuaian laporan tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa telah ditetapkan bahwa jumlah total laporan tindak lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan tercapai 100 %

Untuk sarana Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan (SK), pada TW 4 telah di lakukan pemeriksaan sebanyak 7 sarana OBA , 6 sarana SK. Terdapat kelebihan capaian sarana SK sebanyak 1 sarana. Hasil pemeriksaan sarana OBA dan SK telah di laporkan melalui SIPT yaitu 25 hari sejak tanggal diperiksa. Terdapat 3 sarana yang dilaporkan tidak sesuai timeline

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana kosmetik pada Triwulan 4 sebanyak 9 sarana telah terlaksana dan telah diberi surat tindak lanjut berupa peringatan.Hasil pemeriksaan di laporkan melakui SIPT sesuai timeline yaitu 30 hari sejak tanggal pemeriksaan. Terdapat 2 sarana yang dilaporkan tidak sesuai timeline.

Capaian Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,28 % dengan kategori **"SANGAT BAIK"**.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 40. Perbandingan realisasi sera capaian Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya.

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	-	-	-	-
2025	95%	98,12%	103,28%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 41. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,25%	98,12%	99,88% 	AKAN TERCAPAI

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 akan mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “Akan Tercapai”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,12	99,24	100,81

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 100,81 % kemudian Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 99,24% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 98,12%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 93,25 %.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi disusun sesuai dengan analisis resiko dan di upayakan dapat terlaksana sesuai target.
2. Penyusunan surat tindak lanjut yang diterbitkan sesuai pedoman serta waktu penyampaian Tindak Lanjut sesuai pedoman dan disertai dengan kelengkapan dokumen bukri verifikasi oleh *Supervisor Independent* saat pelaporan SIPT.
3. Pelaporan melalui SIPT tepat waktu sesuai dengan Petunjuk teknis SIPT.
4. Melakukan Monitoring internal yang dapat diakses oleh petugas Pengawasa Farmasi dan Makanan dengan mudah serta penyusunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

matrik monitoring di awal tahun agar dapagt menyajikan data sesuai kebutuhan.

5. Kelengkapan data teknis pemeriksaan di arsipkan secara elektronik dan di lampirkan pada data monitoring internal untuk kemudahan mampu telusur pada saat diperlukan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	2025	Y	O-09	Keterlambatan pelaporan melalui SIPT

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pencapaian target IKSK Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditunjang oleh program pengawasan distribusi Sediaan Farmasi yang dilaksanakan secara terencana dengan mengacu pada pedoman teknis sesuai komoditi yang telah ditetapkan. Faktor lain yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah penyusunan perencanaan kegiatan berbasis resiko , monitoring dan evaluasi internal untuk membantu memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan definisi operasional serta metode perhitungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

indikator yang telah disepakati. Selain itu dengan pembinaan dan komunikasi yang intensif kepada pelaku usaha distribusi Sediaan Farmasi turut meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peredaran sediaan farmasi yang aman dan bermutu, sehingga tindak lanjut atas hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Dukungan pengelolaan pelaporan yang tertib serta koordinasi tim pengawas yang efektif juga memperkuat kualitas pelaksanaan pengawasan.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 43. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%	99,15%	108,96%	Sangat baik

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target sarana distribusi pangan yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana distribusi pangan mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan adalah tanggal 10 bulan selanjutnya.

Dari 47 sarana distribusi pangan yang direncanakan selama tahun 2025, diperiksa 47 sarana (100%). Dari 47 sarana distribusi pangan yang diperiksa, 35 sarana distribusi ada temuan produk kedaluwarsa dan/ rusak sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat peringatan, 9 sarana tidak ada temuan produk sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan 3 sarana distribusi ada temuan produk tanpa izin edar sehingga surat tidak lanjut yang terbit adalah surat peringatan keras. Dari 47 sarana distribusi yang diperiksa selama tahun 2025, 4 sarana terlambat input SIPT dan 43 sarana tepat waktu dalam input SIPT sehingga realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,15. Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108,95% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 44. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2025	91%	99,15%	108,96%

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 45. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,15	104,37	Tercapai/ melampaui

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “tercapai/ melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,75	99,15	92,73	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 100% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 99,15% kemudian Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 92,73. Dan yang terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 83,75%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1) Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan secara matang
2) Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3) Melakukan monitoring pelaporan data pemeriksaan sarana distribusi pangan melalui SIPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	2025	Y	O-10	Keterlambatan pelaporan hasil pengawasan distribusi pangan olahan melalui SIPT

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, hal ini ditunjang oleh program pengawasan distribusi pangan olahan yang dilaksanakan secara terencana dan sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga didukung oleh target kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang berjalan sesuai rencana kerja pengawasan, monitoring dan evaluasi internal membantu memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan definisi operasional serta metode perhitungan indikator yang telah disepakati serta pembinaan dan komunikasi kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan turut meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peredaran pangan yang aman dan bermutu, sehingga tindaklanjut atas hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Dukungan pengelolaan pelaporan yang tertib

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta koordinasi tim pengawas yang efektif juga memperkuat kualitas pelaksanaan pengawasan.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 47. Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80%	98,11%	110,48%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ \mathbf{x\ 100\%}$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}\ \mathbf{x\ 100\%}$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

– Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

– Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Persentase iklan sediaan farmasi yang diawasi meliputi komoditi obat, kosmetik, Obat Bahan Alam (OBA), Obat Kuasi (OK), dan Suplemen Kesehatan(SK), serta sediaan pangan olahan (MD dan PIRT).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target Pengawasan Iklan Obat mengacu kepada surat Target Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat 2025 yang dibagi berdasarkan media sebagai berikut : Media Cetak, Luar Ruang, Elektronik, Media Internet (platform ; instagram, facebook, youtube, tiktok website, media digital lain, dan fokus industry farmasi), dan media lokal (TV/radio, media cetak lokal dan media lokal lainnya). Target pengawasan iklan kosmetik mengacu pada Surat Edaran Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2025 yang dibagi berdasarkan media yang diawasi yakni sebagai berikut : Media Online (Tiktokshop,www.istyle.id, media sosial dan website) 70%, Media Elektronik (televisi nasional, media penyiaran lokal) 20%, Media Cetak 5%, dan Media Luar Ruang 5%. Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan mengacu pada Surat Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025 yang dibagi berdasarkan media sebagai berikut : E-commerce (Tiktok shop, www.mandjur.co.id) 25%, Website 10%, Media Sosial 20%, Lain-lain (berita online, pop ads, native ads dll) 5%, Media televisi nasional (RCTI, GTV) 15%, Media Penyiaran Lokal (TV lokal, radio lokal) 5%, Media lain-lain (media cetak, leaflet, media luar griya, dll) 20%. Target Pengawasan Iklan Pangan dibagi berdasarkan media yang diawasi yaitu : Media Cetak 12,5%, Media Luar Ruang 25%, Media Penyiaran 25% dan Media Online 37,5%.

Dari pelaksanaan pengawasan iklan selama tahun 2025, diperoleh realisasi capaian iklan obat 100%, iklan kosmetik 100%, iklan OBA OK 95,33%, iklan SK 95,24% dan iklan pangan olahan 100%. Berdasarkan capaian masing-masing komoditi tersebut diperoleh realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 diperoleh nilai 98,11. Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 110,48% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 48. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	88,80%	98,11%	110,48%

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 49. Perbandingan Realisasi capaiankinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,80	98,11	105,72	Tercapai/ melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “Tercapai/Melampaui”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,50	98,11	96	99,64

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 99,64% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 98,11%. Balai POM di Mamuju memiliki realisasi 97,50% dan realisasi terendah adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 96%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi dengan baik
2. Melakukan monitoring pengawasan iklan baik kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan pengawasan iklan
3. Telah dilakukan cut off pengawasan iklan sediaan farmasi pada hari kerja terakhir bulan berjalan dan tanggal 10 bulan berikutnya untuk sediaan pangan olahan secara konsisten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan target media pengawasan iklan tidak sesuai dengan media pengawasan yang telah ditetapkan	Melakukan revisi renlak target media pengawasan iklan	Melakukan revisi renlak target media pengawasan iklan pada TW 2	TW II 2025	Y	O-06	Pengawasan iklan OBA dan SK tidak sesuai dengan media yang ditetapkan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Keberhasilan ini ditunjang oleh pengawasan iklan yang dilaksanakan secara terencana dan sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan juga didukung oleh monitoring dan evaluasi internal guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan pengambilan keputusan dan timeline yang ditetapkan baik pada sediaan farmasi maupun pangan olahan. Disamping itu, wilayah pengawasan iklan Balai POM di Surakarta memungkinkan seluruh media iklan yang ditetapkan dapat diawasi dengan baik sehingga turut mendukung tercapainya target indikator kinerja ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 51. Capaian 1. Indeks Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80%	81,60%	102,00%	Sangat Baik

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi penandaan produk tembakau, termasuk rokok, sesuai amanat UU Kesehatan dan PP No. 109/2012 untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan (PHW), informasi kadar nikotin dan tar, serta informasi lainnya. BPOM melakukan pembinaan dan penindakan jika ada produsen yang tidak memenuhi ketentuan, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga rekomendasi penarikan produk atau pencabutan izin usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terdapat kesepakatan intern BPOM pada tahun 2025 dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau antara lain :

1. Indikator Kinerja Pengawasan Label Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tahun 2025-2029 di UPT BPOM adalah "Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar".
2. Indikator kinerja "Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar" tahun 2025-2029 akan masuk ke dalam Renstra BPOM 2025-2029 dan diturunkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) UPT BPOM.
3. Khusus untuk target kinerja tahun 2025 akan dilakukan revisi perjanjian UPT BPOM pada bulan Juli 2025 setelah Renstra BPOM ditetapkan.
4. Indikator Kinerja "Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar" memperhitungkan 2 (dua) aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawsan label.
5. Indikator Kinerja memperhitungkan aspek pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu pelaporan label.
6. Pelaporan dianggap tepat waktu apabila laporan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh Kepala UPT BPOM ke Operator Pusat (Badan POM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Definisi Operasional dari IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

a. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
b. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
c. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
d. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
e. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Cara perhitungan Capaian IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan = A+B/2

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:
(Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu / jumlah target label yang diawasi) x 100%

Keterangan:
- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Capaian tahun 2025 sebesar 81,60 % dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut dengan rincian dari target 144 label sampai dengan bulan Desember 2025, BPOM di Surakarta telah melakukan pengawasan sejumlah 144 label (100%) dengan 91 label (63,19 %) yang memenuhi ketepatan waktu.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024)

Tabel 52. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indeks Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	80	81,69	101,99

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 53. Perbandingan Realisasi serta capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84	81,69	97,14	Akan Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 belum mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “akan tercapai”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	86,46	81,60	90,28	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 100% kemudian Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 90,28% kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 86,46%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 81,60%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Terdapat beberapa hal yang menjadi kunci pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan antara lain :

1. Jenis potensial problem yang perlu diamati secara intensif
   - Rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait label produk tembakau dan/atau rokok elektronik
   - Masyarakat belum memahami pentingnya informasi yang tercantum dalam label produk rokok dan/atau rokok elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Unit/sektor yang menjadi sumber dari potensial problem

- Sektor usaha tembakau
- Masyarakat

3. Rencana penanggulangan/pencegahan

- Pelaporan penandaan label tembakau dan/atau rokok elektronik tepat waktu melalui SIPT.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam penilaian kesesuaian label tembakau dan/atau rokok elektronik
- Peningkatan koordinasi dengan BPOM terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

Indikator Kinerja "Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar" memperhitungkan 2 (dua) aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawsan label.

Dengan berjalannya beberapa program pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di atas Balai POM di Surakarta dapat mencapat nilai maturitas sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	Belum ada data sarana pengawasan label tembakau/ label rokok	Penyusunan data sarana pengawasan label tembakau/ rokok elektronik	TW IV 2025	T	-	Indikator Kinerja baru muncul di TW 3 Tahun 2025

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisa penyebab tercapainya target Presentase label produk tembakau di tahun 2025 disebabkan dilaksanakan program pelaporan penandaan label tembakau dan/atau rokok elektronik tepat waktu melalui SIPT, peningkatan kompetensi petugas dalam penilaian kesesuaian label tembakau dan/atau rokok elektronik dan peningkatan koordinasi dengan BPOM terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pemenuhan target pengawasan label produk tembakau.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 55. Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,27	105,27	Sangat Baik

Cara Perhitungan IKU Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di
wilayah UPT :

Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
   (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
   (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).
   (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).
   (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) adalah kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit untuk bertahan hidup atau berkembang meskipun telah diberikan antimikroba (antibiotik,antivirus, antijamur, maupun antiparasit) yang seharusnya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

Fakta berdasar data dari WHO adalah AMR salah satu ancaman Kesehatan masyarakat dan pembangunan global teratas. Diperkirakan AMR secara langsung bertanggung jawab terhadap 1,27 juta kematian global pada tahun 2019 dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian. Selain kematian dan kecatatan AMR juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Bank Dunia memperkirakan AMR dapat mengakibatkan peningkatan biaya perawatan Kesehatan sebesar US$ 1 Triliun pada tahun 2050 dan kerugian sebesar US$ 1 triliun dari Produk Domestic Bruto (PDB) per tahun pada Tahun 2030.

Badan POM sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan obat dan makanan tergabung dalam gugus tugas pengendalian AMR dan berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan Badan POM untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan.

Kebijakan tersebut mencakup ketentuan bahwa penyerahan obat golongan keras, termasuk antimikroba, harus berdasarkan resep dokter. Selain itu, BPOM juga telah menerbitkan pedoman khusus untuk penilaian khasiat dan keamanan obat antibakteri. Dalam hal pengawasan antimikroba, BPOM mengatur tindak lanjut hasil pengawasan antimikroba, termasuk temuan yang masuk dalam kategori mayor (sedang), yaitu temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan baik secara teknis maupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

administratif.

Menjalankan tugas utama dalam pengawasan obat termasuk antibiotik, Badan POM menghimpun data hasil pengawasan yang menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dibandingkan dengan jumlah seluruh apotek yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM cenderung tinggi yakni 79,53% di tahun 2021; 75,49% di tahun 2022; 70.75% di tahun 2023; dan 70.59% di tahun 2024. Dari berbagai penyebab timbulnya Resistensi Antimikroba, jalur distribusi obat memegang peran penting dalam meminimalisir terjadinya penurunan mutu, khasiat dan keamanan, serta penggunaan antimikroba yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam STRANAS Pengendalian Resistensi Antimikroba, BPOM dilibatkan dalam beberapa intervensi khususnya di intervensi 14 dimana target pada tahun 2029 adalah "Penjualan antibiotik tanpa resep berkurang 50% di masyarakat". Penetapan target sebesar ini didapatkan berdasarkan kajian terhadap hasil pengawasan oleh Badan POM. Harapannya dengan adanya indikator ini, maka dapat menekan penyerahan antibiotik yang tidak rasional di pelayanan kefarmasian dan mendukung nilai yang baik terhadap indeks konsumsi dan penggunaan (*antimicrobial consumption*/AMC) dan *antimicrobial use*/AMU) secara nasional. Dalam upaya mencapainya dalam lima tahun kedepan, perlu didukung secara nyata oleh sektor pemerintah lainnya yakni Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah serta tenaga kesehatan dan organisasi profesi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter Kementerian Kesehatan menerbitkan Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan 2025 - 2029 yang bertujuan untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran AMR serta mengurangi angka mortalitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan morbiditas. Badan POM sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan obat dan makanan tergabung dalam gugus tugas pengendalian AMR dan berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. Maksud penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai panduan bagi UPT Badan POM dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan upaya pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan kondisi di wilayah pengawasan masing-masing, maka diadakan Bimtek Pengendalian Anti Microbial Resistence (AMR).

Tujuan secara umum adalah agar pengendalian resistensi antimikroba dengan menekan jumlah penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara menyeluruh. Tujuan khusus adalah agar berbagai upaya di setiap wilayah di Indonesia untuk menertibkan penyerahan antibiotik harus berdasarkan resep dokter dengan mengintervensi beberapa aspek seperti ketepatan tools pengawasan, kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga peningkatan awareness dari masyarakat terkait bahaya resistensi antimikroba dan pencegahannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada Tahun 2025 kegiatan yang mendukung pemenuhan pengendalian AMR di Balai POM di Surakarta antara lain :

1. Penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik. Pemeriksaan dilakukan terhadap 30 sarana Apotek dengan hasil menunjukkan hasil 17 sarana (56,67 %) menyerahkan Antibiotik tanpa resep
2. Kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba pada 06 November 2025.
3. Kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dilakukan kepada 4 Kabupaten/ Kota meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen dengan output berupa Surat Permohonan Walikota/ Bupati terkait peredaran Antibiotik di daerah.
4. Kegiatan publikasi hasil pengawasan penyerahan Antibiotik di Apotek tanpa resep sebanyak 2x pada Triwulan 3 dan 4 melalui media soasial kepada masyarakat
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan tema AMR yang dilaksanakan sesara langsung atau tidak langsung sebagai upaya meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan penting nya penggunaan Antibiotik secara rutin setiap bulan melalui media soasial atau penyampaian informasi sebagai narasumber kegiatan Bimtek.
6. Join Inspeksi atau pemeriksaan bersama dengan lintas sektor untuk pengawasan antibiotik pada sektor hewan/ lingkungan yang juga menjadi salah satu penyumbang resistensi Antimikroba pada Bulan Desember 2025.

Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 sebesar 105,27 % dengan kategori **'SANGAT BAIK"**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 56. Perbandingan realisasi sera capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan tahun sebelumnya.

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2024	-	-	-	-
2025	100	105,27	105,27	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 57. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,27	105,27	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "TERCAPAI/MELAMPAUI".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	105,59	105,27	104,15	105,63

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

realisasi sebesar 105,63n% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 105,27 % kemudian Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 104,15 %. Dan yang terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 102,59 %.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dapat terlepas dari upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Menyusun POA (*Plan of Action*) kegiatan sesuai dengan Petunjuk teknis pengendalian AMR dari Deputi 1
2. Perkuatan koordinasi melalui Advokasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten karanganyar dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba sebagai upaya menjalin kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder pemerintah daerah dalam mengendalikan resistensi antimikroba demi mencapai komitmen dari pemerintah daerah maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian AMR
3. Perencanaan Bimbingan teknis (bimtek) terkait pengendalian resistensi antimikroba yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesadaran terhadap resistensi antimikroba.
4. Melakukan publikasi sesuai timeline dengan penyampaian informasi hasil pengawasan pemeriksaan fasilitas pelayanan apotek di wilayah pengawasan UPT melalui media social.
5. Penyampaian Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) dengan tema Antibiotik secara rutin.
6. *Join Inspeksi/* pemeriksaan bersama dengan lintas sector dengan kegiatan pengawasan end user peternakan ayam dan poultry di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan petugas Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Karanganyar.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat pengendalian AMR belum memadai	Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pengendalian AMR	1. Dilkukan bimtek kepada pelaku usaha khusus nya Apotek dengan tema pengendalian AMR 2. Melakukan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial Balai POM di Surakarta	TW IV 2025	Y		Pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat pengendalian AMR belum memadai sehingga pengendalian AMR belum optimal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada IKU Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT adalah penyusunan rencana kegiatan sesuai pada Petunjuk Tekis Peta Jalan AMR Badan POM tahun 2025. Dari perencanaan yang telah disusun, kemudian dilaksanakan kegiatan dengan prinsip efektif dan efisien. Selain itu koordinasi lintas sektor untuk mendorong penerbitan Surat Edaran pengendalian AMR terus dilakukan sehingga mencapai hasil yang diharapkan dan pelaporan kegiatan yang mendukung pengendalian AMR dilakukan tepat waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 59. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	14,32	102,29	Sangat baik

Perhitungan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut :

(75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Hasil capaian kinerja Tahun 2025 dengan hasil 14,32 dengan realisasi persentase sebesar 102,29 %. Secara keseluruhan, pada tahun 2025 tercapai hasil dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 60. Perbandingan Realisasi serta Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	40	43,98	109,95
2025	14	14,32	102, 29

Realisasi dan Target nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya perbedaan definisi operasional indikator serta metode perhitungan yang digunakan pada masing-masing tahun. Perubahan tersebut berdampak pada dasar pengukuran, ruang lingkup penilaian, dan formula perhitungan capaian, sehingga hasil realisasi dan persentase capaian tahun 2025 tidak berada pada basis yang sama dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 61. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	25	14,32	102,29	Tercapai/ melampaui

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2026 dengan kriteria “tercapai/melampaui”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	105,96	102,29	100,18	107,33

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 107,33 % kemudian Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 105,96 %, disusul Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 102,29 dan yang terendah adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 100,18 %.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, antara lain :

4) Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang terkait pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan.
5) Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium.
6) Pengembangan kompetensi ke BBPOM di Semarang terkait pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7) Pelaksanaan uji profisiensi NaCl pada garam beriodium untuk pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium.
8) Melaksanakan verifikasi metode pengujian obat Metampyron, Meloksicam, Asetosal dan verifikasi metode pengujian mikrobiologi seperti ALT pada pangan, deteksi *staphylococcus aureus* pada kosmetik.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Capaian nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian BPOM di Surakarta belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan berdasarkan Standar Kemampuan Laboratorium.	Melakukan optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium guna memastikan ketersediaan sarana pengujian, serta melaksanakan verifikasi metode pengujian kimia dan mikrobiologi secara terencana dan terdokumentasi.	Melakukan optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium guna memastikan ketersediaan sarana pengujian secara tepat waktu dan melakukan verifikasi metode	TW IV 2025	Y	SDM-08	Kompetensi pengujian laboratorium belum memenuhi standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan, meliputi penguatan ruang lingkup pengujian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem mutu laboratorium.

Dari aspek peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan pelatihan teknis terkait metode analisis terbaru, supervisi internal, serta kegiatan *Coaching, Mentoring, dan Counseling (*CMC*)* dan *sharing knowledge* antar-analis berkontribusi dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel laboratorium. Kegiatan tersebut mendukung terjadinya transfer pengetahuan secara berkesinambungan, khususnya dalam merespons perkembangan metode analisis dan kebutuhan pengujian.

Dari aspek sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan peralatan dan sumber daya pengujian dilakukan melalui perencanaan pengadaan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang lingkup pengujian, tingkat urgensi, serta ketersediaan anggaran. Pendekatan tersebut memungkinkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang bersifat kritis tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, verifikasi metode analisis dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan kesesuaian metode terhadap parameter pengujian yang dikembangkan maupun diperluas. Pelaksanaan verifikasi sesuai dengan persyaratan sistem mutu laboratorium mendukung peningkatan pemenuhan komponen metode yang terverifikasi serta memperkuat keandalan hasil pengujian. Secara keseluruhan, sinergi antara perluasan ruang lingkup pengujian berbasis risiko, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas, serta penguatan sistem mutu laboratorium telah mendukung peningkatan kemampuan laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 63. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025

Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100	Baik

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman diperoleh dengan Cara Perhitungan :

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman dibagi Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT dikali 100%

Adapun jumlah Kab/kota yang didampingi berjumlah 1 (satu) yaitu Kabupaten Wonogiri, sedangkan di wilayah Balai POM di Surakarta terdapat 5 (lima) Kab/Kota.

Pemenuhan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman yaitu :

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
   a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
   b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
   a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
   b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

1. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
2. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
3. Jumlah target dihitung secara kumulatif
4. Formula Perhitungan :

$$\frac{\textit{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\textit{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \; X \; 100\%$$

b. Perbandingan realisasi serat capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya (2024)

Tabel 64. Perbandingan realisasi serta capaian Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	20	20	100

Pada Tahun 2024, tidak ada realisasi karena merupakan Indikator kinerja baru di tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 65. Perbandingan realisasi capaian Kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025–2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	20	20 	Perlu Upaya keras

Realisasi Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sudah mencapai target untuk tahun 2025 dengan capaian 100% (capaian realisasi terpenuhi sesuai terget). Meskipun jika melihat tabel tersebut dengan kategori " Perlu upaya keras" untuk mencapai target 100% di tahun 2009, hal tersebut akan dapat tercapai karena Target dihitung secara kumulatif dan meningkat setiap tahun dengan melakukan pendampingan sejumlah 1 (satu) kab/kota pada setiap tahunnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	20	12,5	14,29

Berdasarkan data tabel diatas sebenarnya Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten/Kota Pangan Aman di masing-masing UPT telah tercapai 100% karena realisasi disetiap UPT sama dengan target yang ditetapkan di UPT tersebut. Hal tersebut terjadi karena jumlah kab/kota yang masuk dalam *cathment area* berbeda-beda disetiap UPT.

Balai POM Mamuju, Balai POM Surakarta, Balai POM Sofifi dan Balai POM Payakumbuh telah melaksanakan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota dalam pencapaian Kabupaten/Kota Aman dengan baik (100%).

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan dilakukan upaya secara terus menerus oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Merencanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk teknis Petunjuk Teknis Kegiatan Pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025 Dari Deputi 3
2. Perkuatan koordinasi melalui Advokasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sebagai upaya menjalin kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder pemerintah daerah serta pemenuhan komitmen dari pemerintah daerah dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
3. Pengawalan dilakukan kepada Kabupaten/Kota yang terpilih untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang sudah berjalan tetap dilakukan sesuai dengan standar, kebijakan, dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Persentase Kabupaten /Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten /Kota Pangan Aman	Tidak ada kendala	-	Melakukan pendampingan Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan meliputi : 1. advokasi 2. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dengan dilengkapi data dukung 3. Membuat laporan pendampingan dan laporan akhir	TH 2026	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Program Perencanaan Berbasis Standar Pedoman Teknis (Juknis Deputi 3 Tahun 2025)

   Program perencanaan dirancang untuk memastikan seluruh rangkaian pendampingan berjalan *comply* terhadap regulasi pusat, dengan melakukan penyusunan Timeline, penetapan Indikator & Parameter Penilaian serta menjaga konsistensi kualitas pendampingan terhadap kabupaten yang dipilih.

2. Program Advokasi dan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor.

   Kegiatan ini difokuskan pada penggalangan komitmen dari Pemerintah Daerah setempat, dengan mengadakan advokasi dan pertemuan lintas dinas (Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan, Bappeda) untuk menyelaraskan persepsi mengenai urgensi Program Pangan Aman. Meningkatkan *sense of ownership* (rasa memiliki) Pemerintah Daerah, sehingga intervensi keamanan pangan tidak hanya bergantung pada BPOM, melainkan menjadi program prioritas daerah.

3. Program Pengawalan dan Monitoring

   Melakukan pendampingan teknis secara berkala di Kabupaten/Kota terpilih guna memantau implementasi program serta mengawal setiap tahapan penilaian agar memenuhi standar dan indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

1. Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 67. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	70,37	105,03	Sangat baik

Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana produksi pangan fortifikasi mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi adalah tanggal 15 bulan selanjutnya.

Dari 18 sarana produksi pangan Fortifikasi yang direncanakan selama tahun 2025, diperiksa 19 sarana (105,03%). Dari 19 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa, 1 sarana memperoleh nilai pemeriksaan A (Sangat Baik), 9 sarana memperoleh nilai pemeriksaan B (Baik), 7 sarana memperoleh nilai pemeriksaan C (Kurang), 2 sarana tutup (tanpa melaporkan ke Balai POM Surakarta) dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah 10 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, 7 surat peringatan dan sudah dilaporkan ke Pusat melalui SIPT sehingga realisasi Persentase sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 70,37. Capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 105,03% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 68. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	67	70,37	105,03

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 69. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	70,37	105,03	Tercapai/ melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "tercapai/ melampaui".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	70,37	IKU DI EXCLUDE KAN (Tidak terdapat Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Tahun 2025)	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 100% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 70,37% kemudian Balai POM di Sofifi tidak ada realisasi persentase sarana produksi pangan fortifikasi karena IKU DI EXCLUDE kan (Tidak terdapat Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Tahun 2025). Untuk target pemeriksaan sarana fortifikasi Balai POM di Mamuju dan Balai POM Sofifi tahun 2025 adalah sebanyak 1 sarana produksi pangan fortifikasi sedangkan untuk Balai POM di Surakarta adalah 18 sarana produksi pangan fortifikasi.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1) Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi secara matang
2) Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3) Melakukan monitoring pelaporan data pemeriksaan sarana distribusi pangan melalui SIPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Data sarana fortifikasi belum update	Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026	Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026	2025	Y	O-21	Data base status keaktifan sarana produksi fortifikasi yang dijadikan dasar penentuan target tidak update

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, hal ini ditunjang oleh program pengawasan produksi Pangan Fortifikasi yang dilaksanakan secara terencana dan sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Selain itu, keberhasilan pencapaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga didukung oleh target kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang berjalan sesuai rencana kerja pengawasan, monitoring dan evaluasi internal membantu memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan definisi operasional serta metode perhitungan indikator yang telah disepakati serta pembinaan dan komunikasi kepada pelaku usaha produksi Pangan Fortifikasi turut meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peredaran pangan yang aman dan bermutu, sehingga tindak lanjut atas hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Dukungan pengelolaan pelaporan yang tertib serta koordinasi tim pengawas yang efektif juga memperkuat kualitas pelaksanaan pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 3
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Surakarta berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman, dan manfaat KIE. Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat (KIE Langsung/Tatap Muka) maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang (KIE Media). Pada tahun 2025 ini, kuesioner terdiri dari kuesioner KIE Langsung dan Kuesioner KIE Media dengan butir pertanyaan yang berbeda. Indeks Efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data yang diperoleh rata-rata Survei Efektivitas KIE Langsung dan Media yang diisi oleh responden ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Tabel 71. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,94	87,4	100,53	**SANGAT BAIK**

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

1) Sumber atau Narasumber KIE.
2) Konten atau Informasi KIE.
3) Pemahaman Audiens KIE.
4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE/peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan oleh Balai POM di Surakarta untuk pengisian kuesioner KIE langsung dan responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir untuk pengisian kuesioner KIE media.

Balai POM di Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 terhadap 117 responden KIE Langsung dan 117 responden KIE Media sehingga menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 87,4 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,53% atau kategori **"SANGAT BAIK"**.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya (2024)

Tabel 72. Perbandingan Realisasi serta Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	96,00	96,60	100,63
2025	86,94	87,4	100,53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data pada tabel di atas, target dan realisasi tingkat efektivitas KIE tahun 2024 dan 2025 menurun karena adanya perbedaan kuesioner yang digunakan dan teknik/cara perhitungannya. Namun, capaian kedua tahun tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian **"SANGAT BAIK"**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025—2029

Tabel 73. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,42	87,4	96,66 	AKAN TERCAPAI

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 belum mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "akan tercapai". Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas KIE serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target pada tahun 2029 nanti.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87,4	86,46	91,31	87,23

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 91,31 disusul oleh Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 87,4. UPT dengan realisasi terendah adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 86,46.

e. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Berdasarkan hasil survei tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025, diperoleh indeks sebesar 87,4 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik.** Indeks 87,4 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu:

Tabel 75. Rincian Kontribusi Aspek dalam Survei Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025

KIE Langsung		KIE Media	
Aspek	**Indeks/Nilai**	**Aspek**	**Indeks/Nilai**
Narasumber/Petugas	87,45	Sumber Informasi	86,43
Konten/Informasi	87,82	Konten/Informasi	89,17
Pemahaman Audiens	88,25	Pemahaman Audiens	88,35
Manfaat	86,97	Manfaat	84,72

Aspek pemahaman audiens dan konten/informasi merupakan 2 aspek yang memberikan nilai tinggi dari survei efektivitas KIE Langsung dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KIE Media yang pembentuk indeks efektivitas KIE. Sedangkan, aspek manfaat memberikan nilai terendah sehingga kedepannya dalam melaksanakan KIE, Balai POM di Surakarta perlu mengupayakan peningkatan aspek manfaat dengan memilih topik dan menyusun konten disesuaikan dengan kebutuhan audiens.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Keterbatasan anggaran KIE	1. KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Pengalihan target publikasi menjadi via media whatsapp blast pada bulan	1. Akan dilaksanakan KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. Akan dilaksanakan KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Akan dilaksanakan tiga target publikasi yang	TW IV 2025	Y	SDM-01	Audiens tidak memahami materi KIE yang diterima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Desember 2025	belum tercapai dialihkan ke publikasi media whatsapp blast pada bulan Desember 2025				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 sebesar 87,4 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE Langsung (87,62) dan KIE Media (87,17). Kontribusi terbesar dalam memberikan nilai efektivitas KIE tahun 2025 adalah penyuluhan (KIE Langsung) dan media sosial-instagram (KIE Media). Oleh karena itu, Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan kualitas KIE penyuluhan dan media sosial Instagram. Namun, juga perlu adanya sebaran KIE pada media dan teknik yang lebih beragam agar KIE yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak lagi audiensnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 76. Realisasi Persentase Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5	5	100	Baik

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan). Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 5 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jananan Anak Usia Sekolah (PJAS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan , Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan , Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Pengawalan Sekolah yang sudah Diintervensi Keamanan Pangan.

Karena adanya efisiensi anggaran (pemblokiran anggaran), jumlah sekolah yang mendapatkan full intervensi sampai dengan Triwulan III sebanyak 3 sekolah, yaitu SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri. Hal ini dikarenakan anggaran Tahun 2025 hanya cukup untuk 3 sekolah dari total 5 sekolah berdasarkan target renstra 2025--2029. Seluruh tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan untuk 3 sekolah tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Namun, berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. OT.02.02.5.09.25.202 tanggal 15 September 2025 perihal Hasil Monev Program Germas Sapa Kuartal II Tahun 2025 pada bulan September 2025, Balai POM di Surakarta akan memenuhi kekurangan target sebanyak 2 sekolah pada Triwulan IV Tahun 2025, yaitu MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri.

Hingga akhir tahun 2025, progres program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan adalah:

1) Koordinasi program PJAS dengan Bapperida Kabupaten Wonogiri, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 dan 05 Februari 2025 (5%).
2) Persiapan Advokasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).

3) Persiapan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).
4) Pelaksanaan advokasi program keterpaduan keamanan pangan pada 15 April 2025 (15%).
5) Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan pada 29 April 2025 (10%).
6) Persiapan pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (5%).
7) Pelaporan pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan (5%).
8) Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada 22 Mei 2025 (15%).
9) Laporan Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah telah selesai disusun serta diupload di linktr.ee/PJAS2025 dan aplikasi siapsapa.pom.go.id pada 17 Juni 2025 (5%).
10) Pendampingan kader dalam melaksanakan intervensi keamanan pangan di komunitas sekolah dilakukan melalui Whatsapp Group (5%).
11) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan pada 24 Juli 2025 (MTsN 1 Wonogiri), 30 Juli 2025 (SDN 7 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri), 19 November 2025 (MTsN 3 Wonogiri), dan 20 November 2025 (MIN 2 Wonogiri) (15%).
12) Pelaporan kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (5%).
13) Pengawalan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024 (5%).

Sehingga diperoleh progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100% dengan capaian 100% dan kategori “BAIK”. Seluruh sekolah target intervensi tahun 2025 sebanyak lima sekolah berhasil mendapatkan sertifikat penghargaan sekolah yang memiliki komitmen baik untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengimplementasikan program keamanan pangan berupa Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 77. Perbandingan Realisasi serta Capaian Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	8	8	100.00
2025	5	5	100.00

Capaian realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Balai POM di Surakarta tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 100.00% dengan kriteria Tercapai. Capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029.

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	5	62,50	Perlu Upaya Keras

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026 belum mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “Perlu Upaya Keras”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	5	8	4

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Sofifi dengan realisasi 8 sekolah, Balai POM di Surakarta dengan realisasi 5 sekolah dan terakhir Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi 4 sekolah. Seluruh UPT dapat memenuhi target yang diberikan oleh pusat.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 dengan kategori “BAIK”. Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 dilakukan di Kabupaten Wonogiri yang merupakan lokus kegiatan Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 oleh Balai POM di Surakarta. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Balai POM di Surakarta telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas yang ada di masing-masing sekolah sehingga mampu terbentuk komunitas sekolah yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu di lingkungan sekolah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keberhasilan program didukung oleh koordinasi yang baik antara Balai POM di Surakarta dengan OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Wonogiri, sehingga tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, keberhasilan juga didukung komunikasi yang efektif dengan Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam melaksanakan pemberdayaan di lingkungan sekolah masing-masng. Pada tahap akhir program, dilakukan kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terhadap lima sekolah target intervensi tahun 2025. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Seluruh sekolah target intervensi tahun 2025 berhasil mendapatkan sertifikat penghargaan berupa Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. Diharapkan sekolah yang diintervensi dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Dengan demikian penerima manfaat dari program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan akan semakin luas dan berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala	1. Pengawalan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024. 2. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri) untuk pemenuhan target sekolah sesuai target renstra 2025--2029.	1. Pengawalan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024. 2. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri).	TW IV 2025	Y	STR-01	Pelaksanan tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang dicapai pada tahun 2025 ini didukung oleh kegiatan Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Kegiatan tersebut menjadi faktor yang paling mendukung karena berperan sebagai kunci keberlanjutan pengawasan harian tanpa bergantung pada kedatangan petugas Balai POM di Surakarta, sekaligus menjadi inti dari proses "pembudayaan" yang mengubah perilaku dan pola pikir komunitas sekolah. Melalui efek pengali (*multiplier effect*), kader yang terdiri dari guru mampu mengedukasi seluruh warga sekolah (guru, siswa, dan pengelola kantin) secara mandiri, sehingga standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten dan menjadi syarat utama ketercapaian indikator program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 80. Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	**BAIK**

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan oleh Balai POM di Surakarta di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 desa, 1 pasar dan 5 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas-komunitas yang ada di masing masing desa, pasar, dan sekolah sampai akhirnya terbentuk komunitas mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pengelola pasar, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.

Tahapan selanjutnya adalah pelatihan/bimbingan teknis kader desa, sekolah, dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Balai POM di Surakarta. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari Program Keterpaduan Keamanan Pangan.

Setelah semua tahapan di atas selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip keamanan pangan. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Hal yang sangat diharapkan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika pemerintah daerah berkomitmen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mereplikasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan ini ke desa, pasar atau sekolah yang lain.

Kriteria desa yang diintervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

9) Kepala Desa/Lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
10) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan antara lain Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa.
11) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), terutama di bidang pangan.
12) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata.
13) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal.
14) Mempunyai potensi sumber daya pangan lokal.
15) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait kasus stunting, penyakit akibat pangan (*food borne diseases*), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
16) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan program "Keamanan Pangan Desa" yang akan dilaksanakan, antara lain Rumah Desa Sehat, Pekarangan Pangan Lestari, Kampanye Destinasi Wisata, Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal.
17) Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM.

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri serta hasil survei, kajian potensi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan kondisi desa oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan desa intervensi tahun 2025 adalah Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terdapat penyesuaian tahapan program Desa Pangan Aman mengacu Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025 dan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025 tentang Perubahan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025. Adapun tahapan program Desa Pangan Aman di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 menjadi:

Tabel 81. Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2025 Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

No.	Tahapan Kegiatan	Bobot	*Timeline*
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari—April 2025
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	Maret—April 2025 atau Juli—Agustus 2025
3.	Bimtek Komunitas	20%	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025
4.	Fasilitasi Keamanan Pangan	-	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025 (dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia)
5.	Pengawasan Keamanan Pangan	-	Tidak dilakukan dan tidak ada pengadaan *rapid test kit*
6.	Monitoring dan Evaluasi	20%	Juli atau November 2025
7.	Pengawalan	10%	Februari—November 2025

Hingga akhir tahun 2025, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah:

1) Inventarisasi pengadaan dan persiapan koordinasi pada Januari 2025 (2%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Pelaksanaan koordinasi dan survei desa pada 4 dan 27 Februari 2025 (3%).
3) Pengadaan perlengkapan peserta dan persiapan advokasi pada Maret 2025 (5%).
4) Persiapan pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan pada Maret 2025 (5%).
5) Pelaksanaan advokasi kelembagaan desa pada April 2025 (10%).
6) Pelaporan pelaksanaan advokasi kelembagaan desa pada Mei 2025 (5%).
7) Pelaksanaan Pelatihan KKPD pada April 2025 (15%).
8) Pelaporan pelaksanaan pelatihan KKPD pada Mei 2025 (5%).
9) Persiapan pelaksanaan bimtek komunitas pada Mei 2025 (5%).
10) Pelaksanaan bimkom pada Juni 2025 (15%)
11) Persiapan monev program pada Juni 2025 (5%)
12) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara daring pada April 2025 (2%).
13) Pelaksanaan monev program pada Juli 2025 (15%).
14) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara luring pada Agustus 2025 (4%).
15) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara daring pada September 2025 (2%).
16) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara daring pada Oktober 2025 (2%).

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 1 desa dengan capaian 100% dan kategori **"BAIK".**

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya (2024)

Tabel 82. Perbandingan Realisasi serta Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	1	1	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2025	1	1	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 dan 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 desa. Capaian kedua tahun tersebut adalah 100% atau **"BAIK"**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025—2029

Tabel 83. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	3	1	33,33	PERLU UPAYA KERAS

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 belum mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "perlu upaya keras". Target ini tidak bersifat akumulatif sehingga perlu adanya dukungan berupa penambahan anggaran dan sumber daya manusia agar target 3 desa di tahun 2029 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Jumlah Desa Pangan Aman	1	3	3	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Mamuju karena kedua UPT tersebut telah terlebih dahulu berstatus Balai POM dan telah mendapatkan target IKU Jumlah Desa Pangan Aman sebelumnya. Sedangkan Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Payakumbuh adalah UPT yang baru naik klasifikasinya dari Loka POM menjadi Balai POM pada Oktober 2023. Bagi Balai POM baru ini, target IKU Jumlah Desa Pangan Aman mulai ada di tahun 2024 dengan target 1 desa.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori **"BAIK"** karena personil/petugas Infokom Balai POM di Surakarta telah banyak mendapat pengalaman dari pelaksanaan program tahun 2024. Meskipun demikian, di tahun 2025 ini terdapat perubahan tahapan dan anggaran program yang cukup signifikan membuat petugas harus menyusun strategi dan perencanaan yang matang, tentunya juga sesuai dengan kapasitas UPT.

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan) di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 Februari 2025 atau segera setelah *exercise* efisien anggaran anggaran dilakukan berkali-kali. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida Kabupaten Wonogiri melalui surat No. B/246/400.7.30/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Usulan Lokus Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan juga survei ke usulan lokus desa secara langsung pada tanggal 27 Februari 2025 sehingga diperoleh informasi riil kondisi dan potensi desa. Pada akhirnya, hasil survei tersebut mengerucutkan target intervensi desa pangan aman tahun 2025 adalah Desa Singodutan dan akan disampaikan pada saat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

audiensi dengan Bupati Wonogiri atau pejabat daerah Kabupaten Wonogiri setelah Idulfitri atau sebelum pelaksanakan advokasi.

Pada triwulan II, telah dilaksanakan advokasi keterpaduan keamanan pangan, pelatihan KKPD, dan bimtek komunitas secara tepat waktu dan lancar sehingga mendukung mencapaian IKU. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, perlu adanya koordinasi yang intensif agar Monev Desa Pangan Aman dan penyusunan rencana aksi mandiri dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai juknis. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang intensif dengan Pemda Sragen dan Pemdes Sukorejo terkait pengawalan rencana aksi mandiri pelaksanaan keamanan pangan di Desa Sukorejo tahun 2025 agar keberlangsungan program yang diinisiasi dan diintervensi tahun 2024 tidak berhenti.

Pada triwulan III, telah dilaksanakan Monev Desa Pangan Tahun 2025 dan Pengawalan Desa yang Intervensi Tahun 2024 secara luring dan daring (termasuk pada triwulan IV). Monev telah berjalan lancar dan telah ditetapkan rencana aksi mandiri keamanan pangan Desa Singodutan Tahun 2026. Pengawalan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana aksi mandiri keamanan pangan Desa Sukorejo tahun 2025 yang diintervensi tahun 2024.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Jumlah desa pangan aman	1. Pemerintah Desa kesulitan menyusun rencana aksi mandiri program keamanan pangan tahun 2026 2. Data dukung implementasi/pe	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2.	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2.	TW IV 2025	Y	RP-01	Tidak seluruh tahapan program desa pangan aman dlaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		laksanaan rencana aksi mandiri desa yang diintervensi sebelumnya masih belum rapi (tahapan pengawalan)	Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/ pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/ pelaksanaan rencana aksi mandiri desa				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target tahun 2025. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang telah baik dengan OPD Wonogiri juga harus dijaga. Selain itu, dengan pelaksanaan tahapan kegiatan mengikuti juknis serta persiapan yang matang maka dapat memperlancar pelaksanaan.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 85. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100	**Baik**

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PPABK merupakan pasar yang mendapatkan intervensi keamanan pangan berupa advokasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, bimbingan teknis pengelola pasar, penyuluhan dan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, dan pengawasan keamanan pangan. Selain itu, terdapat tahapan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi.

Program PPABK merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 3 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Program PPABK merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri.

Balai POM di Surakarta melakukan intervensi dan pendampingan kepada petugas pengelola dan pedagang pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas pasar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang dijual dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PPABK dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari OPD Kabupaten Wonogiri serta hasil survei, kajian potensi, dan kondisi pasar oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan pasar intervensi tahun 2025 adalah Pasar Krisak, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader pasar (tim pengelola pasar). Pada saat bimtek, kader diberikan materi tentang keamanan pangan. Pada tahun 2025, bimtek dilakukan bersamaan dengan penyuluhan komunitas pasar. Pada saat penyuluhan, komunitas mendapatkan keamanan pangan. Setelah bimtek, tim pengelola pasar melaksanakan sosialisasi keamanan pangan di komunitas pasar, yang terdiri dari pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan sosialisasi berupa penyebaran informasi keamanan pangan melalui media sosial (instagram, facebook, dan whatsapp *group*), serta tatap muka menggunakan alat peraga *leaflet*.

Pada program PPABK, juga dilakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan yang dilakukan di Pasar Krisak. Kegiatan berupa sampling dan pengawasan menggunakan metode Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kemasan (CekKLIK), penilaian *post*-intervensi pasar, dan pembuatan rencana aksi program PPABK tahun 2026 di Pasar Krisak. Kegiatan pengawasan tidak hanya melibatkan Tim Pengelola Pasar, tetapi juga OPD yang terlibat dalam kegiatan PPABK.

Dalam pelaksanaan program PPABK, terdapat kegiatan pengawalan terhadap pasar intervensi tahun 2024, yaitu pasar Sukowati. Kegiatan pengawalan yang dilakukan berupa monev keberlanjutan dan sosialisasi keamanan pangan. Kegiatan bertujuan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

refreshment materi keamanan pangan, dan monev terkait kegiatan PPABK di Pasar Sukowati dan replikasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sragen.

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terdapat penyesuaian tahapan program PPABK mengacu Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Tahun 2025. Adapun tahapan program PPABK di Desa Pasar Krisak, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 menjadi:

Tabel 86. Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

No.	Tahapan	Skor	Jadwal
1.	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari—April
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret—Juni
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar	20%	Maret—Juni
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%	Mei—Juli
5.	Pengawalan	10%	Februari—Juli

Pada tahun 2025, progress PPABK yang telah dilaksanakan, meliputi:

1) Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri tanggal 24 dan 26 Januari 2025 (2%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Dinas Perdagangan dan KUKM dan Usulan Lokus Intervensi tanggal 26 Februari 2025 (3%).
3) Persiapan advokasi meliputi pengadaan, dan persiapan acara advokasi yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).
4) Audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 9 April 2025 (3%).
5) Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor tanggal 15 April 2025 (7%).
6) Pelaporan kegiatan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan pada aplikasi SIPAMAN tanggal 5 Mei 2025 (5%).
7) Persiapan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada bulan Mei 2025 (5%).
8) Pelaksanaan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Pasar Krisak tanggal 4 Juni 2025 (15%).
9) Pelaporan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar tanggal 23 Juni 2025 (5%).
10) Pembuatan dan penyebaran konten Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Tim Pengelola Pasar, yang selanjutnya diteruskan ke *WAG* Paguyuban tanggal 7 Mei, 20 Mei, 13 Juni, dan 26 Juni 2025 (16%).
11) Persiapan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar kepada Tim Pengelola Pasar Krisak pada Juni 2025 (3%).
12) Persiapan kegiatan Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2024 pada bulan Mei 2025 (2%).
13) Pelaksanaan Monev Keberlanjutan dan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Sukowati tanggal 11 Juni 2025 (5%).
14) Pelaporan kegiatan Monev Keberlanjutan dan Sosialisasi Keamanan Pangan tanggal 23 Juni 2025 (3%).
15) Briefing dan penyerahan tools pengawasan kepada Tim Pengelola Pasar Krisak tanggal 4 Juni 2025 (5%).
16) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Pasar Krisak tanggal 8 Juli 2025 (10%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17) Pelaporan pengawasan keamanan pangan di Pasar Krisak tanggal 31 Juli 2025 (5%).

Dari tahapan-tahapan tersebut, diperoleh capaian IKU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100% dengan capaian 100% dengan kategori **"BAIK"**. Hasil tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 87. Perbandingan Realisasi serta Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	1	1	100%
2025	1	1	100%

Target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya adalah sama, yaitu 1 pasar. Capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 88. Perbandingan realisasi capaian kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100	Tercapai

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "Tercapai". Akan tetapi, perlu diketahui bahwa target renstra IKU berikut tidak bersifat akumulatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 untuk Balai POM di Surakarta, Balai POM di Mamuju, Balai POM di Sofifi dan Balai POM Payakumbuh sama-sama sebesar 1 pasar yang sudah diintervensi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025, yaitu sebesar 1 pasar dengan kategori "BAIK". Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, antara lain:

1) Balai POM di Surakarta berinisiatif melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian) pada tanggal 24 dan 26 Januari 2025.
2) Balai POM telah memperoleh rekomendasi lokus intervensi sebanyak 3 pasar melalui surat No. B/246/400.7.30/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Usulan Lokus Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025, yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Disdag KUKM dan calon pasar intervensi pada tanggal 6 Februari 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Telah dilaksanakan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan dengan OPD dan lintas sektor terkait, serta pasar intervensi pada tanggal 15 April 2025.
4) Telah dilaksanakan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dengan peserta dari tim pengelola pasar, OPD terkait, dan pedagang Pasar Krisak pada tanggal 4 Juni 2025
5) Telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar oleh tim pengelola pasar pada Mei—Juni 2025.
6) Telah dilaksanakan Monev Keberlanjutan dan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Sukowati pada tanggal 11 Juni 2025.
7) Telah dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi di Pasar Krisak pada tanggal 8 Juli 2025.
8) Pelaporan setiap kegiatan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan pada aplikasi SIPAMAN dan link pelaporan PPABK.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK Tahun 2025	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK Tahun 2025	TW IV 2025	Y	STR-01	Pelaksanan tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2026 didukung oleh seluruh tahapan mulai dari advokasi hingga pengawasan dan pengawalan pasar intervensi tahun 2026. Dalam pelaksanaan setiap tahapan, telah dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak pemda dan pasar. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan sesuai kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan sangat mendukung kelancaran progam, sehingga realisasi kegiatan dapat mencapai target.

SASARAN KEGIATAN 4
MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 90. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	14,81	14,81	100	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan/atau IP CPPOB pangan olahan				

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan merupakan serangkaian tahapan proses secara umum yaitu KIE/ Sosialisasi keamanan pangan, penetapan target, pelaksanaan bimtek, pelaksanaan pendampingan, dan monitoring evaluasi/ pelaporan. Pada triwulan III ada perubahan target tahunan tahun 2025. Yang semula adalah jumlah UMKM yang didampingi pada tahun 2025 dibandingkan dengan target UMKM tahun 2025 sendiri, berubah menjadi jumlah UMKM yang didampingi Balai POM di Surakarta tahun 2025 dibandingkan dengan total UMKM yang ditarget untuk Balai POM di Surakarta tahun 2025 – 2029 yaitu sebanyak 54 sarana UMKM.

Pada akhir tahun 2025 untuk jumlah rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA untuk 1 sarana, rekomendasi sertifikat cara pembuatan Kosmetik mencapai 2 sarana dan terbitnya IP CPPOB pangan olahan 5 sarana UMKM pangan olahan, sehingga telah terdampingi sejumlah total 8 UMKM.

Sehingga capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan adalah 8 UMKM dibandingkan dengan 54 UMKM yaitu sebesar 14,81% dari target seluruh UMKM yang akan didampingi sampai 2029 nanti. Capaian kinerja yaitu 100 % dengan kategori BAIK.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2023 - 2024)

Tabel 91. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2023	79%	93,33%	118,14%
2024	94%	100%	106,38
2025	14,81%	14,81%	100%

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan memiliki perubahan dalam manual IKU perhitungan target tahunan sehingga saat dibandingkan akan memiliki nilai seperti tabel diatas. Tahun 2025 target UMKM yang didampingi telah melalui proses sebagaimana mestinya sesuai pedoman sehingga UMKM memperoleh sertifikat cara pembuatan. Balai POM di Surakarta telah melakukan pendampingan sesuai dengan target tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 92. Perbandingan Realisasi capaiankinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100%	14.81%	14,81% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “Perlu Upaya Keras”. Hal ini adalah proses untuk menuju tercapainya renstra 2029 dimana target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UMKM yang akan didampingi hingga tahun 2029 sebanyak 54 UMKM masih membutuhkan upaya pendampingan di tahun-tahun kedepannya

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 93. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	90,90%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 hampir semua 100% yang artinya pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta, Balai POM di SOfifi dan Balai POM di Payakumbuh telah melakukan pendampingan UMKM target dan telah mencapai output nya. Dan yang belum memenuhi seluruh target yaitu Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 90,90%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pendampingan sesuai tahapan proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Melakukan Bimtek baik secara daring maupun luring
3. Melakukan pendampingan CAPA dokumen e-sertifikasi maupun CAPA ketidaksesuaian saat audit
4. Melakukan desk registrasi pangan olahan dengan berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan
5. Melakukan monitoring terhadap keseluruhan proses dan melakukan pelaporan progres kepada Badan POM

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tahapan proses pendampingan belum selesai	1. Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya 2. Melakukan Desk pendampingan UMKM 3. Menyusun pelaporan akhir pendampingan UMKM	Melakukan proses pendampingan hingga Desember 2025 termasuk melakukan layanan konsultasi sertifikasi dan menyusun pelaporan akhir/ TW IV pendampingan UMKM	TW IV 2025	Y	O-04	Target UMKM yang akan diintervensi berubah dari yang sudah ditetapkan di awal tahun anggaran

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau CPPOB pangan olahan yaitu pelaksanaan dilakukan secara terencana dan sesuai dengan pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pendampingan UMKM untuk semua komoditas. Komitmen dari UMKM yang didampingi juga memberikan peran penting termasuk juga fasilitator atau pendamping dari Balai POM di Surakarta yang selalu mendampingi UMK tersebut dalam melakukan proses pengajuan.

SASARAN KEGIATAN 5
TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 94. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75	90	120	Tidak dapat disimpulkan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perhitungan realisasi Indikator kinerja ini dihitung melalui pembobotan untuk setiap tahapan dengan pembagian bobot sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%

4) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan

5) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Cara perhitungan dari indicator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Nilai realisasi perkara tahun 2025 diperoleh dari kemajuan perkara sbb:

- Serah tahap II perkara carry over tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2025,
- Tahapan P21 untuk Perkara I tahun 2025, dan
- Tahapan P21 untuk perkara II tahun 2025

Nilai dari progress perkara di tahun 2025 tersebut adalah 90%. Capaian berdasarkan realisasi tahun 2025 adalah 120% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 95. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	75	90	120

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) dikarenakan cara perhitungan yang berbeda di tahun 2025 dengan tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 96. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	83	90	108,43	Tercapai/melampaui

Realisasi Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “tercapai/melampaui”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 97. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100	90	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel , Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara di atas, Realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta paling rendah dengan nilai 90% sedangkan BPOM di Mamuju, BPOM di Sofifi dan BPOM di Payakumbuh masing-masing mencapai realisasi sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta sebesar 90% yang melebihi target dengan capaian 120%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian maupun peningkatan kinerja, antara lain :

1) Perencanaan kegiatan penindakan yang lebih matang
2) Penguatan koordinasi dengan ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) baik dengan korwas maupun jaksa penuntut umum (JPU)
3) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik SDM, anggaran maupun sarana prasarana
4) Kerjasama baik yang telah terjalin dengan korwas maupun JPU

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang melampaui target mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam pengendalian faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara pada periode berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Belum dapat diserah tahap II kedua perkara tahun 2025 karena pemenuhan P19 pada perkara II dan tersangka tidak memenuhi panggilan sampai dengan saat ini	1. melaksanakan serah tahap II untuk perkara II, 2. Berkomunikasi secara intensif dengan Korwas Polres Wonogiri terkait penangkapan tsk	1.Berkomunikasi dengan JPU untuk serah tahap II untuk perkara II tahun 2025 2. Menjadwalkan konsultasi dengan Korwas Polres Wonogiri terkait progress permohonan pencarian tersangka	akhir TW 1 2026	Y	H-1	Pemberkasan perkara terhambat

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

4. Program Perencanaan dan Intelijen Penindakan Terintegrasi

   Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang terstruktur untuk memetakan jalur distribusi sediaan farmasi dan pangan ilegal di wilayah kerjasebelum operasi penindakan dilakukan.

5. Program Penguatan Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH)

   Koordinasi pra-penyidikan bersama Kordinasi Pengawas (Korwas) PPNS Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri setempat untuk menyelaraskan unsur-unsur pasal pidana yang disangkakan, membangun jalur konsultasi informal dan formal yang cepat untuk menindaklanjuti petunjuk Jaksa (P-19) secara merata, sehingga meminimalisir risiko berkas perkara bolak-balik dan mempercepat status berkas P-21 (lengkap).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Program Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya Operasional

   Keikutsertaan penyidik dalam pelatihan penanganan barang bukti, serta Hukum Acara Pidana untuk meningkatkan keabsahan proses legalitas perkara, efisiensi penyerapan anggaran penyidikan pada perkara-perkara berisiko tinggi tanpa mengabaikan penanganan kasus regular, pemanfaatan sarana pengujian laboratorium yang cepat.

7. Program Pengendalian Eksternal dan Mitigasi Perkara

   Pengawalan proses persidangan bersama JPU guna memastikan terdakwa mendapatkan sanksi hukum yang proporsional serta pengawasan terhadap eksekusi barang bukti, penerapan rekam jejak digital dan pembukuan administrasi penyidikan guna mengantisipasi tuntutan praperadilan dari pihak tersangka.

SASARAN KEGIATAN 6

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar**

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 98. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89	Sangat Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Analisis Penelusuran Siber

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2) Analisis Hasil Pelaksanaan Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

3) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

   Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)

Cara perhitungan dari indikator ini adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

1) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
2) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
3) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada bulan 1 sampai dengan 11, target indikator tercapai dari komponen analisis penelusuran siber, dengan kontribusi 50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terhadap nilai indikator. Dan komponen ini didapatkan dari pelaporan laporan siber yang terdiri dari Patroli Siber dan Profiling yang dilakukan tepat waktu pada triwulan I sampai dengan III. Pada bulan 12 ditambahkan dari nilai b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dan Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal.

Realisasi indikator kinerja ini di akhir tahun 2025 terrealisasi 98% dengan capaian 108,89% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 99. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	75	90	120

Realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) dikarenakan indikator ini baru lahir di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 100. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	94	98	104,25	Tercapai/melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diselesaikan sesuai standar				

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "tercapai/melampaui".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 101. Perbandingan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	99	98	93,84	97,92

Berdasarkan tabel , Perbandingan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara di atas, realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar BPOM di Surakarta berada di urutan nomor 2 setelah BPOM di Mamuju yang diikuti oleh BPOM di Payakumbuh dan BPOM di Sofifi.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 mencapai 98% dari target 90%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,89% dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

analisis kejahatan obat dan makanan telah berjalan secara efektif dan melampaui standar kinerja yang telah ditetapkan. Capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) Perencanaan kegiatan terutama patroli siber yang baik disertai pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia sehingga pelaporan siber dapat terlaksana tepat waktu
2) Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan perencanaan yang baik dan tepat waktu.
3) Respons cepat terhadap tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
4) Komitmen dan koordinasi internal yang baik

Secara keseluruhan, keberhasilan dan peningkatan kinerja pada indikator ini tidak hanya menunjukkan capaian output administratif, tetapi juga menggambarkan penguatan fungsi penindakan melalui pelaksanaan fungsi siber dan cegah tangkal yang baik.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Belum keluarnya nilai TL Rekomendasi Analisis Kejahatan SF dan PO oleh unit pengampu yaitu dir cegah tangkal	- berkomunikasi dengan unit pengampu	berkomunikasi dengan unit pengampu yaitu Direktorat cegah tangkal terkait nilai tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal	akhir Januari 2026	Y	O-15	Laporan analisis kejahatan obat dan makanan tidak diselesaikan tepat waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Program Pengawasan Siber Berbasis Teknologi Informasi

   Pelaksanaan pemantauan rutin terhadap lalu lintas peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal di berbagai platform *e-commerce*, media sosial, dan situs web/aplikasi digital, Penggunaan perangkat lunak khusus pemantauan siber (*crawling*) untuk mendeteksi kata kunci (*keywords*) obat keras, obat tanpa izin edar (TIE), jamu mengandung bahan kimia obat (BKO), dan pangan berbahaya secara cepat serta Penerapan mekanisme pelaporan berbasis sistem digital yang memastikan pengiriman hasil pengawasan siber tepat waktu.

2. Program Intelijen dan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan

   Kegiatan pengolahan data mentah temuan siber maupun temuan lapangan menjadi Laporan Analisis Kejahatan yang sistematis, mencakup modus operandi, peta persebaran, hingga profil pelaku/akun serta Penyusunan instrumen dan pedoman analisis kejahatan yang terstruktur agar setiap laporan memenuhi kriteria/standar mutu (kelengkapan substansi, ketepatan analisis modus, dan validitas data pendukung).

3. Program Cegah Tangkal & Tindak Lanjut Rekomendasi (*Takedown* & Penindakan)

   Pengiriman rekomendasi pemblokiran tautan (*link take-down*) secara cepat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui direktorat terkait, hasil analisis kejahatan yang teridentifikasi berisiko tinggi ditindaklanjuti dengan operasi penindakan lapangan atau penyidikan pidana.

4. Program Penguatan Tata Kelola & Koordinasi Lintas Fungsi Internal

   Forum komunikasi rutin antara tim pengawasan siber, tim intelijen, tim pemeriksaan, serta tim penyidikan Balai POM di Surakarta untuk menyelaraskan prioritas target pengawasan, serta pengawasan ketat terhadap progres penyelesaian Laporan Analisis Kejahatan secara periodik guna meminimalisir kendala keterlambatan penyusunan laporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 7
LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

1. Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 102. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	4.78	113.81 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai:

Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (*Dengan Catatan*)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (*Dengan Catatan*)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada Tahun 2025 ini telah diperoleh realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4.78 dengan kategori A (Pelayanan Prima) dan persentase capaian terhadap target sebesar 113.80 % (tidak dapat disimpulkan).

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hasil penilaian yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian Indeks Pelayanan Publik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya (2024)

Tabel 103. Perbandingan Realisasi serta Capaian Persentase Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta Tahun 2025 Tahun – Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	3.55	3.88	109.30 %
2025	4.2	4.78	113.81 %

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator kinerja yang sudah ada di tahun sebelumnya namun dari perhitungan ada perbedaan di tahun 2025 yaitu tahun 2024 dengan nilai % capaian diatas 110 % dan dibawah 120 % masih dikategorikan sangat baik. Sehingga secara kategori perbandingan tahun ini dan tahun sebelumnya memiliki perbedaan yaitu kriteria Tidak Dapat Disimpulkan dan Sangat Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 104. Perbandingan Realisasi capaiankinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6	4.78	103.91 %	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria "tercapai/ melampaui".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75	4.78	4.89	4.56

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 4.89 kemudian Balai POM Surakarta dengan realisasi sebesar 4.78; dan Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 4.75. Realisasi terendah adalah Balai POM di Payakumbuh yaitu sebesar 4.56.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target nilai, yaitu 4,2. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

1) Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
2) Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik.
3) Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
4) Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinyu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti penyediaan minuman dan permen; wifi; tempat charger.
6) Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penyusunan laporan dan monev pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

secara berkala.

7) Melakukan rekomendasi atas penilaian Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta tahun 2024.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Rekomendasi untuk pembangunan gedung baru di SD Bumi agar memenuhi aspek sarana prasarana pelayanan publik	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026	2026	Y	IT-01	Pelaku usaha kesulitan mengakses aplikasi elektronik layanan publik

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Program atau kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target nilai IPP tahun 2025, yaitu 4,2 adalah dengan melaksanakan rekomendasi atas penilaian Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta tahun 2024 dan melakukan monitoring evaluasi atas *plan of action* yang telah dibuat diawal tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN 8
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 106. Realisasi Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	78,43	103,20	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

1. Komponen Pengungkit Bobot terdiri dari :
   A. Manajemen Perubahan 8%
   B. Penataan Tatalaksana 7%
   C. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
   D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
   E. Penguatan Pengawasan 15%
   F. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

2. Komponen Hasil Bobot terdiri dari :
   A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5 %
   B. Pelayanan Publik yang prima 17,5 %

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun – tahun sbelumnya (2024)

Tabel 107. Perbandingan realisasi serta capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 dengan tahun – tahun sbelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	75	74,39	99,18
2025	76	78,43	103,20

Target Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2024 yakni 75 dan tahun 2025 76 . Realisasi tahun 2024 sebesar 74,39 dan tahun 2025 78,43 dengan capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2024 99,18 kategori “Baik” sedangkan tahun 2025 yaitu sebesar 103,20% dengan kategori “Sangat Baik”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 108. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	80	78,43	98,03	AKAN TERCAPAI

Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 yakni sebesar 78,43 belum mencapai target Renstra tahun 2029 yakni 80 sehingga dalam hal ini masuk ke dalam kategori "Akan Tercapai".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Indikator Kinerja	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,20	78,43	84,71	77,91

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM Mamuju dengan realisasi sebesar 86,20 kemudian Balai POM Sofifi dengan realisasi 84,71. Balai POM di Surakarta memiliki realisasi sebesar 78,43 dan yang terendah adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi 77,91.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target Nilai Pembangunan ZI pada tahun 2025. Analisis penyebab keberhasilan tercapainya target Nilai Pembangunan ZI yaitu :

1. Setiap Pokja Area Perubahan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi dan melengkapi data dukungnya
2. Mengimplementasikan Inovasi pada Balai POM di Surakarta dan mendokumentasikannya,
3. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala	Telah dilakukan Desk pembangunan ZI BPOM di Surakarta pada TW II Tahun 2025	Monev Renja masing masing Pokja	TW IV 2025	Y	SDM-05	Nilai RB BPOM tidak sesuai target

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan Zona Integritas di Balai POM di Surakarta didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan tersebut diperkuat dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, pemanfaatan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi. Sinergi antarprogram tersebut mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada pelayanan publik. Keberlanjutan pelaksanaan dan penguatan kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam mempertahankan serta meningkatkan capaian nilai pembangunan Zona Integritas di Balai POM di Surakarta.

2. Nilai AKIP UPT

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 110. Realisasi Nilai AKIP UPT Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT BPOM	76	75,69	99,59 	Baik

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula yaitu Penjumlahan 5 (lima) komponenvpenilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja bobot 24
2. Pengukuran Kinerja bobot 24
3. Pelaporan Kinerja bobot 12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Evaluasi Kinerja Internal bobot 20
5. Capaian Kinerja bobot 24

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya (2024)

Tabel 111. Perbandingan Realisasi serta capaian Nilai AKIP UPT tahun 2025 dan tahun tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	78,66	74,39	94,57
2025	76	75,69	99,59

Target Nilai AKIP UPT BPOM pada tahun 2024 78,66 dan tahun 2025 sebesar 76. Dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 74,39 dan tahun 2025 sebesar 75,69. Capaian Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2024 94,57 dan capaian tahun 2025 yaitu 99,59 dengan kategori "Baik".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 112. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT BPOM	80	75,69	94,61	AKAN TERCAPAI

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 sebesar 75,69 **belum mencapai** target renstra 2029 sebesar 80 dengan kategori "**AKAN TERCAPAI"**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mencapai dengan target renstra 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

Tabel 113 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP UPT Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI MAMUJU	BALAI POM DI SURAKARTA	BALAI POM DI SOFIFI	BALAI POM DI PAYAKUMBUH
Nilai AKIP UPT BPOM	82,01	75,69	76,83	74,69

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi 82,01 kemudian Balai POM di Sofifi dengan realisasi 76,83 Balai POM di Surakarta memiliki realisasi sebesar 75,69 dan yang terendah adalah Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi 74,69.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

Balai POM di Surakarta belum berhasil mencapai target Nilai AKIP UPT BPOM yang ditetapkan Tahun 2025. Beberapa kegiatan yang mendukung upaya perbaikan untuk capaian nilai AKIP UPT BPOM sebagai berikut :

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten.
2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja.
3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance).
4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak ada kendala	Telah dilaksanakan Desk AKIP Pada TW III	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan	TW IV 2025	Y	A-01	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tidak optimal.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja**

Belum tercapainya target Nilai AKIP UPT BPOM Balai POM di Surakarta Tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penerapan SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut kinerja. Pengelolaan dan integrasi data capaian kinerja dari berbagai sumber masih perlu diperkuat untuk menjamin konsistensi dan keterlacakan data. Selain itu, kualitas analisis dalam pelaporan kinerja serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Balai POM di Surakarta untuk melakukan penguatan koordinasi, meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja, memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan secara terukur dan terdokumentasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 114. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Baik

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus : **(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) di bulan Desember.**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan,

Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya (2024).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 115. Perbandingan Realisasi serta capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dan Tahun – tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tahun 2024	90,51	91,23	100,80%
Tahun 2025	5	5	100%

Target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 90,51 dan tahun 2025 yaitu 5. Realisasi tahun 2024 yakni sebesar 91,23 dan tahun 2025 yakni 5. Capaian pada tahun 2024 100,80% dengan kategori "Sangat Baik" dan tahun 2025 memiliki capaian sebesar 100% dengan kategori "Baik".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 116. Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100 %	Tercapai

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 telah mencapai target renstra 2029 dengan kategori "Tercapai".

d. Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Indikator Kinerja	Balai POM Mamuju	Balai POM Surkarta	Balai POM Sofifi	Balai POM Payakumbuh
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	5	5	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel diatas , dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta, Balai POM di Sofifi dan Balai POM Payakumbuh dengan realisasi 5 dan yang terendah adalah Balai POM Mamuju dengan realisasi 4.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran yaitu terpenuhinya nilai IKPA (50%) dan EKA (50%). Upaya yang dilakukan Balai POM di Surakarta yaitu :

1. Melakukan monitoring terhadap salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan.
2. Melakukan monitoring terhadap komponen nila EKA pada Triwulan IV Tahun 2025.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak ada kendala	Monitoring salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	TW IV 2025	Y	K-02	Belum optimalnya penggunaan TKDN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Faktor-Faktor yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian NKA :

1. Melakukan penyusunan proyeksi penarikan dana bulanan yang akurat guna meminimalisir deviasi antara rencana penarikan di Halaman III DIPA dengan realisasi aktual di lapangan.
2. Melakukan Koordinasi Lintas Fungsi antara unit perencana, keuangan dan pelaksana teknis kegiatan
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Internal secara berkala dengan melibatkan pimpinan.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 118. Capaian 1. Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025

Nama IKSK	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	2,71	96,79% 	Baik

Indeks Manajemen Risiko UPT merupakan penilaian maturitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama nomr HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Tujuan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;

b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;

c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Adapun Ruang lingkup penilaian meliputi:

a. Komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;

b. Penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;

c. Identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;

d. Analisis Risiko, yang dilakukan dengan mennetukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbankan pengendalian yang ada;

e. Evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya;

f. Mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaki, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pelaksanaan RTP tersebut; dan

g. Reviu dan Pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat maturitas manajemen risiko sebuah organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tingkat	Karakteristik
Level 1 Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*)	Manajemen risko tergantung pada individu perorangan
Level 2 Sadar Risiko (*Risk Aware*)	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Level 3 Risiko Ditetapkan (*Risk Defined*)	Kerangka penilaian/ tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberikan pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Level 4 Risiko Dikelola (*Risk Managed*)	Aktivitas menajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Level 5 Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*)	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan Keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan.

Hingga akhir TW III belum terdapat capaian nilai maturitas dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024)

Tabel 119. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2024	-	-	-
2025	2,8	2,71	96,79

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Namun walaupun merupakan indikator kinerja baru Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Utama dari tahun 2023 dan dilakukan setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025 – 2029

Tabel 120. Perbandingan Realisasi serta capaian Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2	2,71	84,68 	Akan Tercapai

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 belum mencapai target Renstra 2029 dengan kriteria “akan tercapai”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM setara

Tabel 121. Perbandingan Realisasi Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM MAMUJU	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM SOFIFI	BALAI POM PAYAKUMBUH
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	100,21	96,79	101,05	98,64

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Manajemen Risiko sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Mamuju dengan realisasi sebesar 100,21% kemudian Balai POM di Sofifi dengan realisasi sebesar 101,05% kemudian Balai POM di Payakumbuh dengan realisasi sebesar 98,64%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 96,79%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja

Berdasarkan surat dari Inspektorat Utama No PI.06.07.7.01.26.188 tanggal 15 Januari 2026 Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 Pada Balai POM di Surakarta telah disampaikan hasil penilaian maturitas sebesar 2,719 (*Risk Aware*).

Terhadap kondisi tersebut, Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Kepala Balai POM di Surakarta beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan mendokumentasikan sosialisasi tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai secara memadai.

b. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko secara berkesinambungan melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

c. Melakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting untuk seluruh risiko inheren dengan level risiko ≥16 dan mendokumentasikan kertas kerja hasil pengujian dan data dukung hasil pengujian secara memadai.

d. Melaksanakan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM, minimal dan tidak terbatas pada melaksanakan perbaikan sesuai catatan pada butir 5d tersebut di atas.

e. Melakukan reviu terhadap penentuan respon risiko dan/atau deskripsi tindakan mitigasi, merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang lebih spesifik dan memadai, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual sesuai target yang telah direncanakan dan ditetapkan.

f. Melaksanakan pengisian progres atas pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu pada aplikasi SAPAAPIP secara lengkap dan cermat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Menyusun kertas kerja reviu risiko yang memuat informasi atas adanya perubahan pada daftar risiko secara memadai. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam Tim Pengelola Manajemen Risiko unit kerja.

i. Melaksanakan tagging risiko pada RHK, kepada seluruh pegawai di Balai POM di Surakarta.

j. Ketua Tim Kerja agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan dalam proses pengelolaan manajemen risiko diantaranya dibuktikan dengan dokumentasi atas masukan terhadap implementasi manajemen risiko di Balai POM di Surakarta.

k. Melaksanakan supervisi kepada Tim Auditor Internal untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab sebagai lini kedua sesuai konsep Three Lines Model, salah satunya untuk melaksanakan reviu atas dokumen manajemen risiko sebelum dilaporkan pada aplikasi SAPAAPIP.

Dengan melakukan rekomendasi tersebut selanjutnya diharapkan Balai POM di Surakarta dapat melakukan perbaikan secara berkesinambungan serta meningkatkan komitmen dalam penerapan manajemen risiko.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	Masih terdapat kegiatan yang belum dilakukan analisa risiko Masih terdapat risiko yang sama dengan bahasa berbeda pada beberapa IKU Belum semua Pemilik risiko melengkapi	Penyusunan Daftar Risiko masing-masing fungsi dengan masukan setiap ka TIM Penyusunan Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi	Desk Daftar Risiko masing-masing fungsi Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi dengan kertas kerja	TW I 2026	Y	STR-03	Keterlambatan pengiriman daftar risiko melalui SAPA APIP setiap semester

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		daftar risiko dengan kertas kerja	dengan kertas kerja					

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisa penyebab tidak tercapainya target Indeks Manajemen Risiko di tahun 2025 disebabkan kurangnya kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan manajemen risiko baik dari ketua tim kerja maupun seluruh personel. Diperlukan perbaikan secara berkesinambungan serta meningkatkan komitmen dalam penerapan manajemen risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling tidak sesuai renlak Proses sampling dan pengujian tidak dilaporkan secara real time	-Selalu update renlak terkait jadwal sampling dan pengujian - Berkoordinasi dengan bidang lain dan balai penguji terkait hasil pengujian	-Selalu update renlak terkait jadwal sampling dan pengujian - Berkoordinasi dengan bidang lain dan balai penguji terkait hasil pengujian	2025	Y	O-05 O-16	Sampling tidak sesuai renlak Hasil uji yang dilaporkan oleh balai penguji lain tidak real time
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Kendala dalam 1 tahun terakhir adalah terkait kepatuhan sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan pelaporan KTD/ESo yang diakibatkan : 1. Ketidakpahaman cara pelaporan KTD/ESO 2. Tidak mengetahui ESO apa saja (jenis) yang sering muncul yang dapat dilaporkan misal seperti	1. Kembali menyampaikan terkait tata cara pelaporan KTD/ESO saat KIE Farmakovigilans tahun 2026. 2. Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO secara langsung di sarana	1. KIE Farmakovigilans dilakukan pada bulan Mei Tahun 2026 dengan materi Farmakovigilans dan Tata Cara Pelaporannya 2. Monev pelaporan KTD ESO dilakukan bersamaan pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan sepanjang Tahun 2026.	2026	Y	O-02	Sarana yang telah diberikan KIE tidak melaporkan KTD/ESO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		ESO obat TB, HIV maupun alergi obat juga dapat dilaporkan						
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum semua sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditindaklanjuti	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	2025	T	-	-
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Informasi insiden atau kejadian dugaan keracunan makanan yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atauTim TGC Kabupaten / Kota ke BPOM di Surakarta masih terlambat	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait	1. Intens koordinasi dengan pihak DKK masing masing kabupaten dan kota 2. BPOM di Surakarta sudah mengusulkan keikutsertaannya di dalam Tim Gerak Cepat KLB-KB (Tim TGC KLB-KP) di Kabupaten Karanganyar pada saat dilakukan audiensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada Senin 22 September 2025. Saat ini masih dalam proses pengajuan BPOM Surakarta di dalam Surat Keputusan Tim TGC KLB-KP di Kabupaten Karanganyar	2025	Y	O-11	BPOM di Surakarta terlambat mendapat informasi KLB Pangan dari Tim KLB Kabupaten/Kota
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tindaklanjut hasil uji TMS	Komunikasi tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan ke UPT BBPOM di Semarang terkait produk PIRT yang TMS	Monitoring terkait tindaklanjut dari hasil sampel PIRT yang TMS sudah ditindaklanjuti oleh BBPOM Semarang dan sudah ditindaklanjuti juga oleh DInas Kesehatan Kab. Boyolali dengan melakukan pembinaan ke pelaku usaha IRTP	2025	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Feedback CAPA dari sarana distribusi dan saryanfar tidak disampaikan tepat waktu	- permintaan update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera atas kendala terdapat sarana yang belum menindaklanjuti CAPA mendekati timeline - Monitoring secara berkala feedback tindak lanjut dari pelaku usaha melalui Last of Us - Pengembangan menu last of us antara lain terkait dashboard pengawasan dan penambahan notifikasi warna untuk timeline	- update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera - Monitoring secara berkala feedback tindak lanjut dari pelaku usaha melalui Last of Us - Telah dilaksanakan Desk CAPA Sarana Produksi OBA dan Kosmetik tanggal 26-27 November 2025 di Hotel Alana, Karanganyar - Pengembangan menu last of us antara lain terkait dashboard pengawasan dan penambahan notifikasi warna untuk timeline	- minggu ke II dan ke IV tiap bulan - minggu I Juni 2025 - minggu ke III September 2025 - tw IV Tahun 2025	Y	STR-06	Feedback CAPA dari sarana distribusi dan saryanfar tidak disampaikan tepat waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	2025			
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	2025	Y	O-13	Keterlambatan pelaporan melalui SIPT
9	Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	2025	Y	O-09	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	2025	Y	O-10	Keterlambatan pelaporan hasil pengawasan distribusi pangan olahan melalui SIPT
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan target media pengawasan iklan tidak sesuai dengan media pengawasan yang telah ditetapkan	Melakukan revisi renlak target media pengawasan iklan	Melakukan revisi renlak target media pengawasan iklan pada TW 2	TW II 2025	Y	O-06	Pengawasan iklan OBA dan SK tidak sesuai dengan media yang ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	Belum ada data sarana pengawasan label tembakau/ label rokok	Penyusunan data sarana pengawasan label tembakau/ rokok elektronik	TW IV 2025	T	-	IKU baru muncul di TW 3 Tahun 2025
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat pengendalian AMR belum memadai	Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pengendalian AMR	1. Dilkukan bimtek kepada pelaku usaha khusus nya Apotek dengan tema pengendalian AMR 2. Melakukan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial Balai POM di Surakarta	TW IV 2025	Y		Pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat pengendalian AMR belum memadai sehingga pengendalian AMR belum optimal.
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Capaian nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian BPOM di Surakarta belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan berdasarkan Standar Kemampuan Laboratorium.	Melakukan optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium guna memastikan ketersediaan sarana pengujian, serta melaksanakan verifikasi metode pengujian kimia dan mikrobiologi secara terencana dan terdokumentasi.	Melakukan optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium guna memastikan ketersediaan sarana pengujian secara tepat waktu dan melakukan verifikasi metode	TW IV 2025	Y	SDM-08	Kompetensi pengujian laboratorium belum memenuhi standar
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak ada kendala	-	Melakukan pendampingan Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan meliputi : 1. advokasi 2. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dengan dilengkapi data dukung 3. Membuat laporan pendampingan dan laporan akhir	TH 2026	T	-	-
16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang	Data sarana fortifikasi belum update	Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk	Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026	2025	Y	O-21	Data base status keaktifan sarana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		pemeriksaan tahun 2026					produksi fortifikasi yang dijadikan dasar penentuan target tidak update
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Keterbatasan anggaran KIE	1. KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Pengalihan target publikasi menjadi via media whatsapp blast pada bulan Desember 2025	1. Akan dilaksanakan KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. Akan dilaksanakan KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Akan dilaksanakan tiga target publikasi yang belum tercapai dialihkan ke publikasi media whatsapp blast pada bulan Desember 2025	TW IV 2025	Y	SDM-01	Audiens tidak memahami materi KIE yang diterima
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala	1. Pengawalan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024. 2. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri) untuk pemenuhan target sekolah sesuai target renstra 2025--2029.	1. Pengawalan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024. 2. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri).	TW IV 2025	Y	STR-01	Pelaksanan tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19	Jumlah desa pangan aman	1. Pemerintah Desa kesulitan menyusun rencana aksi mandiri program keamanan pangan tahun 2026 2. Data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa yang diintervensi sebelumnya masih belum rapi (tahapan pengawalan)	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	TW IV 2025	Y	RP-01	Tidak seluruh tahapan program desa pangan aman dlaksanakan
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK Tahun 2025	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK Tahun 2025	TW IV 2025	Y	STR-01	Pelaksanan tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tahapan proses pendampingan belum selesai	1. Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya 2. Melakukan Desk pendampingan UMKM 3. Menyusun pelaporan akhir pendampingan UMKM	Melakukan proses pendampingan hingga Desember 2025 termasuk melakukan layanan konsultasi sertifikasi dan menyusun pelaporan akhir/ TW IV pendampingan UMKM	TW IV 2025	Y	O-04	Target UMKM yang akan diintervensi berubah dari yang sudah ditetapkan di awal tahun anggaran
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Belum dapat diserah tahap II kedua perkara tahun 2025 karena pemenuhan P19 pada perkara II dan tersangka tidak memenuhi panggilan sampai dengan saat ini	1. melaksanakan serah tahap II untuk perkara II, 2. Berkomunikasi secara intensif dengan Korwas Polres Wonogiri terkait penangkapan tsk	1.Berkomunikasi dengan JPU untuk serah tahap II untuk perkara II tahun 2025 2. Menjadwalkan konsultasi dengan Korwas Polres Wonogiri terkait progress permohonan pencarian tersangka	akhir TW 1 2026	Y	H-1	Pemberkasan perkara terhambat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Belum keluarnya nilai TL Rekomendasi Analisis Kejahatan SF dan PO oleh unit pengampu yaitu dir cegah tangkal	- berkomunikasi dengan unit pengampu	berkomunikasi dengan unit pengampu yaitu Direktorat cegah tangkal terkait nilai tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal	akhir Januari 2026	Y	O-15	Laporan analisis kejahatan obat dan makanan tidak diselesaikan tepat waktu
24	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Rekomendasi untuk pembangunan gedung baru di SD Bumi agar memenuhi aspek sarana prasarana pelayanan publik	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026	2026	Y	IT-01	Pelaku usaha kesulitan mengakses aplikasi elektronik layanan publik
25	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Telah dilakukan Desk pembangunan ZI BPOM di Surakarta pada TW II Tahun 2025	Monev Renja masing masing Pokja	TW IV 2025	Y	SDM-05	Nilai RB BPOM tidak sesuai target
26	Nilai AKIP BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Telah dilaksanakan Desk AKIP Pada TW III	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan	TW IV 2025	Y	A-01	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tidak optimal.
27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Monitoring salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	TW IV 2025	Y	K-02	Belum optimalnya penggunaan TKDN
28	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	Masih terdapat kegiatan yang belum dilakukan analisa risiko Masih terdapat risiko yang sama dengan bahasa berbeda pada beberapa IKU Belum semua Pemilik risiko melengkapi daftar risiko dengan kertas kerja	Penyusunan Daftar Risiko masing-masing fungsi dengan masukan setiap ka TIM Penyusunan Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi dengan kertas kerja	Desk Daftar Risiko masing-masing fungsi Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi dengan kertas kerja	TW I 2026	Y	STR-03	Keterlambatan pengiriman daftar risiko melalui SAPA APIP setiap semester

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

Balai POM di Surakarta

No	Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling tidak sesuai renlak Hasil uji yang dilaporkan oleh balai penguji lain tidak real time	-selalu update renlak terbaru agar tidak tertinggal terkait jadwal sampling dan pengujian - berkoordinasi dengan balai penguji terkait hasil pengujian	-selalu update renlak terbaru agar tidak tertinggal terkait jadwal sampling dan pengujian - berkoordinasi dengan balai penguji terkait hasil pengujian	Closed	sudah terlaksana dan selesai	Akhir TW 4	Y	O-05 O-16	Sampling tidak sesuai renlak Hasil uji yang dilaporkan oleh balai penguji lain tidak real time
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	pelaporan KTD ESO sudah ada perkembangan namun belum mencapai target tahunan yaitu 12 sarana, sarana masih menganggap bahwa pelaporan MESO harus pada ESO berat sehingg ESO ringan tidak dilakukan pelaporan	melakukan monitoring pelaporan KTD ESO dan melakukan follow up pelaporan kepada sarana pelayanan kesehatan. Serta menginformasikan bahwa semua kejadian KTD ESO	melakukan monitoring pelaporan KTD ESO dan melakukan follow up pelaporan kepada sarana pelayanan kesehatan setiap bulan di TW 4. Serta menginformasikan bahwa semua kejadian KTD ESO	Closed	monitoring pelaporan KTD ESO telah mencapai target tahunan yaitu 12 sarana dari 45 sarana yang diberikan KIE atau 26,67%, pelaporan dengan cara kunjungan langsung ke sarana pelayanan lebih efektif untuk	TW IV 2025	Y	O-02	Sarana yang telah diberikan KIE tidak melaporkan KTD/ESO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			termasuk ESO ringan dapat dilaporkan	termasuk ESO ringan dapat dilaporkan		meningkatkan jumlah pelaporan KTD ESO daftar sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD ESO yaitu : 1. RS Bedah Karima Utama 2. RS Sarila Husada 3. RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo 4. RS Brayat Minulya 5. RS Indriati Solo Baru 6. RS DKT Surakarta 7. RS Mardi Lestari 8. RS Maguan Husada 9. RS PKU Muhammadiyah Selogiri 10. RS Mulia Hati 11. Puskesmas Banyuanyar 12. RSUD Gemolong				
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum semua sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditindaklanjuti	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	Closed	Sudah dilakukan Tindak lanjut untuk sampel Tidak memenuhi Syarat (TMS)	TW IV 2025	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Informasi insiden atau kejadian dugaan keracunan makanan yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atauTim TGC Kabupaten / Kota ke BPOM di Surakarta masih terlambat	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait	1. Intens koordinasi dengan pihak DKK masing masing kabupaten dan kota 2. BPOM di Surakarta sudah mengusulkan keikutsertaannya di dalam Tim Gerak Cepat KLB-KB (Tim TGC KLB-KP) di Kabupaten Karanganyar pada saat dilakukan audiensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada Senin 22 September 2025. Saat ini masih dalam proses pengajuan BPOM Surakarta di dalam Surat Keputusan Tim TGC KLB-KP di Kabupaten Karanganyar	Closed	1. Intens koordinasi dengan pihak DKK masing masing kabupaten dan kota 2. Balai POM di Surakarta sudah masuk di dalam Tim Percepatan Pogram MBG Kab. Karanganyar melalui SK. Bupati Karanganyar No. 400/524 Tahun 2025 tanggal 15 September 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Teknis Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.	TW IV 2025	Y	O-11	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tindak lanjut hasil uji TMS	Komunikasi tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan ke UPT BBPOM di Semarang terkait produk PIRT yang TMS	Komunikasi tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan ke UPT BBPOM di Semarang terkait produk PIRT yang TMS	Closed	Monitoring terkait tindaklanjut dari hasil sampel PIRT yang TMS sudah ditindaklanjuti oleh BBPOM Semarang dan sudah ditindaklanjuti juga oleh DInas Kesehatan Kab. Boyolali dengan melakukan pembinaan ke pelaku usaha IRTP	TW IV 2025	T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Feedback CAPA dari sarana distribusi dan saryanfar tidak disampaikan tepat waktu	- permintaan update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera atas kendala terdapat sarana yang belum menindaklanjuti CAPA mendekati timeline	- update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera	Closed	Telah dilakukan Desk Capa tanggal 26-27 November di Hotel Alana	- minggu ke II dan ke IV tiap bulan - minggu I Juni 2025 - minggu ke III September 2025	Y	STR-06	Feedback CAPA dari sarana distribusi dan saryanfar tidak disampaikan tepat waktu
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Closed	Sudah dilakukan monitoring pelaksanaa pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	2025	T	-	-
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	Closed	Sudah dilakukan monitoring pelaksanaa pemeriksaan sarana produksi pangan	2025	Y	O-13	Keterlambatan pelaporan melalui SIPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	sesuai ketentuan									
9	Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi	Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi	Closed	Sudah dilakukan monitoring pelaksanaa pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi	2025	Y	o-09	Keterlambatan pelaporan melalui SIPT
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Progres pelaksanaan pemeriksaan belum termonitor	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	Closed	Sudah dilakukan monitoring pelaksanaa pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	TW IV 2025	Y	O-10	Keterlambatan pelaporan hasil pengawasan distribusi pangan olahan melalui SIPT
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan media iklan OBA tidak sesuai dengan renlak	1. Melakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW 2 2. Penyusunan revisi renlak iklan OBA dan kosmetik	1. Melakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW 4 2. Revisi renlak telah dilakukan pada TW 2, pada TW 4 tidak diperlukan revisi renlak kembali	Closed	Sudah dilakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW 4	TW IV 2025	Y	O-06	Pelaksanaan target media pengawasan iklan tidak sesuai dengan media pengawasan yang telah ditetapkan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	Belum tersedia data sarana pengawasan label tembakau/ dan atau rokok elektronik	Menyusun data sarana penagwasan label tembakau dan atau rokok elektronik	Closed	Tersedianya data sarana pengawasan label tembakau/ rokok elekteonik	TW 4 2025	T	Masuk mulai Tahun 2026	IKU Baru yang muncul pada TW 3 Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat pengendalian AMR belum memadai	Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pengendalian AMR	1. Dilkukan bimtek kepada pelaku usaha khusus nya Apotek dengan tema pengendalian AMR 2. Melakukan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial Balai POM di Surakarta	Closed	1. Pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha khususnya Apotek dengan tema pengendalian AMR pada TW 4 2025 2. KIE melalui media sosial instagram dan Facebook dengan tema AMR secara rutin setiap bulan.	2025	T	Muncul pada TA 2026	IKU Baru yang muncul pada TW 3 Tahun 2025
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Capaian nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian BPOM di Surakarta belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan berdasarkan Standar Kemampuan Laboratorium.	Melakukan optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium guna memastikan ketersediaan sarana pengujian, serta melaksanakan verifikasi metode pengujian kimia dan mikrobiologi secara terencana dan terdokumentasi.	Melakukan optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium guna memastikan ketersediaan sarana pengujian secara tepat waktu dan melakukan verifikasi metode	Closed	Optimalisasi proses pengadaan reagen, media, dan peralatan laboratorium telah terealisasi, serta verifikasi metode pengujian kimia dan mikrobiologi telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik	TW IV 2025	Y	SDM-08	Kompetensi pengujian laboratorium belum memenuhi standar
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	Melakukan pendampingan Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan meliputi : 1. advokasi 2. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dengan dilengkapi data dukung 3. Membuat laporan pendampingan dan laporan akhir	1. advokasi 2. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dengan dilengkapi data dukung 3. membuat laporan pendampingan dan laporan akhir	Closed			T	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Data sarana fortifikasi belum update	Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026	Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026	Closed	Telah dilakukan updating sarana fortifikasi	TW IV 2025	Y	O-07	Data base status keaktifan sarana produksi fortifikasi yang dijadikan dasar penentuan target tidak upadate
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Keterbatasan anggaran KIE	1. KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Pengalihan target publikasi menjadi via media whatsapp blast pada bulan Desember 2025	1. Akan dilaksanakan KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. Akan dilaksanakan KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Akan dilaksanakan tiga target publikasi yang belum tercapai dialihkan ke publikasi media whatsapp blast pada bulan Desember 2025	Closed	1. KIE DIPA KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR 2. KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025 bekerja sama dengan PKM Purwosari di posyandu tentang Keamanan Pangan dan Edukasi Stunting 3. Publikasi media whatsapp blast pada bulan Desember 2025	TW IV 2025	Y	SDM-01	Audiens tidak memahami materi KIE yang diterima
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Adanya arahan dari pusat untuk mengejar target sekolah sesuai target awal, yaitu 5 sekolah. UPT harus mengejar pemenuhan target tersebut sedangkan anggaran sudah digunakan untuk melaksanakan seluruh tahapan program dengan target efisiensi, yaitu 3 sekolah.	1. Melaksanakan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 2. Melaksanakan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024.	1. Melaksanakan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 2. Melaksanakan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024.	Closed	1. Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 (MTsN 1 Wonogiri) dan 30 Juli 2025 (SDN 7 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri).	TW IV 2025	Y	STR-01	Pelaksanan tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						2. Pengawalan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024 akan dilaksanakan pada TW IV Tahun 2025. 3. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahap 2 (MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri) untuk pemenuhan target sekolah sesuai target renstra 2025--2029 akan dilaksanakan pada TW IV Tahun 2025..				
19	Jumlah desa pangan aman	1. Pemerintah Desa kesulitan menyusun rencana aksi mandiri program keamanan pangan tahun 2026 2. Data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa yang diintervensi sebelumnya masih belum rapi (tahapan pengawalan)	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	Closed	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	TW IV 2025	Y	RP-01	Tidak seluruh tahapan program desa pangan aman dlaksanakan
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala			Closed					
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tahapan proses pendampingan belum selesai	1. Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya 2. Melakukan Desk pendampingan UMKM 3. Menyusun pelaporan akhir pendampingan UMKM	Melakukan proses pendampingan hingga Desember 2025 termasuk melakukan layanan konsultasi sertifikasi dan menyusun pelaporan akhir/ TW IV pendampingan UMKM	Closed	Telah dilakukan pendampingan UMKM secara keseluruhan	TW IV 2025	Y	O-04	Target UMKM yang akan diintervensi berubah dari yang sudah ditetapkan di awal tahun anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Target SPDP di bulan Juli mundur menjadi bulan Agustus dikarenakan target operasi bulan Juli pernah berurusan dengan hukum sehingga dalam kegiatan pelanggaran hukum lebih berhati-hati, tidak ditemukan cukup bukti kegiatan tindak pidana. Dalam pemberkasan perkara, terdapat P-19 sehingga belum bisa serah tahap II	1. Dalam perencanaan kegiatan penindakan diperlukan rapat koordinasi PPNS dan tim dalam menentukan kelengkapan unsur-unsur keterangan dan rencana kegiatan penindakan sehingga bisa dihindari kegagalan operasi penindakan. 2. Diperlukan koordinasi yang intensif dengan Jaksa Penuntut Umum baik secara formal maupun informal	1. Rapat Koordinasi PPNS sebelum kegiatan Penindakan 2. Komunikasi dengan JPU baik secara formal maupun non formal dalam pemenuhan P19	Closed	selesai	15 Desember 2025	Y	H-1 O-25	Pemberkasan perkara terhambat Kegagalan pengungkapan kejahatan obat dan makanan
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	Pelaporan patroli siber dan profiling tiap bulan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan	Pelaporan patroli siber sebelum tanggal 25 di bulan berikutnya	closed	selesai	25 October 2025	Y	O-15	Laporan analisis kejahatan obat dan makanan tidak diselesaikan tepat waktu
24	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Rekomendasi untuk pembangunan gedung baru di SD Bumi agar memenuhi aspek sarana prasarana pelayanan publik	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026	Open	Telah dituangkan dalam POA tahun 2026 terkait rekomendasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025	2026	Y	IT-01	Pelaku usaha kesulitan mengakses aplikasi elektronik layanan publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Telah dilakukan Desk pembangunan ZI BPOM di Surakarta pada TW II Tahun 2025	Monev Renja masing masing Pokja	closed	Melaksanakan Monev Renja masing masing Pokja setiap bulannya	TW IV 2025	Y	SDM-05	Nilai RB BPOM tidak sesuai target
26	Nilai AKIP BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Telah dilaksanakan Desk AKIP Pada TW III	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan	closed	Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan pada saat rapat progresif	TW IV 2025	Y	A-01	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tidak optimal.
27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	Tidak ada kendala	Monitoring salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	closed	Memonitor Nilai IKPA	TW IV 2025	Y	K-02	Belum optimalnya penggunaan TKDN
28	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	Masih terdapat kegiatan yang belum dilakukan analisa risiko Masih terdapat risiko yang sama dengan bahasa berbeda pada beberapa IKU Belum semua Pemilik risiko melengkapi daftar risiko dengan kertas kerja	Penyusunan Daftar Risiko masing-masing fungsi dengan masukan setiap ka TIM Penyusunan Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi dengan kertas kerja	Desk Daftar Risiko masing-masing fungsi Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi dengan kertas kerja	Closed	Kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari 2026 : 1. Analisa daftar risiko oleh katim 2. Penyusunan daftar risiko dan penentuan risk residual oleh Tim SPIP 3. Reviu daftar risiko oleh Auditor Internal 4. Upload daftar risiko melalui SAPA APIP pada tanggal 20 Januari 2026	TW I 2026	Y	STR-03	Keterlambatan pengiriman daftar risiko melalui SAPA APIP setiap semester

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi dalam laporan kinerja triwulan IV pada tahun 2025 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain :

a) Balai POM di Surakarta mengajukan usulan permohonan revisi target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.07.2.05.25.251 dalam hal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Sehubungan dengan penetapan target Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Surakarta yang belum sesuai Periode Pelaporan untuk Frekuensi Target adalah Bulanan dan diisi mulai dari B04-B12 dan sehubungan dengan adanya perubahan perhitungan pada Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan telah dilakukan exercise dalam perencanaan kinerja bulanan. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi dari Balai POM di Surakarta dengan hasil agar ditetapkan dan dapat disepakati untuk indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Untuk Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dapat disepakati karena sudah melewati batas pelaporan kinerja interim TW I untuk target B1-B3. Kemudian Kemudian Mengacu realisasi pada B4 yakni sebesar 33,33, maka usulan target di B4-B5 tidak disepakati dan direkomendasikan target B4-B5 minimal sama dengan realisasi B4 yakni 33,33. Adapun usulan target pada B6- B11 dapat disepakati.

b) Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja juga digunakan untuk melakukan penyesuaian Target Kinerja yang berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM, Nomor PR.07.2.08.25.451, tanggal 14 Agustus 2025, Hal : Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025, pada tanggal 29 Agustus 2025 telah disesuaikan dengan menambahkan beberapa Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang baru dan perubahan target menyesuaikan kesepakatan dengan unit pengampu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diantaranya adalah Indikator : Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan , Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman, persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan /atau IP CPPOB pangan olahan.

c) Balai POM di Surakarta mengajukan usulan permohonan revisi target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.07.2.05.25.251 dalam hal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025 Tahap III Tahun 2025 yakni tanggal 1 Oktober s.d 15 Oktober 2025. Untuk Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih adaptif dan realistis dengan mempertimbangkan capaian di triwulan II dan III yang belum tercapai targetnya dikarenakan kemunduran pencapaian target I sehingga berimbas kepada pencapaian proses selanjutnya. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi dari Balai POM di Surakarta dengan hasil Mempertimbangkan realisasi pada B9 yakni sebesar 51,67%, maka usulan penyesuaian target B10-B11 dapat disepakati.

d) Pemanfaatan Informasi Kinerja menjelaskan bahwa pada laporan kinerja terdapat anggaran yang mengalami blokir pada tahun 2025, yang dijelaskan secara ringkas pada Sub Bab Realisasi Anggaran.

e) Adanya Manual IKU baru Rancangan Awal Renstra 2025-2029 sesuai Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.01.25.23 dengan dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja Interim dan Tahunan.

f) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi atau rencana aksi kinerja telah tertuang dalam pembahasan masing-masing Indikator Kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.516.391.000,00** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dengan realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2025 adalah **Rp5.874.829.224,00** (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) atau 68.98%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjusment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.882.081.000,00** (lima miliar delapan ratus delapan puluh duat juta delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjusment* adalah 99.88 %. Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp2.634.310.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Perincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode berakhir 31 Desember 2025

Jenis Belanja	TAHUN ANGGARAN 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	2.828.596.000,00	2.827.202.429,00	99,95
Belanja Barang	3.615.196.000,00	2.425.485.970,00	67,09
Belanja Modal	2.072.599.000,00	622.193.650,00	30,02
Total Belanja Kotor	8.516.391.000,00	5.874.882.049,00	68,98
Pengembalian	0,00	52.825,00	-
Jumlah	**8.516.391.000,00**	**5.874.829.224,00**	**68,98**

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 38,15% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan pada TA 2025. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembayaran tunjangan kinerja secara terpusat.
2. Realisasi belanja barang mengalami penurunan pada TA 2025. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan blokir dalam rangka efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
3. Realisasi belanja modal mengalami penurunan pada TA 2025. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan blokir dalam rangka efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Balai POM di Surakarta memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp8.516.391.000,00. Selama TA 2025, telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali yang disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Revisi I DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 22 Februari 2025, berupa pemblokiran anggaran dalam pelaksanaan APBN TA 2025
2. Revisi II DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 09 April 2025, berupa pembukaan blokir DIPA TA 2025
3. Revisi III DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 23 April 2025, berupa Revisi Halaman III DIPA
4. Revisi IV DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 30 Juni 2025, berupa Penyamaan Data POK
5. Revisi V pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 07 Juli 2025, berupa Pemenuhan Belanja Pegawai
6. Revisi VI pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 15 Juli 2025, berupa Revisi Halaman III DIPA
7. Revisi VII DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 30 September 2025, berupa Penyamaan Data POK
8. Revisi VIII pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 14 Oktober 2025, berupa Revisi Halaman III DIPA
9. Revisi IX DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 11 November 2025, berupa pembukaan blokir DIPA TA 2025
10. Revisi X DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 02 Desember 2025, berupa Penyamaan Data POK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Revisi XI DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah (DJPb), tanggal 12 Desember 2025, berupa Penyamaan Data POK.

Tabel Perincian Perubahan DIPA untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Uraian		31 Desember 2025		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Jasa	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA				
1	Belanja Pegawai	2.323.771.000,00	2.828.596.000,00	504.825.000,00
2	Belanja Barang	3.612.518.000,00	3.615.196.000,00	2.678.000,00
3	Belanja Modal	2.072.599.000,00	2.072.599.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	**8.008.888.000,00**	**8.516.391.000,00**	**507.503.000,00**

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp504.825.000,00 karena kenaikan pangkat dan jabatan serta penambahan pegawai dan CPNS.
2. Belanja Barang mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp2.678.000,00 karena belanja keperluan sehari-hari.
3. Belanja Modal tidak mengalami perubahan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	85,20	103,27	85.168.860	85.164.072	99,99
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	26,67	102,58	40.150.000	2.520.000	6,28
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,88	109,27	25.815.300	25.810.904	99,98
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	3.687.900	3.687.272	99,98
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,00	103,53	3.687.900	3.687.272	99,98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	100,00	100,00	21.655.700	21.629.016	99,88
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	96,69	107,04	35.600.100	35.522.637	99,78
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	98,79	108,56	59.333.500	59.204.395	99,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	98,12	103,28	97.890.000	97.881.372	99,99
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,15	108,96	58.734.000	58.728.823	99,99
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	98,11	110,48	21.655.700	21.629.016	99,88
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80,00	81,60	102,00	1.738.140	1.738.042	99,99
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,27	105,27	19.578.000	19.576.274	99,99
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14,00	14,32	102,29	1.052.599.000	1.048.615.434	99,62
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100,00	3.687.900	3.687.272	99,98
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00	70,37	105,03	27.544.000	27.492.500	99,81
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,40	100,53	119.135.000	28.794.400	24,17
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	100,00	171.565.000	44.669.250	26,04
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00	173.725.000	44.720.500	25,74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	100.420.000	28.739.850	28,62
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	14,81	100,00	29.919.000	6.920.000	23,13
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75,00	90,00	120,00	207.698.000	206.350.300	99,35
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	98,00	108,89	50.455.000	12.207.000	24,19
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,20	4,78	113,81	92.674.000	92.674.000	100,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76,00	78,43	103,20	1.801.827.400	395.021.005	21,92
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76,00	75,69	99,59	963.054.800	784.338.974	81,44
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5,00	5,00	100,00	2.753.064.400	2.318.798.713	84,23
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,80	2,71	96,79	494.327.400	395.021.005	79,91

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat capaian realisasi anggaran per Indikator Kinerja Balai POM di Surakarta pada Triwulan IV Tahun 2025 berkisar antara 6,28% sampai dengan 100%. Dalam hal ini indikator yang belum sepenuhnya terserap pada Triwulan IV ada di Indikator Kinerja Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan realisasi anggaran 2.520.000 dengan anggaran yang dimiliki 40.150.000 dengan capaian 6,28% merupakan penyerapan realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

anggaran terkecil dibandingkan dengan indikator kinerja lainnya. Sedangkan capaian persentase penyerapan realisasi anggaran yang tertinggi pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT dengan realisasi anggaran 92.674.000 dengan capaian 100% dari anggaran yang dimiliki 92.674.000.

b) Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	b	c	d	e
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.530.982.000	1.489.081.801	97,26
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	27.544.000	27.492.500	99,81
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	564.845.000	146.924.000	26,01
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	29.919.000	6.920.000	23,13
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	207.698.000	206.350.300	99,35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	50.455.000	12.207.000	24,19
7	Layanan Publik UPT yang prima	92.674.000	92.674.000	100,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	6.012.274.000	3.893.179.697	64,75
	JUMLAH	8.516.391.000	5.874.829.298	68,98

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Surakarta pada triwulan IV Tahun 2025 berkisar antara 23,13% sampai 100% dengan total realisasi 68,98%.

Dalam hal ini masih terdapat sasaran kegiatan yang anggarannya belum sepenuhnya terserap pada triwulan IV dan adanya dampak efisiensi anggaran pada Balai POM di Surakarta. Realisasi anggaran yang paling tinggi yaitu pada sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang prima dan penyerapan realisasi anggaran yang paling rendah ada pada sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c) Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
Balai POM di Surakarta
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Volume			Anggaran		
		Target Tahunan	Realisasi Fisik	% Capaian Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	50.455.000	12.207.000	24,19
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	80	82	102,50	92.674.000	92.674.000	100,00
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	126	126	100,00	77.443.000	17.438.500	22,52
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	231.000.000	57.030.350	24,69
5	BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	19	19	100,00	41.692.000	11.355.900	27,24
6	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10	0	0,00	50.000.000	0	0,00
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	6	0	0,00	100.000.000	0	0,00
8	CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00	1.300.000.000	0	0,00
9	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	430.000.000	426.421.784	99,17
10	QCD.U07 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan	2	2	100,00	207.698.000	206.350.300	99,35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Makanan di Balai POM Kota Surakarta						
11	QDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	100,00	171.565.000	44.669.250	26,04
12	QDB.002 Desa Pangan Aman	1	1	100,00	173.725.000	44.720.500	25,74
13	QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	100.420.000	28.739.850	28,62
14	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	40.150.000	2.520.000	6,28
15	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	8	8	100,00	29.919.000	6.920.000	23,13
16	QIA.001 Pengadaan sampel makanan	57	57	100,00	36.879.000	36.872.720	99,98
17	QIA.002 Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	157	164	104,46	86.907.000	86.902.114	99,99
18	QIC.001 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	86	86	100,00	118.667.000	118.408.790	99,78
19	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	18	19	105,56	27.544.000	27.492.500	99,81
20	QIC.004 Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	216	217	100,46	195.780.000	195.762.744	99,99
21	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	622.599.000	622.193.650	99,93
22	EBA.956 Layanan BMN	1	1	100,00	8.000.000	1.597.000	19,96
23	EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	100,00	4.323.274.000	3.834.552.347	88,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Perhitungan efisiensi kinerja pada Balai POM di Surakarta difokuskan pada indikator - indikator *input* dan *output* dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian Output}{\%\ Capaian input} \quad IE = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Sasaran Kegiatan Balai POM di Surakarta Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN (%)	IE	SE	TE	CAPAIAN	KETERANGAN	JUSTIFIKASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,77	97,26	1,01	1	0,01	100%	Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap efisien. Pencapaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan proporsi capaian kinerja. Dari kegiatan yang efisien ini, perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE sebesar 100% (Efisien).
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	105,03	99,81	1,05	1	0,05	100%	Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap efisien. Pencapaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

									proporsi capaian kinerja. Dari kegiatan yang efisien ini, perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE sebesar 100% (Efisien).
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,13	26,01	3,85	1	2,85	75%	Tidak Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap tidak efisien dikarenakan penggunaan anggaran masih rendah dibandingkan capaian kinerja yang telah terealisasi jauh lebih tinggi dari proporsi anggaran. Dari kegiatan ini dalam perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE 75% (Tidak Efisien).
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	23,13	4,32	1	3,32	75%	Tidak Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap tidak efisien dikarenakan penggunaan anggaran masih rendah dibandingkan capaian kinerja yang telah terealisasi jauh lebih tinggi dari proporsi anggaran. Dari kegiatan ini dalam perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE 75% (Tidak Efisien).
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	120	99,35	1,21	1	0,21	95%	Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap efisien. Pencapaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan proporsi capaian kinerja. Dari kegiatan yang efisien ini, perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE sebesar 95% (Efisien).
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108,89	24,19	4,50	1	3,50	75%	Tidak Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap tidak efisien dikarenakan penggunaan anggaran masih rendah dibandingkan capaian kinerja yang telah terealisasi jauh lebih tinggi dari proporsi anggaran. Dari kegiatan ini dalam perhitungan tingkat efisien (TE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

									menunjukkan nilai TE 75% (Tidak Efisien).
7	Layanan Publik UPT yang prima	113,81	100,00	1,14	1	0,14	100%	Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap efisien. Pencapaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang optimal dengan proporsi capaian kinerja lebih tinggi. Dari kegiatan yang efisien ini, perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE sebesar 100% (Efisien).
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,89	64,75	1,54	1	0,54	92%	Efisien	Nilai IE ≥ SE menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dianggap efisien. Pencapaian kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan proporsi capaian kinerja. Dari kegiatan yang efisien ini, perhitungan tingkat efisien (TE) menunjukkan nilai TE sebesar 92% (Efisien).

d) Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	OUTPUT			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE %	Kategori
			T	R	(%)	T	R	(%)				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	85,20	103,27	85.168.860	85.164.072	99,99	1,03	0,03	100	Efisien
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	26,67	102,58	40.150.000	2.520.000	6,28	16,34	15,34	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,88	109,27	25.815.300	25.810.904	99,98	1,09	0,09	100	Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	3.687.900	3.687.272	99,98	-	- 1,00	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,00	103,53	3.687.900	3.687.272	99,98	1,04	0,04	100	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	100,00	100,00	21.655.700	21.629.016	99,88	1,00	0,00	100	Efisien
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	96,69	107,04	35.600.100	35.522.637	99,78	1,07	0,07	100	Efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	98,79	108,56	59.333.500	59.204.395	99,78	1,09	0,09	100	Efisien
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	98,12	103,28	97.890.000	97.881.372	99,99	1,03	0,03	100	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,15	108,96	58.734.000	58.728.823	99,99	1,09	0,09	100	Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	98,11	110,48	21.655.700	21.629.016	99,88	1,11	0,11	100	Efisien
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80,00	81,60	102,00	1.738.140	1.738.042	99,99	1,02	0,02	100	Efisien
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,27	105,27	19.578.000	19.576.274	99,99	1,05	0,05	100	Efisien
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14,00	14,32	102,29	1.052.599.000	1.048.615.434	99,62	1,03	0,03	100	Efisien
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100	3.687.900	3.687.272	99,98	1,00	0,00	100	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00	70,37	105,03	27.544.000	27.492.500	99,81	1,05	0,05	100	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,40	100,53	119.135.000	28.794.400	24,17	4,16	3,16	75	Tidak Efisien
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	100,00	171.565.000	44.669.250	26,04	3,84	2,84	75	Tidak Efisien
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00	173.725.000	44.720.500	25,74	3,88	2,88	75	Tidak Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	100.420.000	28.739.850	28,62	3,49	2,49	75	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	14,81	100,00	29.919.000	6.920.000	23,13	4,32	3,32	75	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75,00	90,00	120,00	207.698.000	206.350.300	99,35	1,21	0,21	100	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	98,00	108,89	50.455.000	12.207.000	24,19	4,50	3,50	75	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,20	4,78	113,81	92.674.000	92.674.000	100,00	1,14	0,14	100	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76,00	78,43	103,20	1.801.827.400	395.021.005	21,92	4,71	3,71	75	Tidak Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76,00	75,69	99,59	963.054.800	784.338.974	81,44	1,22	0,22	95	Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5,00	5,00	100,00	2.753.064.400	2.318.798.713	84,23	1,19	0,19	100	Efisien
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,80	2,71	96,79	494.327.400	395.021.005	79,91	1,21	0,21	95	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta pada triwulan IV melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan IV, sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan dinilai efisien dan 3 (tiga) sasaran kegiatan dinilai belum efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,01 sampai 3,50. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kendala atau hambatan yang dihadapi atas terjadinya ketidakefisienan pada Balai POM di Surakarta yaitu adanya kebijakan blokir dalam rangka efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan dukungan pembiayaan pada sasaran kegiatan yang terjadi inefisiensi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029 dan DIPA Tahun 2025.

1) Pada tahun 2025 dari 8 sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta telah tercapai target sebagai berikut 4 sasaran kegiatan dengan kategori “sangat baik”, 2 sasaran kegiatan dengan kategori “baik”, 2 sasaran kegiatan dengan kategori “Tidak Dapat disimpulkan”.
2) Hasil capaian tiap sasaran kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

   a. Capaian indikator pada sasaran kegiatan pertama 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 104,75% dengan kategori Sangat Baik.
   b. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua ‘Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi’ sebesar 105,03% dengan kategori Sangat Baik.
   c. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga ‘Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Surakarta’ sebesar 100,13% dengan kategori Sangat Baik.
   d. Capaian indikator pada sasaran strategis kegiatan ‘Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu’ sebesar 100% dengan kategori Baik.
   e. Capaian indikator pada sasaran strategis kegiatan ‘Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta’ sebesar 120% dengan kategori Tidak dapat Disimpulkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 108,89% dengan kategori Sangat Baik.
g. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh "Layanan Publik Balai POM di Surakarta yang prima " sebesar 113,81% dengan kategori Tdak dapat Disimpulkan.
h. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar 99,89% dengan kategori Baik.

Realisasi capaian 28 IKSK yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) terdiri dari :
   a. Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,27%.
   b. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO dengan capaian sebesar 102,58%
   c. Indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,27%
   d. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,53%
   e. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 107,04%
   f. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,56%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,28%

h. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,96%

i. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elekronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 102,00%

j. Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 105,27%

k. Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 102,29%

l. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 105,03%

m. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100,53%

n. Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian sebesar 108,89%.

o. Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 103,20%.

2. 9 (sembilan) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 100%) terdiri dari :

   a. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Indikator Persentase Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian sebesar 100%.
c. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100%
d. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100,00%
e. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 100%
f. Indikator Persentase Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian sebesar 100%
g. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100%
h. Indikator Nilai AKIP Balai POM Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 99,59%
i. Indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 96,79%

3. 3 (tiga) Indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian X >110%) terdiri dari :
   a. Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,48%
   b. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 120,00%.
   c. Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 113,81%.
4. 1 (satu) Indikator di exclude kan dari realisasi pencapaian yaitu Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, karena Balai POM di Surakarta tidak menguji sampel KLB pada tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan IV, sebanyak 4 (empat) sasaran kegiatan dinilai efisien dan 4 (empat) sasaran kegiatan dinilai belum efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,05 sampai 3,50. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kendala atau hambatan yang dihadapi atas terjadinya ketidakefisienan pada Balai POM di Surakarta yaitu adanya kebijakan blokir dalam rangka efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan dukungan pembiayaan pada sasaran kegiatan yang terjadi inefisiensi.

4) Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.516.391.000,00** dengan realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2025 adalah Rp5.874.829.224,00 atau 68.98%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjusment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.882.081.000,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjusment* adalah 99.88 %

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025 dengan mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan secara berkelanjutan agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Adapun saran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1) Mempertahankan capaian kinerja yang sudah sangat baik melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan kegiatan yang konsisten, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Melakukan peninjauan kembali terhadap target indikator dengan capaian kinerja tidak dapat disimpulkan melalui penyesuaian target yang lebih realistis sesuai dengan baseline data di tahun 2025
3) Meningkatkan efisiensi pada kegiatan yang belum optimal dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap sasaran strategis serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.
4) Menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi kebijakan efisiensi anggaran melalui inovasi pelaksanaan kegiatan dan penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.
6) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 sebagai bahan perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya
7) Memperkuat koordinasi dan sinergi baik internal maupun eksternal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program serta meningkatkan perlindungan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD FAJAR ARIFIN
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MUHAMMAD FAJAR ARIFIN	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,4 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,008,888,000 (Delapan Miliar Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,185,117,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,823,771,000

Surakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REVISI PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat Makanan di Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menjambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat Makanan di Surakarta	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MUHAMMAD FAJAR ARIFIN	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.33 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilawasi sesuai ketentuan	80,8 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 – Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 – Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persentase
3.	04 – Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,94 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01. - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81 Persentase
5.	06. - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 – Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
6.	07 - Tertaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,516,391,000 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR_3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,185,117,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4,331,274,000

Surakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat Makanan di Surakarta

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

BALAI POM DI SURAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	85,20	103,27	85.168.860	85.164.072	99,99
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	26,67	102,58	40.150.000	2.520.000	6,28
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,88	109,27	25.815.300	25.810.904	99,98
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	3.687.900	3.687.272	99,98
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,00	103,53	3.687.900	3.687.272	99,98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	100,00	100,00	21.655.700	21.629.016	99,88
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	96,69	107,04	35.600.100	35.522.637	99,78
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	98,79	108,56	59.333.500	59.204.395	99,78
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	98,12	103,28	97.890.000	97.881.372	99,99
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,15	108,96	58.734.000	58.728.823	99,99
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	98,11	110,48	21.655.700	21.629.016	99,88
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80,00	81,60	102,00	1.738.140	1.738.042	99,99
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,27	105,27	19.578.000	19.576.274	99,99
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14,00	14,32	102,29	1.052.599.000	1.048.615.434	99,62
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100,00	3.687.900	3.687.272	99,98
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00	70,37	105,03	27.544.000	27.492.500	99,81
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,40	100,53	119.135.000	28.794.400	24,17
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	100,00	171.565.000	44.669.250	26,04
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00	173.725.000	44.720.500	25,74
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	100.420.000	28.739.850	28,62
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	14,81	100,00	29.919.000	6.920.000	23,13
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75,00	90,00	120,00	207.698.000	206.350.300	99,35
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	98,00	108,89	50.455.000	12.207.000	24,19
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,20	4,78	113,81	92.674.000	92.674.000	100,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76,00	78,43	103,20	1.801.827.400	395.021.005	21,92
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76,00	75,69	99,59	963.054.800	784.338.974	81,44
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5,00	5,00	100,00	2.753.064.400	2.318.798.713	84,23
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,80	2,71	96,79	494.327.400	395.021.005	79,91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE %	Kategori
			T	R	(%)	T	R	(%)				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	85,20	103,27	85.168.860	85.164.072	99,99	1,03	0,03	100	Efisien
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	26,67	102,58	40.150.000	2.520.000	6,28	16,34	15,34	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,88	109,27	25.815.300	25.810.904	99,98	1,09	0,09	100	Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	3.687.900	3.687.272	99,98	-	- 1,00	75	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,00	103,53	3.687.900	3.687.272	99,98	1,04	0,04	100	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	100,00	100,00	21.655.700	21.629.016	99,88	1,00	0,00	100	Efisien
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	96,69	107,04	35.600.100	35.522.637	99,78	1,07	0,07	100	Efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	98,79	108,56	59.333.500	59.204.395	99,78	1,09	0,09	100	Efisien
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	98,12	103,28	97.890.000	97.881.372	99,99	1,03	0,03	100	Efisien
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,15	108,96	58.734.000	58.728.823	99,99	1,09	0,09	100	Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	98,11	110,48	21.655.700	21.629.016	99,88	1,11	0,11	100	Efisien
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80,00	81,60	102,00	1.738.140	1.738.042	99,99	1,02	0,02	100	Efisien
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,27	105,27	19.578.000	19.576.274	99,99	1,05	0,05	100	Efisien
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14,00	14,32	102,29	1.052.599.000	1.048.615.434	99,62	1,03	0,03	100	Efisien
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100	3.687.900	3.687.272	99,98	1,00	0,00	100	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00	70,37	105,03	27.544.000	27.492.500	99,81	1,05	0,05	100	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,40	100,53	119.135.000	28.794.400	24,17	4,16	3,16	75	Tidak Efisien
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	100,00	171.565.000	44.669.250	26,04	3,84	2,84	75	Tidak Efisien
		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00	173.725.000	44.720.500	25,74	3,88	2,88	75	Tidak Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	100.420.000	28.739.850	28,62	3,49	2,49	75	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	14,81	100,00	29.919.000	6.920.000	23,13	4,32	3,32	75	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75,00	90,00	120,00	207.698.000	206.350.300	99,35	1,21	0,21	100	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	98,00	108,89	50.455.000	12.207.000	24,19	4,50	3,50	75	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,20	4,78	113,81	92.674.000	92.674.000	100,00	1,14	0,14	100	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76,00	78,43	103,20	1.801.827.400	395.021.005	21,92	4,71	3,71	75	Tidak Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76,00	75,69	99,59	963.054.800	784.338.974	81,44	1,22	0,22	95	Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5,00	5,00	100,00	2.753.064.400	2.318.798.713	84,23	1,19	0,19	100	Efisien
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,80	2,71	96,79	494.327.400	395.021.005	79,91	1,21	0,21	95	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. PENGUKURAN NPS (NILAI PENCAPAIAN SASARAN)

Pengukuran Kinerja Balai POM di Surakarta s.d Triwulan IV

SASARAN STRATEGIS		NAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025	TARGET s.d TW IV	REALISASI s.d TW IV	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TW IV	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	82,50	85,20	103,27	103,27
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26,00	26,00	26,67	102,58	102,58
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	92,88	109,27	109,27
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	88,00	103,53	103,53
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	90,33	96,69	107,04	107,04
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	98,79	108,56	108,56
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	95,00	98,12	103,28	103,28
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	99,15	108,96	108,96
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	88,80	98,11	110,48	110,48
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	81,60	102,00	102,00
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	105,27	105,27	105,27
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	14,00	14,32	102,29	102,29
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							97,77	97,77
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00	67,00	70,37	105,03	105,03
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							105,03	105,03
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,94	86,94	87,40	100,53	100,53
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,13	100,13
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	14,81	14,81	100	100
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	75,00	90,00	120,00	120,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							120,00	120,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	90,00	98,00	108,89	108,89
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							108,89	108,89
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	4,20	4,78	113,81	113,81
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							113,81	113,81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76,00	76,00	78,43	103,20	103,20
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	76,00	76,00	75,69	99,59	99,59
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,80	2,80	2,71	96,79	96,79
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							99,89	99,89

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

CAPAIAN RHPK BALAI POM DI SURAKARTA TAHUN 2025

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Januari	157.00	82.50	10.00	80.00	50.00	80.00	55.00	- Pedoman Sampling	- Koordinasi dengan unit
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Februari	157.00	82.50	100.00	90.00	75.00	90.00	88.75	- Target yang tidak pasti	- Koordinasi dengan unit
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Maret	157.00	82.50	100.00	90.00	75.00	90.00	88.75	- Target yang tidak pasti	- Koordinasi dengan unit
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	April	157.00	82.50	97.78	87.14	75.00	82.42	85.59	- Adanya libur panjang	Koordinasi dengan balai
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Mei	157.00	82.50	89.47	87.78	83.33	94.42	88.75	1. Sampel Obat	1. Sampel Obat
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Juni	157.00	82.50	90.94	89.67	87.50	88.67	89.19	sampel kasus tidak bisa	a. selalu update renlak
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Juli	157.00	82.50	95.95	90.33	87.50	90.85	91.16	sampel kasus tidak bisa	a. selalu update renlak
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Agustus	157.00	82.50	91.85	88.17	90.00	91.31	90.33	terdapat gap 4 sampel	a. Selalu melakukan
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	September	157.00	82.50	97.26	90.67	92.00	93.47	93.35	sampel sarana tidak	a. Selalu melakukan
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Oktober	157.00	82.50	99.14	88.38	92.00	92.50	93.00	Time line (ketepatan pengukuran waktu yang berbeda-beda dari setiap komoditi membuat menyulitkan dalam pencapaian) sampel ruang lingkup dari BBPOM Semarang tidak	Koordinasi dengan unit pengampu selalu memeriksa pedoman sampling dan peta kemampuan uji apapun jenis sampel nya
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	November	157.00	82.50	99.11	84.58	90.00	91.85	91.39	Time line (ketepatan pengukuran waktu yang berbeda-beda dari setiap komoditi membuat	Koordinasi dengan unit pengampu
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai k	Desember	157.00	82.50	98.73	79.70	80.00	82.38	85.20	Time line (ketepatan	Koordinasi dengan unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target Tahunan : 82,5%

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak lanjut
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	JANUARI		0.00	0.00	-		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	FEBRUARI		0.00	0.00	-		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	MARET		0.00	0.00	-		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	APRIL		0.00	0.00	-		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	MEI		0.00	45.00	0.00	belum ada sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD ESO di bulan Mei 2025	melakukan monitoring kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melaporkan KTD ESO
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	JUNI		0.00	45.00	0.00	terdapat 1 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD ESO Bulan Juni 2025 namun realisasi dihitung di ahir tahun B12	melakukan monitoring kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melaporkan KTD ESO
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	JULI		0.00	45.00	0.00	terdapat 2 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD ESO Bulan Juni 2025 namun realisasi dihitung di ahir tahun B12	melakukan monitoring kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melaporkan KTD ESO
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	AGUSTUS		0.00	45.00	0.00	terdapat 4 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD ESO Bulan Agustus 2025 namun realisasi dihitung di ahir tahun B12	melakukan monitoring kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melaporkan KTD ESO
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	SEPTEMBER		0.00	45.00	0.00	terdapat 7 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD ESO Bulan Agustus 2025 namun realisasi dihitung di akhir tahun B12	melakukan monitoring kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melaporkan KTD ESO
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	OKTOBER		0.00	45.00	0.00	terdapat 2 calon pelapor KTD ESO yaitu RS Meguan husada dan Puskesmas Banyuanyar namun karena kendala pelaporan tidak jadi melapor	melakukan kunjungan langsung ke saryanfar tsb untuk memandu proses pelaporan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	NOVEMBER		0.00	45.00	0.00	terdapat 11 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD ESO Bulan November 2025 namun realisasi dihitung di akhir tahun B12 melakukan monitoring kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melaporkan KTD ESO	melakukan kunjungan langsung ke saryanfar tsb untuk memandu proses pelaporan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	DESEMBER	26%	12.00	45.00	26.67	monitoring pelaporan KTD ESO telah mencapai target tahunan yaitu 12 sarana dari 45 sarana yang diberikan KIE atau 26,67%, pelaporan dengan cara kunjungan langsung ke sarana pelayanan lebih efektif untuk meningkatkan jumlah pelaporan KTD ESO	monitoring pelaporan dengan metode kunjungan langsung akan dilakukan di tahun berikutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target Tahunan : 26%

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Kesesuaian Pengambilan Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Kesesuaian Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Petunjuk Tindak Lanjut Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum sele	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		85,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	25,00	78,33	Beberapa sampel T	Akan dilakukan TL di TW 4 terutama sampel fortifikasi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		85,00	100,00	95,83	100,00	100,00	39,58	33,33	79,79	Sampel TMS belum ditindaklanjuti	Akan dilakukan Tindak lanjut pada tW 4
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		85,00	100,00	97,76	100,00	100,00	39,22	98,89	99,25	Masih ada sampel yang belum ditindaklanjuti	Akan dilakukan Tindak lanjut pada tW 4
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		85,00	100,00	94,23	100,00	100,00	40,38	100,00	92,88	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target Tahunan : 85%

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	100	-	-	-
Februari	100	-	-	-
Maret	100	-	Kesibukan proses penanganan dugaan keracunan oleh DKK, menyebabkan pendalaman informasi keracunan makanan belum dapat dilakukan secara optimal	Intens koordinasi dengan pihak DKK Kabupaten Karanganyar
April	100	-	1. Informasi keracunan didapatkan setelah kejadian keracunan / KLB selesai ditangani 2. Dokumen berupa laporan detil kejadian keracunan / KLB belum dapat didapatkaan secara utuh, sehingga proses pelaporan di SPIMKER mengalami hambatan 3. Tim dari Balai POM di Surakarta belum dapat terlibat secara langsung pada saat kejadian keracunan / KLB, hal ini diduga karena Tim dari Balai POM di Surakarta belum mendapatkan peran khusus di dalam setiap penanganan keracunan / KLB di kabupaten/kota.	Untuk kendala pada point 1, 2, dan 3: 1. Perlu membangun komunikasi yang intensif dengan DKK masing - masing Kabupaten dan Kota dimulai dari DKK Kabupaten Karanganyar terkait penanganan keracunan / KLB 2. Berdiskusi dengan DKK terkait penanganan keracunan, dimulai dari DKK Kabupaten Karanganyar tentang usulan peran Tim dari Balai POM di Surakarta pada setiap kejadi keracunan/KLB
Mei	100	-	Pengambilan komitmen belum masuk ke satgas tim klb sharing ke tim klb apa yang diperlukan. Perlu membangun hubungan yang bagus dan sinergis. Mungkin yang perlu dipastikan ke pusat posisinya ada dimana bargaining positionnya, apakah laporan KLB penanggungjawabannya mengenai KLB itu apakah di BPOM. Puskesmas belum terlalu paham mengenai KLB. Perlu adanya refreshment KLB dan mendapatkan materi dengan berkoordinasi ke	Intens koordinasi dengan pihak DKK di Kabupaten/Kota
Juni	100	-	- Sudah dilakukan pertemuan secara daring : Persamaan Persepsi IKSK "Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT", yang difasilitasi Ditwas Peredaran Pangan Olahan. Pertemuan ini diikuti seluruh UPT BPOM dan unit pengampu. Hal yang berkaitan dengan penanganan KLB di BPOM Surakarta adalah terkait BPOM Surakarta tidak melakukan pengujian sampel KLB. Hal serupa terjadi di UPT BBPOM di Yogyakarta. Feedback dari unit pengampu: untuk pengujian KLB yang dilakukan di Lab lain misal Labkesda tidak bisa diklaim BPOM di Surakarta	- Telah disampaikan bahwa sampel KLB tidak masuk ke UPT. Untuk perhitungan apabila tidak tercapai dikarenakan tidak masuk sampel maka hasil dianggap 100 persen. - Pertemuan KLB yang sudah dilangsungkan adalah di Bandung dan dilakukan di BBPOM Bandung karena memngkinkan tempatnya.
Juli	100	0	Sulit untuk menentukan : 1. Masih sulit untuk menentukan penetapan kejadian KLB, seperti kasus dugaan keracunan di Sragen pada akhir Juli 2025	1. Sudah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penanganan KLB Keracunan Pangan di Yogyakarta pada 09 - 11 Juli 2025. Point penting yang perlu dicatat : a. Permasalahan utama terdapat UPT BPOM blm dapat terlibat langsung pada saat kejadian KLP KP, adalah pembentukan Tim TGC di daerah (Kabupaten/Kota) dilakukan sesuai kebutuhan dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai tanggapan Direktur Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit,
Agustus	100	0	Informasi keracunan pangan atau KLB KP masih selalu terlambat	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait
September	100	0	Informasi keracunan pangan atau KLB KP masih selalu terlambat	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait
Oktober	100	0	Informasi keracunan pangan atau KLB KP masih selalu terlambat	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait
November	100	0	Tidak ada kendala	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait
Desember	100	0	Tidak ada kendala	Mengusahakan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait

Target Tahunan : 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Kelengkapan pengambilan sampel/pot (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 15%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00		
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	Monitoring hasil uji di SIPT
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	Monitoring hasil uji di SIPT
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	sisa sampel tetap harus disampling di bulan selanjutnya menyebabkan kelepalan waktu pengambilan sampel tidak sesuai	Monitoring hasil uji di SIPT
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	Monitoring hasil uji di SIPT
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	5 sampel PIRT sebagai target BPOM di Surakarta telah selesai uji
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan ke BBPOM Semarang atas hasil uji TMS sampel Dodol
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan ke BBPOM Semarang atas hasil uji TMS sampel Dodol
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan ke BBPOM Semarang atas hasil uji TMS sampel Dodol
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	monitoring surat tindaklanjut sampel pirt dari upt lain
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	monitoring surat tindaklanjut sampel pirt dari upt lain
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	85.00	100.00	100.00	100.00	60.00	20.00	100.00	88.00	tidak ada kendala	selesai

Target Tahunan : 85%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Januari	100,00	100,00	0,00	100,00		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Februari	100,00	100,00	0,00	100,00		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Maret	100,00	100,00	0,00	100,00	Pehitungan Komponen B : Dep I rekomendasi	- Koordinasi dengan Biro perencanaan dan keuangan - pengisian data dan upload
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	April	100,00	100,00	0,00	100,00	kendala pengumpulan informasi tindaklanjut/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha	permintaan update informasi dari pic masing-masing kedeputian kepada petugas secara berkala
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Mei	100,00	100,00	0,00	100,00	Terdapat APJ yang kurang kooperatif	pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juni	100,00	100,00	0,00	100,00	Tidak ada	-
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juli	100,00	100,00	0,00	100,00	terdapat sarana yang belum menindaklanjuti CAPA mendekati timeline	Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Agustus	100,00	100,00	0,00	100,00	Tidak ada	-
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	September	100,00	100,00	0,00	100,00	Tidak ada	-
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	100,00	100,00	0,00	100,00	-	Monitoring secara berkala feedback tindak lanjut kepada pelaku usaha melalui *Last of U/s*
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	100,00	100,00	0,00	100,00	-	- Monitoring secara berkala feedback tindak lanjut dari pelaku usaha melalui *Last of U/s* - Pengembangan menu *last of us* antara lain terkait dashboard pengawasan dan penambahan notifikasi warna untuk timeline

Target Tahunan : 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama indikator	Bulan	Target indikator	% Sampai Obat	% Sampai OBA	% Sampai OK	% Sampai kosmetik	% Sampai SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	84,00	-	100,00	-	100,00	100,00		
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	84,00	-	87,50	-	100,00	93,75	Terdapat beberapa surat dari Ditwas OTSk terkait pemeriksaan sarana yang yang tidak dapat ditindaklanjuti karena efisiensi anggaran	Koordinasi dengan unit pengampu terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana yang belum dapat dilaksanakan
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	84,00	-	87,50	-	100,00	93,75	Pembukaan blokir anggaran DIC	Penyusunan kembali renlak sesuai target awal tahun 2025
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	84,00	-	102,08	-	91,67	96,88	Pelaksanaan pemeriksaan UKOT melebihi target karena menindaklanjuti dari surat Deputi Bidang Pengawasan OTSK Kosmetik	Monitoring pelaksaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	84,00	-	95,00	-	95,00	95,00	Belum ada kendala	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	84,00	-	95,83	-	95,00	95,42	Belum terdapat inspektur CPOTB untuk pemeriksaan di IOT, yang di BPOM Surakarta hanya terdapat inspektur OT SK yang bisa memeriksa UKOT	Bersurat ke DitWasOTSK untuk permohonan bantuan personil dalam rangka pemeriksaan IOT dan Industri SK
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	84,00	-	96,43	-	96,43	96,43	Belum ada kendala	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	90,33	-	96,88	-	96,43	96,66	Belum ada kendala	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	90,33	-	97,22	-	93,75	95,49	Belum ada kendala	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	90,33	-	97,50	-	95,45	96,48	Belum ada kendala	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	90,33	-	94,23	100,00	95,45	96,56	Belum ada kendala	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	90,33	-	94,23	100,00	95,83	96,69	Belum terdapat kendala	Monitoring renlak secara berkala

Target Tahunan : 90,33%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Rusa	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa (hasil entry)	jumlah sarana yang diperiksa	% Kelayakan Hasil	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan hasil	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelayakan Hasil Jenis	Jumlah sarana yang ditarikan grading dengan hasil	jumlah sarana yang diperiksa	% Realisasi Kelayakan (Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	91,00	2,00	2,00	100,00	1,00	2,00	50,00	2,00	2,00	100,00	91,75	Merusa IKU masih dalam pemahaman Unit pengampu	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	91,00	4,00	4,00	100,00	3,00	4,00	75,00	4,00	4,00	100,00	91,67	Merusa IKU masih dalam pemahaman Unit pengampu	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	91,00	4,00	4,00	100,00	3,00	4,00	75,00	4,00	4,00	100,00	91,67	Merusa IKU masih dalam pemahaman Unit pengampu	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	91,00	8,00	8,00	100,00	7,00	8,00	87,50	8,00	8,00	100,00	90,91		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	91,00	16,00	16,00	100,00	15,00	16,00	93,75	16,00	16,00	100,00	97,30		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	91,00	23,00	23,00	100,00	22,00	23,00	95,65	23,00	23,00	100,00	96,00		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	91,00	27,00	27,00	100,00	26,00	27,00	96,30	27,00	27,00	100,00	96,77		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	91,00	20,00	20,00	100,00	19,00	20,00	95,00	20,00	20,00	100,00	95,65		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	91,00	36,00	36,00	100,00	37,00	36,00	97,37	36,00	36,00	100,00	99,12		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	91,00	44,00	44,00	100,00	47,00	44,00	95,74	44,00	44,00	100,00	96,52		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	91,00	48,00	52,00	92,31	52,00	52,00	100,00	52,00	52,00	100,00	97,44		Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	91,00	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	98,73		

Target Tahunan : 91%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	95.00	75.00	100.00	100.00	100.00	93.75
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	95.00	75.00	100.00	100.00	100.00	93.75
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	95.00	75.00	100.00	100.00	100.00	93.75
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	95.00	92.19	100.00	112.50	100.00	101.17
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	95.00	95.37	100.00	108.33	100.00	100.93
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	95.00	96.71	95.00	100.00	100.00	97.93
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	95.00	97.45	100.00	100.00	100.00	99.36
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	95.00	97.03	100.00	100.00	100.00	99.26
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	95.00	97.43	100.00	100.00	100.00	99.36
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	95.00	97.73	98.96	100.00	100.00	99.17
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	95.00	97.35	99.04	100.00	98.57	98.74
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	95.00	96.59	97.22	100.00	98.68	98.12

Target Tahunan : 95%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Rencana	% Pencapaian Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Kelayakan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pencapaian Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Serapan PD	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	3	3	3	20.00	3	3	70.00	0	3	0.00	90.00		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	3	3	3	20.00	3	3	70.00	0	3	0.00	90.00		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	4	4	4	20.00	4	4	70.00	0	3	0.00	90.00		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	10	10	10	20.00	10	10	70.00	6	10	6.00	96.00	Belum ada kendala	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renbik yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	16	16	16	20.00	16	16	70.00	12	16	7.50	97.50	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	21	21	21	20.00	21	21	70.00	17	21	8.10	98.10	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80	25	25	20.00	25	25	70.00	21	25	8.40	98.40	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	91	30	30	20.00	30	30	70.00	26	30	8.67	98.67	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	91	36	36	20.00	36	36	70.00	32	36	8.89	98.89	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	91	43	43	20.00	43	43	70.00	39	43	9.07	99.07	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	91	47	47	20.00	47	47	70.00	43	47	9.15	99.15	Belum ada kendala	Monitoring Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	91	47	47	20.00	47	47	70.00	43	47	9.15	99.15		

Target Tahunan : 91%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SK dan PO	Kendala	Rencana Tindak lanjut
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	84,4	100,00	100,00	83,33	100,00	0,00	76,67	Pengawasan iklan pangan baru akan dilaksanakan pada bulan Maret sesuai renlak	Dilakukan pengawasan sesuai renlak
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	84,4	100,00	100,00	85,24	83,33	0,00	77,71	Pengawasan iklan pangan baru akan dilaksanakan pada bulan Maret sesuai renlak	Dilakukan pengawasan sesuai renlak
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	84,4	100,00	100,00	95,65	91,67	100,00	97,46	Rata-rata pelaksanaan iklan sesuai dengan renlak yang telah disusun sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan	1. Dilakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	84,4	100,00	99,54	95,83	93,94	100,00	97,85	1. Pengawasan iklan tidak sesuai dengan media yang telah ditetapkan dalam renlak 2. Pelaporan iklan sediaan farmasi	1. Media iklan yang belum tercapai akan diganti pada bulan berikutnya 2. Melakukan monitoring iklan setiap bulan, termasuk timeline pengiriman
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	84,4	100,00	99,77	94,25	95,24	100,00	97,85	Terdapat iklan yang diawasi tidak sesuai dengan media yang telah ditetapkan dalam renlak	1. Media iklan yang belum tercapai akan disesuaikan pada bulan berikutnya 2. Melakukan monitoring iklan setiap bulan
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	84,4	100,00	99,88	95,28	96,09	100,00	98,24	Terdapat iklan yang diawasi tidak sesuai dengan media yang telah ditetapkan dalam renlak	1. Mengajukan permohonan perubahan renlak iklan OBA dan Kosmetik 2. Melakukan monitoring iklan setiap bulan
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	84,4	100,00	99,88	95,56	96,67	99,62	98,34	Pelaksanaan iklan telah sesuai renlak	1. Telah dilakukan perubahan renlak iklan OBA dan Kosmetik 2. Melakukan monitoring iklan setiap
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	88,8	100,00	100,14	97,12	97,10	99,83	98,84	1. Pengawasan iklan kosmetik melebihi target bulan Agustus (1 iklan kosmetik online) 2. Tidak mendapatkan iklan OK penyiaran lokal sehingga tidak tercapai 1 iklan OK pada bulan Agustus	Akan dilakukan penyesuaian renlak pada TW berikutnya
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	88,8	100,00	99,72	97,40	96,10	99,78	98,60	Tidak mendapatkan iklan SK domain website sehingga tidak tercapai 1 iklan SK pada bulan September	Akan dilakukan penyesuaian renlak pada TW berikutnya
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	88,8	100,00	99,74	97,24	96,51	99,73	98,65	Tidak ada kendala pada bulan Oktober seluruh pengawasan iklan dapat dilaksanakan sesuai renlak dan diperoleh iklan sesuai media iklan yang ditetapkan	Dilaksanakan monitoring pelaksanaan pengawasan iklan rutin setiap bulan
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	88,8	100,00	99,75	95,66	94,76	99,70	97,98	2 iklan OBA tidak sesuai renlak, seharusnya media lain namun tidak diperoleh sehingga diganti e-commerce	Monitoring iklan rutin
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	88,8	100,00	100,00	95,33	95,24	100,00	98,11	Pada media penyiaran lokal hanya tersedia iklan OBA, tidak ditemukan iklan OK dan SK sehingga target penyiaran lokal untuk OK dan SK dialihkan ke media cetak	Disampaikan ke deputi pengampu untuk renlak tahun 2026 pada media penyiaran lokal dikhususkan hanya untuk komoditi OBA dan dihapuskan untuk komoditi OK dan Sk

Target Tahunan : 88.8%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Januari		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Februari		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Maret		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	April		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Mei		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Juni		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Juli		-	-	-
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Agustus	80.00	100.00	72.92	86.46
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	September	80.00	100.00	73.15	86.57
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Oktober	80.00	100.00	65.83	82.92
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	November	80.00	100.00	68.94	84.47
Balai POM di Surakarta	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekt	Desember	80.00	100.00	63.19	81.60

Target Tahunan : 80%

HASIL PENGAWASAN LABEL UPT BPOM TAHUN 2025

BALAI POM

No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator
1	BPOM AMBON	100,0%	77,08%	91,0%	88,5%
2	BPOM BATAM	100,0%	79,17%	91,0%	[illegible]
3	BPOM BENGKULU	100,0%	73,61%	90,0%	86,8%
4	BPOM BOGOR	100,0%	50,00%	80,0%	75,0%
5	BPOM JAMBI	100,0%	87,50%	91,0%	93,8%
6	BPOM JEMBER	100,0%	94,44%	91,0%	97,2%
7	BPOM KENDARI	100,0%	72,22%	80,0%	86,1%
8	BPOM KEDIRI	100,0%	79,86%	91,0%	89,9%
9	BPOM MAMUJU	100,0%	72,92%	80,0%	86,5%
10	BPOM MANOKWARI	100,0%	84,03%	85,0%	92,0%
11	BPOM PALOPO	100,0%	84,03%	90,0%	92,0%
12	BPOM PALU	100,0%	77,78%	90,0%	88,9%
13	BPOM PANGKAL PINANG	100,0%	68,06%	80,0%	84,0%
14	BPOM PAYAKUMBUH	100,0%	90,97%	91,0%	95,5%
15	BPOM SOFIFI	100,0%	75,00%	90,0%	87,5%
16	BPOM SURAKARTA	100,0%	63,19%	80,0%	81,6%
17	BPOM TANGERANG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	BPOM TASIKMALAYA	100,0%	79,86%	80,0%	89,9%
19	BPOM TARAKAN	100,0%	89,58%	91,0%	94,8%
20	BPOM BALIKPAPAN	100,0%	66,67%	80,0%	83,3%
21	BPOM BAUBAU	100,0%	100,00%	91,0%	100,0%
22	BPOM DUMAI	100,0%	96,43%	90,0%	98,2%
23	BPOM TANJUNG BALAI	100,0%	90,48%	80,0%	95,2%
24	BPOM BANYUMAS	100,0%	66,67%	84,0%	83,3%
25	BPOM BIMA	100,0%	91,67%	90,0%	95,8%
26	BPOM ENDE	100,0%	75,00%	80,0%	87,5%
27	BPOM INDRAGIRI HULU	100,0%	91,67%	80,0%	95,8%
28	BPOM SANGGAU	100,0%	93,02%	91,0%	96,5%
29	BPOM TABALONG	100,0%	80,95%	91,0%	90,5%
30	BPOM TULANGBAWANG	100,0%	75,00%	80,0%	87,5%

Rata-Rata Realisasi Jumlah : 100%
Rata-Rata ketepatan waktu pelaporan: 80,3%
Rata-Rata Realisasi Indikator: 90,1%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	April	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Agustus	100	-	-	-	-	-	Tidak ada kendala	Merupakan IKU baru di tahun 2025 mulai pengisian RHPK pada bulan agustus
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	100	-	-	-	-	-	Tidak ada kendala	Merupakan IKU baru di tahun 2025 realisasi dan capaian dapat diperoleh pada saat akhir tahun TW IV
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Oktober	100	-	-	-	-	-	1. Pada saat entry pelaporan SIPT ,Penggunaan tools Antibiotik di perhatikan (Pada TW 3 dari 10 yang terperiksa 8 sarana yang menggunakan tools AB sesuai pedoman)	Follow up terkait advokasi penerbitan Surat Edaran Kabupaten Karanganyar.
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	November	100	-	-	-	-	-	1.Pelaporan kegiatan AMR secara rutin termasuk Bimtek dan KIE 2. Join inspeksi pengendalian AMR sektor hewan belum terlaksana	Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan join inspeksi bersama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karanganyar
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Desember	100.00	121.09	100.00	100.00	100.00	105.27	Tidak ada kendala	-

Target Tahunan : 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
-	-	Masih menggunakan target tahunan belum dibreakdown per	Merencanakan peubahan RAPK untuk dibreakdown per
-	-	Masih menggunakan target tahunan belum dibreakdown per	Merencanakan peubahan RAPK untuk dibreakdown per
-	-	Masih menggunakan target tahunan belum dibreakdown per bulan	Merencanakan peubahan RAPK untuk dibreakdown per bulan
4,02	4,02	1. Pengadaan reagen media sementara penyusunan spesifikasi oleh tim 2. Melakukan koordinasi presentasi alat lab disintegration kepada penyedia dan komunikasi intens via phone dan wa 3. Menunggu Surat ijin import keluar dan surat blokir anggaran	1. Mempercepat proses pengadaan reagen media oleh tim 2. Mempercepat proses pengadaan dengan penyedia alat laboratorium oleh tim 3. Membuat kajian pemilihan alat laboratorium
4,02	4,02	1. Pengadaan reagen media sementara penyusunan spesifikasi oleh tim 2. Melakukan koordinasi presentasi alat lab disintegration	1. Mempercepat proses pengadaan reagen media oleh tim 2. Mempercepat proses pengadaan dengan
11	11,88	1. Pengadaan reagen media sementara penyusunan spesifikasi oleh tim 2. Kurangnya fast respon dari penyedia guna melakukan koordinasi presentasi alat lab 3. Belum terlaksanya verifikasi metode kimia dan mikrobiologi	1. Mempercepat proses pengadaan reagen media oleh tim 2. Mempercepat proses pengadaan dengan penyedia alat laboratorium oleh tim
11	11,88	1. Pengadaan semua reagen media belum semua dilaksanakan 2. Pengadaani alat lab masih kurang 3 item 3. Belum semua terlaksanya verifikasi metode kimia dan mikrobiologi	1. Mempercepat proses pengadaan reagen media oleh tim 2. Mempercepat proses pengadaan dengan penyedia alat laboratorium oleh tim 3. Melaksanakan verifikasi metode
11	11,88	1. Pengadaan semua reagen media belum semua dilaksanakan	1. Mempercepat proses pengadaan reagen media oleh tim
12	12,66	1. Pengadaan mikroskop terkendala pada saat proses pencairan anggaran karena ada perbedaan nama bank	1. Melakukan proses pengadaan pengadaan test kit dan reagen media tahap 2
12	12,66	Pengadaan mikroskop terkendala pada saat proses pencairan anggaran karena	1. Pengadaan optimalisasi paket reagen kimia dan mikro
12	12,66	Alat Laboratorium sementara proses kontrak pembelian alat membran filter, vaccum	1. Pengadaan optimalisasi paket reagen kimia dan mikro
14	14,32	Tidak ada kendala yang signifikan semua proses pengadaan dapat diselesaika	1. Telah dilaksanakan studi tiru ke BBPOM di Yogyakarta dan BPSMB

Target Tahunan : 14%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Januari	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Februari	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Maret	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	April	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Mei	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Juni	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Juli	-	-	-	-	-	-
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	Agustus	20.00	0	5.00	0	Belum ada kendala	Merupakan IKU baru di tahun 2025 dan mulai pengisian RHPK pada bulan agustus
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten	September	20.00	0	5.00	0	Belum ada kendala	Merupakan IKU baru di tahun 2025 realisais dan capaian dapat diperoleh pada akhir tahun TW IV
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Oktober	20.00	0	5.00	0	Diperlukan koordinasi intensif dengan Pemda dalam rangka pengisian penilaian mandiri	pendampingan selanjutnya akan dilakukan jika lolos seleksi penilaian (menunggu hasil penilaian dari pusat)
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	November	20.00	0	5.00	0	Belum ada kendala	telah dilakukan pendampingan di kota surakarta dalam rangka pengajuan sanggah thd penilaian hasil verifikasi dari tim penilai pusat.
30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Desember	20.00	1.00	5.00	20.00	Belum ada kendala	dilakukan juga pendampingan dalam rangka persiapan wawancara dan verifikasi lapang secara online (kota Surakarta masuk nominasi)

Target Tahunan : 20%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Cakupan Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Januari	0	0	27	0,00	Menunggu data target RO dengan dasar pengampu dan Rorsi	Menunggu arahan awal
Persentase Cakupan Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	Februari	1	1	27	3,70	Tidak ada kendala	Penyusunan rencana pemeriksaan sarana fortifikasi
Persentase Cakupan Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	Maret	0	1	27	3,70	Menunggu konfirmasi dari pusat terkait jumlah sampel, sarana pengambilan sampel harus diperiksa pemeriksaan sarana	Penyusunan rencana pemeriksaan sarana produksi fortifikasi tahun (tadalah buka blow)
Persentase Cakupan Sarana	April	0	3	27	11,11	Tidak ada kendala	Pemeriksaan sarprod pada bulan Mei sesuai rencana sebanyak 3 sarana
Persentase Cakupan Sarana	Mei	3	9	27	33,33	Tidak ada kendala	Memaksimalkan personil dalam melakukan pemeriksaan sarprod fortifikasi dengan melibatkan personil PI selain QI dalam pemeriksaan sarprod fortifikasi. Pemeriksaan sarprod pada bulan Juni sesuai rencana sebanyak 4 sarana
Persentase Cakupan Sarana	Juni	4	10	27	37,04	Beberapa sarana produksi fortifikasi didukung tutup (sementara) tanpa menyertakan lampiran pengujian pencemaran ari ke Balai POM	Pemeriksaan sarprod pada bulan Juli sesuai rencana sebanyak 4 sarana
Persentase Cakupan Sarana	Juli	4	14	27	51,85	Beberapa sarana produksi fortifikasi didukung tutup (tutup pemanen) tanpa menyertakan pemeriksaan ari ke Balai POM Terdapat satu sarana produksi mempunyai 2 nama yang berbeda sehingga dihitung rancu	Pemeriksaan sarprod pada bulan Agustus sesuai rencana sebanyak 4 sarana. Updating data sarana fortifikasi BPOM Surakarta untuk disesikan database kanan produksi fortifikasi yang aktif
Persentase Cakupan Sarana	Agustus	4	18	27	66,67	Beberapa sarana produksi fortifikasi didukung tutup tutup pemanen) tanpa menyertakan pemeriksaan ari ke Balai POM	Updating database sarana produksi fortifikasi yang masih aktif sebagai acuan database pemeriksaan sarana tahun 2025
Persentase Cakupan Sarana	September	0	18	27	66,67	Beberapa sarana produksi pangan fortifikasi tutup, sehingga mengurangi jumlah database jumlah sarana produksi pangan fortifikasi	Updating database sarana fortifikasi untuk pemeriksaan 2026 Melakukan tindak lanjut berupa pemberian terhadap produksi hasil pengujian TMS uji fortifikasi sesuai SE Nomor
Persentase Cakupan Sarana	Oktober	0	18	27	66,67	Beberapa sarana produksi pangan fortifikasi tutup, sehingga mengurangi jumlah database jumlah sarana produksi pangan fortifikasi	Updating database sarana fortifikasi untuk pemeriksaan 2026 Melakukan tindak lanjut berupa pemberian terhadap produksi hasil pengujian TMS uji fortifikasi sesuai SE Nomor HK.02.02.01.pk.20.04 Tahun 2020 tentang pengawasan pangan fortifikasi di sarana
Persentase Cakupan Sarana	November	0	18	27	66,67	Beberapa sarana produksi pangan fortifikasi tutup, sehingga mengurangi jumlah database jumlah sarana produksi pangan fortifikasi	Updating database sarana fortifikasi untuk pemeriksaan 2026 Melakukan tindak lanjut berupa pemberian terhadap produksi hasil pengujian TMS uji fortifikasi sesuai SE Nomor
Persentase Cakupan Sarana	Desember	0	18	27	66,67	Beberapa sarana produksi pangan fortifikasi tutup, sehingga mengurangi jumlah database jumlah sarana produksi pangan fortifikasi	Menyusun rencana pemeriksaan sarprod 2026 sambil menunggu data target pemeriksaan sarprod fortif tahun 2026

Target Tahunan : 67%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
-	-	Kuesioner 2025 berubah	Mempelajari kuesioner dan menetapkan target responden
-	-	1. Kuesioner 2025 berubah dan tidak dapat dimonitor secara real-	1. Melakukan survei efektivitas KIE untuk 2 jenis survei sekaligus
86,94	87,33	1. Pada Maret 2025 tidak ada realisasi KIE Langsung/Tatap Muka DIPA dan Non DIPA	1. Melakukan KIE Langsung/Tatap Muka sesuai POA 2025
86,94	87,33	1. Keterbatasan anggaran KIE PJAS Aman dan Edukasi Stunting 2. Keterbatasan personil yang mampu mendesain konten	1. Keterbatasan anggaran perjadin KIE, kolaborasi dengan fungsi lain 2. Penjadwalan publikasi medsos
86,94	87,33	Informasi pelaksanaan KIE pada Diklat SPPI Batch 3 berubah-ubah	1. Pemetaan pemahaman materi instruktur SPPI dari Balai POM di Surakarta 2. Penyusunan dan pembekalan tim instruktur SPPI Balai POM di
86,94	87,48	Pada saat pelaksanaan diklat SPPI terdapat beberapa kendala teknis antara lain: soundsystem dan koneksi internet yang kurang memadai, durasi diklat yang singkat dan jenis kelas yang tidak	Menyampaikan monev kepada pengampu untuk menjadi bahas diskusi atau perbaikan berikutnya
86,94	87,48	1. Belum dilaksanakan kembali KIE DIPA karena personil masih mengejar target Pro PN di semester I Tahun 2025 2. Kewajiban mengikuti stand pameran public service expo 2025 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Surakarta namun tidak ada anggaran untuk KIE Pameran	1. Akan dilaksanakan KIE DIPA dengan tema pangan olahan dan stunting di SMKN 1 Wonogiri 2. Mengikuti KIE Pameran Public Service Expo 2025 "MPP Goes to Mall" tanggal 7--10 Agustus 2025 di Solo Square dengan sarpras minimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki
86,94	87,48	1. Tidak tersedianya anggaran pameran dan keterbatasan petugas jaga	1. Kolaborasi anggaran pengujian dan penambahan petugas dari bagian sertifikasi
86,94	87,4	Keterbatasan anggaran KIE	KIE Kosmetik Aman bekerja sama dengan FIK UMS yang telah memiliki MOU dengan Balai POM di Surakarta
86,94	87,4	1. Keterbatasan anggaran KIE 2. Rekomendasi: KIE Tatap Muka DIPA bulan November 2025	1. KIE AMR bekerja sama dengan Puskesmas Karanganyar 2. Bekerja sama dengan PKM
86,94	87,4	Keterbatasan anggaran KIE	KIE Stunting bekerja sama dengan Puskesmas Purwosari
86,94	87,4	1. Keterbatasan anggaran KIE 2. Keterbatasan anggaran publikasi 3. Publikasi yang bersifat edukasi belum mencantumkan logo kataBPOM	1. Transport petugas tidak dipertanggungjawabkan 2. Tiga target publikasi yang belum tercapai dialihkan ke publikasi media whatsapp blast

Target Tahunan : 86.94

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		Perlu penyesuaian kembali breakdown target bulanan pada RAPK dan RPD karena adanya perubahan tahapan dan timeline yang cukup signifikan dengan adanya efisiensi anggaran.	Melakukan penyesuaian kembali breakdown target bulanan pada RAPK dan RPD karena adanya perubahan tahapan dan timeline yang cukup signifikan dengan adanya efisiensi anggaran.
Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		Terdapat efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sehingga perlu perencanaan kembali tahapan kegiatan.	1. Penyesuaian RPD berdasarkan tahapan dan anggaran terbaru. 2. Persiapan advokasi program Keterpaduan Keamanan Pangan. 3. Persiapan pengadaan paket edukasi dan perlengkapan peserta untuk kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah.
Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	15	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00		Belum mendapat konfirmasi atas permohonan audiensi dengan Bupati Wonogiri karena padatnya jadwal Bupati setelah dilantik dan selama bulan Ramadan. Hal tersebut menyebabkan rencana pelaksanaan forum advokasi keterpaduan keamanan pangan tidak dapat dipastikan.	1. Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan 2. Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring dengan peserta sekolah target intervensi dan sekolah pertukaran
Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	45	25.00	15.00	5.00	0.00	0.00	45.00		Perubahan jadwal Sekda pada hari H pelaksanaan Advokasi karena ada rapat dengan Bupati sehingga panitia harus mengubah rundown kegiatan agar Sekda tetap dapat hadir	1. Menyelesaikan laporan advokasi program Keterpaduan Keamanan Pangan 2. Menyelesaikan laporan sosialisasi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 3. Melaksanakan Bimtek untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
Balai POM di Surakarta	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	65	25.00	20.00	20.00	0.00	0.00	65.00			1. Menyusun laporan Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah 2. Mengupload laporan di linktr.ee/PJAS2025 dan aplikasi siacsapa.pom.go.id 3. Mendampingi kader dalam melaksanakan intervensi keamanan pangan di komunitas sekolah
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Juni	75	25.00	20.00	25.00	5.00	0.00	75.00		Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan Monitoring dan
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Juli	90	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00	90.00		Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan Monev Program Sekolah
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Agustus	95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00		Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan pengawalan sekolah yang
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	September	95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00		Tidak ada kendala berarti.	Pendampingan kader dalam
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Oktober	100	25.00	20.00	25.00	25.00	5.00	100.00		Adanya arahan dari pusat untuk	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	November	100	25.00	20.00	25.00	25.00	5.00	100.00		Adanya arahan dari pusat untuk	-
Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Desember	5	25.00	20.00	25.00	25.00	5	100.00	5	Tidak ada kendala karena seluruh	-

Target Tahunan : 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Jumlah desa pangan aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	2.00	2.00					2.00		Anggaran untuk melakukan intervensi ke desa di Wonogiri tahun 2025 terbatas sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran	Exercise dan perencanaan pelaksanaan tahapan kegiatan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5.00	5.00					5.00		1. Belum ada realisasi dari rencana aksi mandiri keamanan pangan Desa Sukorejo yang diintervensi tahun 2024	1. Berkoordinasi secara intens via WAG dengan Kepala Desa, TKPD dan KKPD Desa Sukorejo 2. Efisiensi personil petugas dan
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	15.00	10.00	5.00				15.00		1. Belum mendapat konfirmasi atas permohonan audiensi dengan Bupati Wonogiri karena padatnya jadwal Bupati setelah dilantik dan	1. Mengajukan permohonan audiensi ke Sekda Wonogiri dan mengajukan permohonan tanggal advokasi
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	42.00	20.00	20.00			2.00	42.00		1. Jadwal Sekda pada hari H bersamaan dengan rapat mendadak dengan Bupati 2. Pengadaan kaos kader belum dapat dilakukan	1. Perubahan rundown acara kegiatan agar advokasi tetap dapat dihadiri Sekda 2. Pengadaan kaos bersamaan dengan pengadaan kaos kader sekolah dan pasar untuk
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	57.00	25.00	25.00	5.00		2.00	57.00		1. Adanya perubahan juknis bimtek komunitas tahun 2025 dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran	1. Penyesuaian kegiatan berdasarkan juknis terbaru 2. Materi untuk semua komunitas disamakan. Khusus IRTP akan
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	77.00	25.00	25.00	20.00	5.00	2.00	77.00		Pada penyelenggaraan bimtek komunitas dan persiapan monev, tidak ada kendala yang berarti. Namun pada saat bimtek, UPT tidak dapat menghadirkan narasumber dari linsek terkait untuk	Mengundang linsek terkait saat monev program desa pangan agar dapat melakukan fasilitasi pendampingan PIRT dan SLHS di Desa Singodutan
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	92.00	25.00	25.00	20.00	20.00	2.00	92.00		Pemerintah Desa kesulitan menyusun rencana aksi mandiri program keamanan pangan tahun 2026	Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	96.00	25.00	25.00	20.00	20.00	6.00	96.00		1. Kesibukan TKPD dan KKPD di bulan Agustus 2025 karena banyaknya kegiatan desa dalam rangka HUT RI 2. Data dukung implementasi/pelaksanaan rencana	1. Penjadwalan pengawalan setelah tanggal 17 Agustus 2025 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	98.00	25.00	25.00	20.00	20.00	8.00	98.00		Data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa masih belum rapi	Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa melalui whatsapp
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00		Data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa masih belum rapi	Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa melalui whatsapp
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00		Tahapan program telah selesai pada Oktober 2025	Tahapan program telah selesai pada Oktober 2025
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	1	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	1		Tahapan program telah selesai pada Oktober 2025	Tahapan program telah selesai pada Oktober 2025

Target Tahunan : 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen	Bimtek dan Penyuluh	Sosialisasi Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis	Kendala	RTL
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	2	2	0	0	0	0	2		Perlu penyesuaian kembali breakdown target bulanan pada RAPK dan RPD karena adanya perubahan tahapan dan timeline yang cukup signifikan dengan adanya efisiensi anggaran	Pemilihan lokus pasar juga mempertimbangkan jarak tempuh
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	5	5	0	0	0	0	5		Terdapat efisiensi anggaran,yang mempengaruhi tahapan pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi pemilihan lokus. Selain itu, juga menyita waktu petugas untuk menyesuaikan perencanaan yang telah dibuat.	Penyesuaian RPD berdasarkan tahapan terbaru
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	10	0	0	0	0	10		1. Belum mendapat konfirmasi atas permohonan audiensi dengan Bupati Wonogiri karena padatnya jadwal Bupati setelah dilantik dan selama bulan Ramadan. Hal tersebut menyebabkan rencana pelaksanaan forum advokasi keterpaduan keamanan pangan tidak dapat dipastikan. 2. Terdapat keterbatasan anggaran	1. Mengajukan permohonan audiensi ke Sekda Wonogiri dan mengajukan permohonan tanggal advokasi 2. Pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran program lain
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25	0	0	0	0	25		Perubahan jadwal Sekda pada hari H pelaksanaan Advokasi karena ada rapat dengan Bupati sehingga panitia harus mengubah rundown kegiatan agar Sekda tetap dapat hadir	1. Perubahan rundown acara kegiatan agar advokasi tetap dapat dihadiri oleh Sekda 2. Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan dalam rangka PPABK 3. Pendataan tim pengelola pasar
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	42	25	5	10	0	2	42		1. Pelaksanaan kegiatan bimtek dan monev keberlanjutan dalam waktu yang berdekatan 2. Belum ada nama yang disampaikan sebagai tim pengelola pasar dari Dinas Pertanian 3. Terdapat perubahan rencana pengadaan produk informasi	1. Pembagian tugas setiap personal dilakukan secara detail dan disampaikan jauh-jauh hari 2. Follow up permintaan data tim pengelola pasar kepada Dinas Pertanian 3. Melakukan perencanaan pengadaan untuk menggantikan produk informasi yang tidak dapat diadakan.
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	72	25	25	16	3	10	79		1. Belum ada nama yang disampaikan sebagai tim pengelola pasar dari Dinas Pertanian hingga kegiatan berlangsung 2. Terdapat kesalahan persepsi terkait perwakilan undangan ketika bimtek dan penyuluhan komunitas 3. Belum disepakatinya jadwal pengawasan PPABK dengan tim pengelola pasar krisak.	1. Follow up permintaan data tim pengelola pasar kepada Dinas Pertanian untuk mengikuti kegiatan pengawalan 2. Penjelasan bahwa undangan terbatas 3. Koordinasi terkait jadwal pengawasan
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	99	25	25	20	20	10	100		Tidak ada	Pencairan honor tim pengelola pasar dengan dasar laporan pengawasan yang telah dilaksanakan pada Juli 2025
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25	25	20	20	10	100		TIdak ada	Maintain penyebaran informasi keamanan pangan melalui WAG Tim Pengelola Pasar Krisak
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25	25	20	20	10	100		Tidak ada	Maintain penyebaran informasi keamanan pangan melalui WAG Tim Pengelola Pasar Krisak
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	25	25	20	20	10	100		Tidak ada kendala berarti	Tetap melakukan sosialisasi keamanan pangan melalui WAG Tim Pengelola Pasar
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	25	25	20	20	10	100		Tidak ada	1. Maintain penyebaran informasi keamanan pangan melalui WAG Tim Pengelola Pasar Krisak 2. Mempelajari kriteria penilaian Lomba PPABK
168	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	-	25	25	20	20	10	-	1	Tidak ada	Persiapan mengikuti lomba PPABK

Target Tahunan : 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Januari	0	0.00	0.00	0.00		8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Februari	2	0.00	10.00	20.00	3.75	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Maret	10	75.00	30.00	30.00	16.88	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	April	20	75.00	90.00	45.00	26.25	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Mei	35	195.00	90.00	50.00	41.88	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Juni	40	265.00	90.00	75.00	53.75	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Juli	50	345.00	90.00	80.00	64.38	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Agustus	91.25	465.00	100.00	170.00	91.88	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	September	94.38	485.00	100.00	180.00	95.63	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Oktober	95.63	485.00	100.00	200.00	98.13	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	November	100	500.00	100.00	200.00	100.00	8
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	**Desember**	**14,81**				**14.81**	**8.00**

Target Tahunan : 14.81%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	Penyusunan target output dan target kinerja masih berproses dengan adanya efisiensi anggaran	Menunggu perencanaan target output dan kinerja melalui komunikasi dengan UPT pengampu
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	1. Penyusunan target output dan target kinerja masih berproses dengan adanya efisiensi anggaran 2. Anggaran yang tersedia (non blokir) untuk perkara	1. Menunggu perencanaan target output dan kinerja melalui komunikasi dengan Unit pengampu 2. Efisiensi perjalanan dinas terutama dalam
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	1. Informasi relaksasi anggaran QCD di tanggal 25 Maret 2025, yang ditindaklanjuti dengan pengusulan pembukaan blokir anggaran QCD 2. perubahan cara perhitungan indikator kinerja menyebabkan capaian melebihi target bulanan	1. Pemetaan kembali TO yang sudah ada dan dilakukan pendalaman informasi 2. Bersurat ke roren terkait review target bulanan TW 2 sd TW 4
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	Realisasi melebihi target dikarenakan perhitungan target masih mengikuti rumus perhitungan kinerja tahun sebelumnya. Sudah bersurat kepada Ka Biro roren terkait permohonan perubahan target bulanan Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT melalui surat nomor B-PR.04.02.168.04.25.315 tanggal 21 April 2025	Monitoring jawaban surat Permohonan Perubahan target bulanan Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT melalui surat nomor B-PR.04.02.168.04.25.315 tanggal 21 April 2025
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	Target perkara belum tercapai sehingga diperlukan upaya lebih keras dalam pendalaman informasi	Pendalaman informasi secara intensif
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	Masih belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait	Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Lapas, Asosiasi ekspedisi dan pengiriman) Pemetaan target dan pendalaman informasi TO
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33	Tidak ditemukan barang pada saat penindakan target operasi yang informasinya sudah A1	Pemetaan target operasi dan pendalaman informasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	1	1	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	38,33	Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan Negeri dalam pemberkasan perkara	Berkoordinasi dengan Polres dan JPU secara intensif sehingga pemberkasan berjalan dengan lancar
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	September	1	1	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	1	1	51,67	-	-
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	1	1	1	0	0,15	0	0	0	1	0	0,85	0	1	1	66,67	perkara I belum bisa diserahkan tahap II dikarenakan tersangka sakit dan sedang berobat	melakukan komunikasi lebih intensif dengan tersangka/pihak keluarga
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	1	1	0	0	0	1	0	0,55	1	0	0,85	0	1	1	80	1 Perkara diterbitkan P21A karena terkendala serah tahap II 1 perkara dalam tahap pemenuhan P19	Berkoordinasi dengan Korwas dalam pencarian tersangka Berkoordinasi dengan jaksa terkait pemenuhan P19
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1,7	0	1	1	90	Belum dapat diserah tahap II kedua perkara tahun 2025 karena pemenuhan P19 pada perkara II dan tersangka tidak memenuhi panggilan sampai dengan saat ini	1. melaksanakan serah tahap II untuk perkara II, 2. Berkomunikasi secara intensif dengan Korwas Polres Wonogiri terkait penangkapan tsk

Target Tahunan : 75%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
50	50		
50	50	1. Penyusunan target output dan target kinerja masih berproses dengan adanya efisiensi anggaran 2. Semua anggaran dalam rangka koordinasi maupun peningkatan kompetensi personil diblokir	1. Menunggu perencanaan target output dan kinerja melalui komunikasi dengan Unit pengampu 2. Melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri melalui daring
50	50	Tidak ada kendala	Melaksanakan patber secara intensif di TW 2 tahun 2025
50	50	data patroli siber yang ditarik dari aplikasi inawebcrawler.pom.go.id tidak rapi dan harus diolah dulu untuk dapat digunakan dalam monev patber setiap triwulan	menyampaikan kendala aplikasi tersebut kepada pemilik aplikasi melalui wa grup
50	50	Tidak ada kendala	-
50	50	Tidak ada kendala	Pelaporan patber setiap bulan dijaga ketepatan waktunya
50	50	Tidak ada kendala	Pelaporan patber setiap bulan dijaga ketepatan waktunya
50	50	tidak ada kendala	Pelaporan patroli siber dan profiling tiap bulan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan
50	50	tidak ada kendala	Pelaporan patroli siber dan profiling tiap bulan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan
50	50	diperlukan pengolahan data dalam penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	merencanakan rapat finalisasi penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
50	50	Tidak ada kendala	Terselesaikannya penyusunan dan pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
90	98 Nilai diperoleh dari: 1. Pelaporan Patroli Siber dan Profiling	Tidak ada kendala	Terselesaikannya penyusunan dan pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

Target Tahunan : 90%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber		Nilai Kualitas Analisis		Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal		Realisasi	Capaian
		Nilai	Bobot (50%)	Nilai	Bobot (25%)	Nilai	Bobot (25%)		
28	Balai POM di Baubau	100	50,00	100	25,00	88,89	22,22	97,22	108,0%
29	Balai POM di Bengkulu	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
30	Balai POM di Bima	87,5	43,75	100	25,00	100,00	25,00	93,75	104,2%
31	Balai POM di Bogor	95,83	47,92	100	25,00	100,00	25,00	97,92	108,8%
32	Balai POM di Dumai	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
33	Balai POM di Ende	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
34	Balai POM di Indragiri Hulu	95,83	47,92	100	25,00	100,00	25,00	97,92	108,8%
35	Balai POM di Jambi	95,83	47,92	100	25,00	100,00	25,00	97,92	108,8%
36	Balai POM di Jember	95,83	47,92	100	25,00	100,00	25,00	97,92	108,8%
37	Balai POM di Kediri	95,83	47,92	100	25,00	77,78	19,44	92,36	102,6%
38	Balai POM di Kendari	100	50,00	92	23,00	88,89	22,22	95,22	105,8%
39	Balai POM di Mamuju	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
40	Balai POM di Manokwari	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
41	Balai POM di Palopo	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
42	Balai POM di Palu	95,83	47,92	92	23,00	66,67	16,67	87,58	97,3%
43	Balai POM di Pangkal Pinang	100	50,00	76	19,00	100,00	25,00	94,00	104,4%
44	Balai POM di Payakumbuh	95,83	47,92	100	25,00	100,00	25,00	97,92	108,8%
45	Balai POM di Sanggau	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
46	Balai POM di Sofifi	91,67	45,84	92	23,00	100,00	25,00	93,84	104,3%
47	Balai POM di Surakarta	100	50,00	92	23,00	100,00	25,00	98,00	108,9%
48	Balai POM di Tabalong	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
49	Balai POM di Tangerang	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
50	Balai POM di Tanjungbalai	100	50,00	92	23,00	88,89	22,22	95,22	105,8%
51	Balai POM di Tarakan	100	50,00	88	22,00	100,00	25,00	97,00	107,8%
52	Balai POM di Tasikmalaya	100	50,00	92	23,00	100,00	25,00	98,00	108,9%
53	Balai POM di Tulangbawang	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik UPT			
Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	-	-
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	"Sesuai Rekomendasi Berita Acara Audit IPP thn 2024 dengan adanya efisiensi anggaran dan status gedung sewa sehingga belum dapat direalisasikan : Aspek Sarana Prasarana (parkir khusus tamu; sarana toilet khusus pria/wanita dan ramah disabilitas; pemenuhan sarana prasarana layanan kelompok rentan seperti toilet khusus, loket khusus, parkir khusus; Arena bermain anak, ruang laktasi)."	Melaksanakan Rekomendasi Audit IPP thn 2024 yang tidak membutuhkan anggaran untuk meningkatkan nilai IPP thn 2025 : 1. Aspek Kebijakan Pelayanan : a. Pelaksanaan yanblik sesuai standar pelayanan; penjadwalan dan pendataan layanan informasi/ pengaduan dan sertifikasi; pelaksanaan SKM bulanan; b. Forum Konsultasi Layanan Publik 2025 2. Aspek Profesionalisme SDM : a.Implementasi SK Reward dan Punishment; b. Pelatihan yanblik melalui Ideas. c. Membuat pin sebagai atribut khusus petugas yanblik 3. Aspek Sarana Prasarana : membuat daftar kebutuhan Sarana dan Prasarana pelayanan publik disusun sesuai standar dan menambahkan MPP dalam sarpras pelayanan publik. 4. Aspek Inovasi : membuat SK inovasi yanblik (SATU DAHSYAT) (memuat anggaran, sarpras, dan SDM) dan Monev/ implementasi Inovasi 5. Mengumpulkan data dukung persiapan Audit IPP pada gdrive (https://bit.ly/daduk_IPP2025)
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana, sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran sesuai Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 untuk meningkatkan IPP BPOM di Surakarta di Tahun 2025. - Terkait POA Review SP yang akan dilakukan di Bulan April = Kendala dalam SP Pengujian Sampel Pihak Ketiga(Lab. pengujian belum terakreditasi), SP SKI/SKE (target Roren sampai 2029 = 0 namun masih dilakukan pembahasan unit pengampu dengan Hukor terkait apakah UPT yang tidak memiliki target SKI/SKE tetap mencantumkan SP SKI/SKE pada Yanblik)	Telah dilakukan pembahasan POA IPP (https://bit.ly/daduk_IPP2025) pada tanggal 26 Maret 2025 sesuai dengan Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024, memuat item rencana aksi, pic dan timeline, sekaligus sebagai self assestment kesiapan Audit IPP Tahun 2025.
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana, sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran sesuai Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 untuk meningkatkan IPP BPOM di Surakarta di Tahun 2025.	Telah dilakukan pembahasan POA IPP (https://bit.ly/daduk_IPP2025) pada tanggal 26 Maret 2025 sesuai dengan Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024, memuat item rencana aksi, pic dan timeline, sekaligus sebagai self assestment kesiapan Audit IPP Tahun 2025.
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana, sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran sesuai Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 untuk meningkatkan IPP BPOM di Surakarta di Tahun 2025.	Telah dilakukan pembahasan POA IPP (https://bit.ly/daduk_IPP2025) pada tanggal 26 Maret 2025 sesuai dengan Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024, memuat item rencana aksi, pic dan timeline, sekaligus sebagai self assestment kesiapan Audit IPP Tahun 2025. - Usul untuk melengkapi toilet dengan pegangan khusus untuk kelompok rentan dan Jalur evakuasi/titik kumpul: jalur yang dipersiapkan jika Unit Layanan dalam keadaan bahaya/darurat, beserta tempat (Juni)
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana, sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran sesuai Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 untuk meningkatkan IPP BPOM di Surakarta di Tahun 2025.	Telah dilakukan pembahasan POA IPP (https://bit.ly/daduk_IPP2025) pada tanggal 26 Maret 2025 sesuai dengan Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024, memuat item rencana aksi, pic dan timeline, sekaligus sebagai self assestment kesiapan Audit IPP Tahun 2025. - Melengkapi data dukung persiapan audit sesuai pembagian POA yang telah disusun, meskipun belum ada informasi jadwal.
4,2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana, sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran sesuai Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 untuk meningkatkan IPP BPOM di Surakarta di Tahun 2025.	1. Mengikuti Entry Meeting PEKPPP 2. Review data dukung PEKPPP yang sudah disiapkan sesuai POA yang telah disusun sebelumnya pada Maret 2025 3. Mengupload data dukung pada aplikasi Evortala (F01) 4. Melakukan Survei Pengguna Layanan UPP sebanyak 10 Responden (F03) 4. Mengikuti Desk PEKPPP sesuai jadwal
4,2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana, sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran sesuai Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 untuk meningkatkan IPP BPOM di Surakarta di Tahun 2025.	1. Mengikuti desk PEKPPP pada tanggal 19 Agustus 2025 (jam 13.00-16.00) sesuai jadwal 2. Melakukan upload tambahan data sesuai timeline (21-25 Agustus 2025) dengan mempertimbangkan capaian target kinerja yang akan menjadi baseline target tahun depan. 3. Mengikuti Exit Meeting desk PEKPPP
4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	-	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026
4,2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	-	1. Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026.
4,2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	-	1. Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026.
4,2	4,78	Rekomendasi untuk pembangunan gedung baru di SD Bumi agar memenuhi aspek sarana prasarana pelayanan publik	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026.

Target Tahunan : 4.2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BALAI BESAR/BALAI POM 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
28	Balai POM di Tasikmalaya	4,40	4,84	4,86	4,85	Pelayanan Prima
29	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,70	4,83	4,92	4,85	Pelayanan Prima
30	Balai POM di Tulang Bawang	4,05	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
31	Balai POM di Pangkal pinang	4,70	4,90	4,64	4,84	Pelayanan Prima
32	Balai POM di Balikpapan	4,20	4,87	4,74	4,84	Pelayanan Prima
33	Balai Besar POM di Padang	4,70	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
34	Balai POM di Bogor	4,20	4,80	4,96	4,84	Pelayanan Prima
35	Balai POM di Bengkulu	4,70	4,76	5,00	4,82	Pelayanan Prima
36	Balai POM di Manokwari	4,70	4,75	5,00	4,81	Pelayanan Prima
37	Balai POM di Surakarta	4,20	4,70	5,00	4,78	Pelayanan Prima
38	Balai Besar POM di Banjarbaru	4,70	4,75	4,83	4,77	Pelayanan Prima
39	Balai POM di Ende	4,40	4,74	4,81	4,76	Pelayanan Prima
40	Balai POM di Mamuju	4,60	4,66	5,00	4,75	Pelayanan Prima
41	Balai POM di Kediri	4,20	4,66	4,98	4,74	Pelayanan Prima
42	Balai POM di Tarakan	4,51	4,66	4,96	4,74	Pelayanan Prima
43	Balai POM di Palopo	4,20	4,66	4,87	4,71	Pelayanan Prima
44	Balai Besar POM di Jayapura	4,70	4,70	4,70	4,70	Pelayanan Prima
45	Balai POM di Bima	3,75	4,60	4,89	4,67	Pelayanan Prima
46	Balai POM di Indragiri Hulu	4,05	4,63	4,77	4,67	Pelayanan Prima
47	Balai POM di Baubau	4,51	4,51	4,92	4,61	Pelayanan Prima
48	Balai POM di Payakumbuh	4,20	4,57	4,53	4,56	Pelayanan Prima
49	Balai POM di Tangerang	4,20	4,47	4,74	4,54	Pelayanan Prima
50	Balai POM di Dumai	3,75	4,59	4,41	4,54	Pelayanan Prima
51	Balai POM di Tanjungbalai	4,20	4,21	4,91	4,38	Sangat Baik
52	Balai POM di Jember	4,20	3,89	4,89	4,14	Sangat Baik
53	Balai POM di Banyumas	3,75	3,90	4,70	4,10	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76,00	76,00	78,43	103,20	Tidak ada kendala	Monev Renja

Target Tahunan : 76

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,05	2,50	4,55	TMS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	1,97	1,00	2,97	TMS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,06	4,25	7,30	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,48	3,80	7,27	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	2,51	7,50	10,01	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,63	3,34	6,96	MS
TOTAL PENGUNGKIT						39,08	TMS
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,37	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,99	MS
TOTAL HASIL						39,36	
NILAI PMPZI						78,43	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

27. Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Nilai AKIP UPT BPOM	76,00	76,00	75,69	99,59	Tidak ada kendala	-

Target Tahunan : 76

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,76	17,76
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,28	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,72
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	14,80	14,40
5.	Capaian Kinerja	20	15,08	16,05
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**74,40**	**75,69**
Predikat			**BB**	**BB**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d. bulan DESEMBER				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	100	Tidak ada kendala	Hasil akhir NKA Balai POM di Surakarta memperoleh : NK Perencanaan Anggaran 92,75 NK Pelaksanaan Anggaran 98,09 Nilai Kinerja Anggaran 95,42 yang berarti setelah dikonversikan nilai tersebut yakni memiliki nilai 5.

Target Tahunan : 5

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
063.01.672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	90,35	99,66	95,01
063.01.672839	BALAI POM DI SURAKARTA	92,75	98,09	95,42
063.01.672840	BALAI POM DI TASIKMALAYA	95,76	100,00	97,88
063.01.672841	BALAI POM DI KEDIRI	92,59	100,00	96,30
063.01.672842	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	93,55	96,70	95,13
063.01.672843	BALAI POM DI JEMBER	92,54	100,00	96,27
063.01.672844	BALAI POM DI BANYUMAS	92,55	97,85	95,20
063.01.672845	BALAI POM DI PALOPO	85,02	100,00	92,51
063.01.672846	BALAI POM DI BOGOR	99,00	95,76	97,38
063.01.672847	BALAI POM DI TANGERANG	89,67	94,61	92,14
063.01.672848	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	95,64	95,14	95,39
063.01.672849	BALAI POM DI DUMAI	93,03	96,51	94,77
063.01.672850	BALAI POM DI BAU-BAU	90,42	97,89	94,16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator	Target 2025	DESEMBER				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,80	2,80	2,719	96,79	Masih terdapat risiko yang sama dengan bahasa berbeda pada beberapa IKU Belum semua Pemilik risiko melengkapi daftar risiko dengan kertas kerja	Desk Daftar Risiko masing-masing fungsi Penyusunan Daftar Risiko Semester I tahun 2026 dilengkapi dengan kertas kerja

Target Tahunan : 2,8

Rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	43,5	43,5	0,000
Nilai Maturitas	2,719	2,719	0,000
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

30. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan Desember				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96	96	96,20	100,20	-	-

Target Tahunan : 96 (Indeks)

31. Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan Desember				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	95	95	100	105,26	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Satuan Kerja	Realisasi				Target 2025
		2022	2023	2024	2025	
38	Balai POM di Kediri	33,33	100,00	90,00	95,00	90
39	Balai POM di Kendari	50,00	100,00	100,00	95,00	100
40	Balai POM di Mamuju	62,50	100,00	95,00	100,00	95
41	Balai POM di Manokwari	91,72	100,00	100,00	95,00	100
42	Balai POM di Palopo	52,07	100,00	95,00	95,00	95
43	Balai POM di Palu	88,74	100,00	100,00	100,00	100
44	Balai POM di Pangkal Pinang	75,60	90,00	90,00	95,00	90
45	Balai POM di Payakumbuh	41,67	95,00	95,00	100,00	95
46	Balai POM di Sanggau	66,67	100,00	100,00	80,00	100
47	Balai POM di Sofifi	77,78	95,00	95,00	100,00	95
48	Balai POM di Surakarta	41,72	95,00	95,00	100,00	95
49	Balai POM di Tabalong	66,67	100,00	100,00	100,00	100
50	Balai POM di Kabupaten Tangerang	66,10	100,00	95,00	95,00	95
51	Balai POM di Tanjungbalai	33,33	100,00	100,00	100,00	100
52	Balai POM di Tarakan	66,67	90,00	95,00	100,00	95
53	Balai POM di Tasikmalaya	50,00	80,00	95,00	90,00	95
54	Balai POM di Tulangbawang	47,48	100,00	100,00	100,00	100

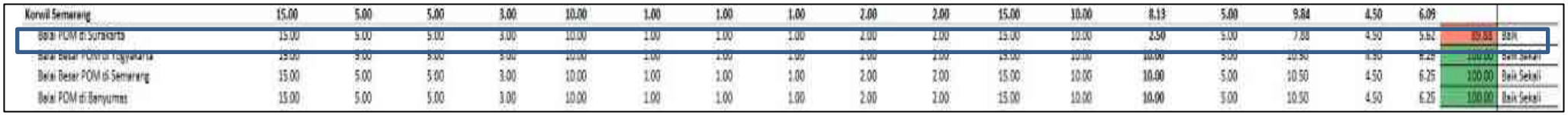
Target Tahunan : 95 (Nilai)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan Desember				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Balai POM di Surakarta	57,46	57,46	89,88	156,42	1. Proses balik- nama sertifikat masih ada kendala di KKPR 2. Pelunasan Pajak tanah Solobaru senilai Rp.179.266.150	1. Ke Dinas -PU Sukoharjo untuk permohonan KKPR 2. Koordinasi ke Pemkab Sukiharjo agar diberikan pembebasan Pajak

Target Tahunan : 57.46 Nilai



Korwil Semarang	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	8.13	5.00	9.84	4.50	6.09	
Balai POM di Surakarta	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	2.50	5.00	7.88	4.50	5.62	89.88 Baik
Balai Besar POM di Yogyakarta	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00 Baik Sekali
Balai Besar POM di Semarang	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00 Baik Sekali
Balai POM di Banyumas	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00 Baik Sekali

33. Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Surakarta

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan Desember				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Surakarta	81	81	59,03	72,87	Belum ada SDM Khusus Kearsipan	Menyiapkan SDM khusus untuk mengelola Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2025	Kategori	Keterangan
35.	Balai POM di Balikpapan	77.92	BB (Sangat Baik)	Dinilai sebagai Loka
36.	Balai POM di Tarakan	77.38	BB (Sangat Baik)	
37.	Balai POM di Bogor	76.06	BB (Sangat Baik)	
38.	Balai POM di Mamuju	75.71	BB (Sangat Baik)	
39.	Balai POM di Kediri	75.68	BB (Sangat Baik)	
40.	Balai POM di Tasikmalaya	75.34	BB (Sangat Baik)	
41.	Balai Besar POM di Surabaya	74.76	BB (Sangat Baik)	
42.	Balai POM di Tulang Bawang	74.53	BB (Sangat Baik)	Dinilai sebagai Loka
43.	Balai POM di Jambi	73.5	BB (Sangat Baik)	
44.	Balai POM di Jember	71.65	BB (Sangat Baik)	
45.	Balai POM di Bau-bau	70.59	BB (Sangat Baik)	Dinilai sebagai Loka
46.	Balai POM di Tangerang	69.77	B (Baik)	
47.	Balai POM di Dumai	69.65	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
48.	Balai POM di Sanggau	69.06	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
49.	Balai POM di Palopo	65.53	B (Baik)	
50.	Balai POM di Ende	64.19	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
51.	Balai POM di Bima	63.94	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
52.	Balai POM di Tanjungbalai	63.16	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
53.	Balai POM di Surakarta	59.03	CC (Cukup)	

Target Tahunan : 81 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

34. Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan Desember				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	95	99,8	105,05	Web smartpom baru dapat diakses pada Juli 2025 saat kegiatan lain juga berjalan sehingga pelaporan terlambat	Menyampaikan hasil evaluasi capaian dak ke kab/kota penerima dana DAK agar dilakukan pelaporan smartpom

Target Tahunan : 95%

35. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan Desember				
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Rekomendasi
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	98	98	87,99	89,78	-	-

Target Tahunan : 98%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Satuan Kerja	Realisasi				Target 2025
		2022	2023	2024	2025	
34	Balai POM di Ende	6,68	22,86	50,83	96,01%	65
35	Balai POM di Indragiri Hulu	25,45	21,38	93,40	88,86%	93
36	Balai POM di Jambi	23,99	36,12	54,69	66,02%	65
37	Balai POM di Jember	28,78	31,83	56,98	54,38%	65
38	Balai POM di Kediri	19,57	41,28	73,79	76,09%	74
39	Balai POM di Kendari	42,42	37,16	63,24	56,52%	65
40	Balai POM di Mamuju	41,28	33,01	75,10	59,85%	75
41	Balai POM di Manokwari	47,14	28,43	60,06	61,78%	65
42	Balai POM di Palopo	32,05	28,80	92,20	91,95%	92
43	Balai POM di Palu	38,90	30,23	79,84	76,54%	80
44	Balai POM di Pangkal Pinang	4,56	37,58	71,25	34,45%	71
45	Balai POM di Payakumbuh	51,08	33,07	95,63	78,05%	96
46	Balai POM di Sanggau	32,93	35,40	94,93	100,00%	95
47	Balai POM di Sofifi	9,97	75,57	60,51	85,72%	75
48	Balai POM di Surakarta	29,45	31,78	97,80	87,99%	98
49	Balai POM di Tabalong	39,44	27,97	88,89	92,22%	89
50	Balai POM di Kabupaten Tangerang	41,52	50,65	99,07	78,46%	99
51	Balai POM di Tanjungbalai	22,56	35,59	95,43	99,83%	95
52	Balai POM di Tarakan	44,44	35,22	92,71	69,04%	93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI NPS BALAI POM DI SURAKARTA TW IV TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS		NAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025	TARGET s.d TW IV	REALISASI s.d TW IV	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TW IV	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	82,50	85,20	103,27	103,27
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26,00	26,00	26,67	102,58	102,58
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	92,88	109,27	109,27
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	-	-	-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	88,00	103,53	103,53
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	90,33	96,69	107,04	107,04
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	98,79	108,56	108,56
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	95,00	98,12	103,28	103,28
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	99,15	108,96	108,96
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	88,80	98,11	110,48	110,48
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,00	81,60	102,00	102,00
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	105,27	105,27	105,27
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	14,00	14,32	102,29	102,29
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							104,75	104,75
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00	67,00	70,37	105,03	105,03
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							105,03	105,03
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,94	86,94	87,40	100,53	100,53
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,13	100,13
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	14,81	14,81	100	100
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	75,00	90,00	120,00	120,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							120,00	120,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	90,00	98,00	108,89	108,89
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							108,89	108,89
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	4,20	4,78	113,81	113,81
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							113,81	113,81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76,00	76,00	78,43	103,20	103,20
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	76,00	76,00	75,69	99,59	99,59
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,80	2,80	2,71	96,79	96,79
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							99,89	99,89

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).